

PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN
2021**

Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun "Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2020". Buku ini disusun dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 65 Tahun 2010 tentang Profil Perkembangan Kependudukan, serta Permendagri No. 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang akan mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Selain itu juga bertujuan untuk menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sangat disadari, bahwa buku ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, saran dan kritik terhadap buku ini sangat diharapkan, guna penyempurnaannya. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan, baik moril, material dan kerjasama yang baik, demi kelancaran penyusunan buku ini.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman

Drs. SUSMIARTO, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660527 199303 1 003

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I	PENDAHULUAN	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Dasar Hukum	5
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Ruang Lingkup	6
1.5	Sumber Data	7
1.6	Sistematika Penulisan	7
1.7	Pengertian Umum	8
1.7.1	Kependudukan	8
1.7.2	Tenaga Kerja	10
1.7.3	Sosial	11
BAB II	GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN	23
2.1	Letak Geografis	23
2.2	Pembagian Wilayah dan Pemerintahan	23
2.3	Karakteristik Wilayah	24
BAB III	PROFIL KUANTITAS PENDUDUK KABUPATEN SLEMAN	28
3.1	Komposisi Penduduk menurut Karakteristik Demografi	29
3.1.1	Jumlah Penduduk	30
3.1.2	Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	32
3.1.3	Umur Median (<i>Median Age</i>)	35
3.1.4	Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	39
3.1.5	Piramida Penduduk	41
3.1.5.1	Piramida Penduduk Kecamatan Gamping	44
3.1.5.2	Piramida Penduduk Kecamatan Godean	45
3.1.5.3	Piramida Penduduk Kecamatan Moyudan	45
3.1.5.4	Piramida Penduduk Kecamatan Minggir	46
3.1.5.5	Piramida Penduduk Kecamatan Seyegan	47
3.1.5.6	Piramida Penduduk Kecamatan Mlati	48
3.1.5.7	Piramida Penduduk Kecamatan Depok	49
3.1.5.8	Piramida Penduduk Kecamatan Berbah	50
3.1.5.9	Piramida Penduduk Kecamatan Prambanan	51
3.1.5.10	Piramida Penduduk Kecamatan Kalasan	52
3.1.5.11	Piramida Penduduk Kecamatan Ngemplak	53
3.1.5.12	Piramida Penduduk Kecamatan Ngaglik	54
3.1.5.13	Piramida Penduduk Kecamatan Sleman	55
3.1.5.14	Piramida Penduduk Kecamatan Tempel	56
3.1.5.15	Piramida Penduduk Kecamatan Turi	57

3.1.5.16	Piramida Penduduk Kecamatan Pakem	58
3.1.5.17	Piramida Penduduk Kecamatan Cangkringan	59
3.1.6	Rasio Ketergantungan	60
3.1.7	Rasio Kepadatan Penduduk (<i>Population Density Ratio</i>)	62
3.2	Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	66
3.2.2	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	68
3.2.3	Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin	71
3.3	Keluarga	75
3.3.1	Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	77
3.3.2	Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK)	77
3.3.3	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur	79
3.3.4	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin	80
3.3.5	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin	82
3.3.6	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan	83
3.3.7	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Bekerja	85
BAB IV	KUALITAS PENDUDUK	87
4.1	Kesehatan	88
4.1.1	Angka Kematian Bayi	89
4.1.2	Angka Kematian Anak dan Balita	95
4.1.3	Angka Kematian Ibu	98
4.1.2	Fertilitas	100
4.1.3	Keluarga Berencana	103
4.1.4	Pernikahan, Talak, Rujuk	108
4.1.5	Pendidikan	110
4.1.6	Ketenagakerjaan	115
4.1.7	Dokumen Kependudukan	123
BAB V	SOIAL	129
5.1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	129
5.2	Penyandang Disabilitas	135
BAB VI	PANDEMI COVID-19 DAN ISU KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SLEMAN	136
6.1	Kemiskinan	136
6.2	Partisipasi Keluarga Berencana	137
6.3	Kasus Perceraian	138
BAB VI	DAFTAR PUSAKA	140

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Sleman	24
Tabel 2.2	Nama dan Luas Desa, Karakteristik Wilayah dan Arah Pengembangan Perusahaan	26
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020	31
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	34
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020	36
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Lansia (Usia >= 65 Tahun) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2020	38
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020	39
Tabel 3.6	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sleman Menurut Kecamatan Tahun 2020	61
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2020	64
Tabel 3.8	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020	67
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020	68
Tabel 3.9	Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020	70
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Berdasarkan Kecamatan Menurut Data SIAK Tahun 2020	74
Tabel 3.11	Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga, dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Tahun 2020	78

Tabel 3.12	Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Tahun 2020	79
Tabel 3.13	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur Tahun 2020	80
Tabel 3.14	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan	81
Tabel 3.15	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Kecamatan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020	82
Tabel 3.16	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2020	84
Tabel 3.17	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Bekerja dan Kecamatan Tahun 2020	86
Tabel 4.1.	Distribusi Angka Kematian Bayi menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020	92
Tabel 4.2.	Distribusi Kematian Neonatal menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020	92
Tabel 4.3.	Distribusi Kematian Post-Neonatal menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020	93
Tabel 4.4.	Distribusi Angka Kematian Anak menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020	96
Tabel 4.5.	Distribusi Angka Kematian Balita menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020	97
Tabel 4.6.	Distribusi Angka Kematian Ibu menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020	99
Tabel 4.7.	Distribusi Parameter Kelahiran di Kabupaten Sleman Tahun 2020	101
Tabel 4.8.	Parameter Keluarga Berencana menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020	104
Tabel 4.9.	Distribusi Pernikahan, Wali Nikah, Cerai, dan Rujuk menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020	109
Tabel 4.10.	Angka Partisipasi Kasar SD - SMP Kabupaten Sleman Tahun 2020	112

Tabel 4.11.	Distribusi Lapangan Pekerjaan menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020	117
Tabel 4.12.	Distribusi Lapangan Pekerjaan menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020	120
Tabel 4.13.	Distribusi Dokumen Kependudukan menurut Kecamatan	125
Tabel 5.1	Penyandang Masalah Kesejahteraan menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020	134
Tabel 5.2	Penyandang Masalah Sosial di Kabupaten Sleman Tahun 2020	135

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020	33
Gambar 3.2	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2020	40
Gambar 3.3	Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2020	42
Gambar 3.4	Piramida Penduduk Kecamatan Gamping Tahun 2020	44
Gambar 3.5	Piramida Penduduk Kecamatan Godean Tahun 2020	45
Gambar 3.6	Piramida Penduduk Kecamatan Moyudan Tahun 2020	46
Gambar 3.7	Piramida Penduduk Kecamatan Minggir Tahun 2020	47
Gambar 3.8	Piramida Penduduk Kecamatan Seyegan Tahun 2020	48
Gambar 3.9	Piramida Penduduk Kecamatan Mlati Tahun 2020	49
Gambar 3.10	Piramida Penduduk Kecamatan Depok Tahun 2020	50
Gambar 3.11	Piramida Penduduk Kecamatan Berbah Tahun 2020	51
Gambar 3.12	Piramida Penduduk Kecamatan Prambanan Tahun 2020	52
Gambar 3.13	Piramida Penduduk Kecamatan Kalasan Tahun 2020	53
Gambar 3.14	Piramida Penduduk Kecamatan Ngemplak Tahun 2020	54
Gambar 3.15	Piramida Penduduk Kecamatan Ngaglik Tahun 2020	55
Gambar 3.16	Piramida Penduduk Kecamatan Sleman Tahun 2020	56
Gambar 3.17	Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2020	57
Gambar 3.18	Piramida Penduduk Kecamatan Turi Tahun 2020	58
Gambar 3.19	Piramida Penduduk Kecamatan Pakem Tahun 2020	59
Gambar 3.20	Piramida Penduduk Kecamatan Cangkringan Tahun 2020	60
Gambar 3.21	Persentase Penduduk Sleman Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020	71

Gambar 3.22	Persentase Penduduk Sleman Menurut Status Perkawinan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020	74
Gambar 3.23	Persentase Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja Tahun 2020	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan aspek kependudukan atau demografi. Penduduk menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan suatu bangsa. Adanya data yang bersifat empiris jangka panjang, ditemukan bahwa transisi demografi akibat penurunan kelahiran dan kematian bayi yang terus-menerus mampu mengubah struktur umur penduduk dari tingginya proporsi penduduk muda sebelum usia 15 tahun menjadi peningkatan proporsi penduduk usia kerja 15 tahun ke atas. Jika peningkatan kuantitas penduduk usia produktif disertai dengan peningkatan kualitas penduduknya melalui pendidikan, keterampilan, dan peningkatan ketersediaan lapangan kerja, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Birdsal dan Sinding, 2001; Bloom dkk., 2003; Adioetomo, 2005).

Kependudukan merupakan isu strategis dalam kerangka pembangunan nasional. *Pertama*, kependudukan atau dalam hal ini penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program yang dilakukan. *Kedua*, keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan pemerintah. *Ketiga*, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. *Keempat*, karena luasnya cakupan masalah kependudukan. Analisis mengenai kependudukan dalam pembangunan nasional harus dilihat pada tataran kebijakan dan implementasi. Pada tataran kebijakan, analisis diarahkan untuk melihat sampai seberapa jauh pemerintah dalam mengintegrasikan isu-isu kependudukan dalam kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada tataran implementasi dapat dilihat seberapa jauh kebijakan tersebut diimplementasikan dalam program-program sektoral (Tjiptoherijanto, 2001).

Penduduk merupakan aspek penting dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak lain merupakan penduduk itu sendiri. Terjadinya pergeseran paradigma yang

mengedepankan pembangunan berwawasan kependudukan memiliki konsekuensi, yaitu pembangunan hendaknya disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, serta lebih mengutamakan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi dalam kependudukan turut memengaruhi aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, keberhasilan pembangunan juga ikut memengaruhi suatu bentuk perubahan demografi. Oleh karena itu, perubahan demografi juga berdampak terhadap pembangunan. Hubungan antara penduduk dan pembangunan menjadi perdebatan sejak tahun 1950-an, apakah penduduk menjadi penghambat, penunjang, atau tidak ada hubungan sama sekali (Birdsall dan Sinding, 2001; Bloom, 2001; Bloom dkk., 2003; Canning dan Sevilla, 2003).

Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: *Pertama*, berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. *Kedua*, berkaitan dengan kualitas penduduk yang berhubungan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. *Ketiga* adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. *Keempat* adalah data dan informasi penduduk dan *kelima* adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk dan pembangunan memiliki hubungan yang erat dalam suatu siklus sebab dan akibat. Kebijakan dalam pembangunan akan memberikan dampak tertentu pada penduduk. Beberapa indikator utama dari hasil pembangunan dinyatakan melalui tingkat pendapatan atau distribusinya, tingkat partisipasi kerja, status pendidikan dan kesehatan, serta kualitas lingkungan. Pembangunan ini akan berdampak pada kualitas manusia sebagai elemen kependudukan. Kualitas manusia atau khususnya tenaga kerja, selanjutnya akan memberikan dampak terhadap proses pembangunan selanjutnya yaitu produksi.

Hasil-hasil pembangunan dan perubahan kualitas penduduk berikutnya akan mempengaruhi indikator kependudukan lainnya, yaitu tingkat *fertilitas*, *mortalitas*, dan *migrasi*. Proses ini berlangsung secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Dengan kebijakan yang dilakukan satu sektor akan mempengaruhi proses kependudukan maupun kualitas dari penduduk itu sendiri, karena penduduk dapat bersifat sebagai objek maupun subjek dari pembangunan.

Memahami kerangka kependudukan dan pembangunan lebih dalam akan menempatkan penduduk sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*). Pengertian ini dapat diartikan dalam dua hal, yaitu penduduk sebagai konsumen dan penduduk sebagai produsen atau perilaku aktif pembangunan.

Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Pentingnya komponen penduduk dalam pembangunan menjadikan kebutuhan akan data kependudukan sebagai hal yang sangat mendasar. Data dapat menjadi bukti empiris dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan (*evidence-based policy*). Sehubungan dengan hal tersebut, data kependudukan dibutuhkan untuk mengakomodasi empat hal penting yaitu: peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta terakhir administrasi penduduk.

Peningkatan kualitas akan melihat sejauh mana tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, harapan hidup, serta keahlian dan penguasaan teknologi dari penduduk. Kemudian, penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas dapat dilakukan melalui penyediaan data tingkat Fertilitas maupun penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dalam hal penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dibutuhkan data-data kependudukan terkait tata kelola urbanisasi dan tata kelola migrasi baik internal maupun eksternal. Terakhir, administrasi penduduk dan catatan sipil akan menjadi dasar kuat pembangunan data kependudukan melalui perluasan cakupan NIK dan perluasan kepemilikan akta kelahiran dan dokumen lainnya.

Kebutuhan data dan informasi kependudukan yang lengkap dan akurat untuk menunjang perencanaan pembangunan sangat penting dan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan dan pembangunan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun

2010 tentang pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan mengamanatkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan.

Dinamika dan perubahan penduduk dapat digunakan untuk menelaah implikasi pada struktur umur penduduk, angka kelahiran total (AKT atau TFR), pendidikan, dan ketenagakerjaan. Perubahan penduduk, terutama penurunan angka kelahiran total, perubahan struktur umur, dapat membantu untuk memahami implikasi pada pertumbuhan, jumlah penduduk, pendidikan dan ketenagakerjaan. Informasi angka AKT di suatu daerah dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan dan menyusun kebijakan terkait dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduksi, sosial (pendidikan), ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Sleman dan prediksi prospek kependudukan di masa yang akan datang untuk menunjang pemenuhan kebutuhan informasi kependudukan dalam merencanakan kebijakan sektor maupun program sektoral terkait dalam upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk. Dengan profil perkembangan kependudukan ini, akan diketahui jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, menurut umur, jenis kelamin, persebaran, laju pertumbuhannya, maupun karakteristik lainnya. Informasi pada Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diambil dari informasi pada rentang waktu tahun 2020.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan profil perkembangan kependudukan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

- d. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
- h. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- i. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010/Nomor 162/Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan adalah :

- a. Menyediakan informasi perkembangan kependudukan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.
- b. Mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada, menurut umur, jenis kelamin maupun karakteristik yang lainnya.
- c. Mengetahui keadaan dan persebaran penduduk dari waktu ke waktu, agar penyebarannya serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1.4 Ruang Lingkup

Buku ini menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2020. Profil ini merupakan hasil olahan rekaman data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bersumber dari hasil kompilasi dan konsolidasi registrasi KTP-el. Di KTP-el terekam data dasar demografi menyangkut umur, tahun kelahiran, jenis kelamin, pendidikan, dan kegiatan penduduk. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

mengolah data itu dan dijadikan sebagai data dasar kependudukan di Indonesia. Sejak tahun 2013, hasil olahan itu oleh Kemendagri khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), digunakan sebagai data dasar penyusunan profil kependudukan di tiap kabupaten/kota dan provinsi. Dari profil itu dapat dipahami dinamika dan perubahan penduduk di tiap kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman membahas tentang perkembangan kependudukan yang terdiri atas data kuantitas, kualitas, dan kepemilikan dokumen kependudukan lingkup wilayah Kabupaten Sleman yang meliputi 17 kecamatan yaitu Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem dan Kecamatan Cangkringan. Data kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk; jumlah komposisi dan persebaran penduduk; penduduk menurut karakteristik demografi. Data kualitas penduduk, meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Data kepemilikan dokumen kependudukan berupa kepemilikan KK, KTP-eI, KIA, Akta (kelahiran; perkawinan; perceraian; kematian).

1.5 Sumber Data

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini berbasis data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilengkapi dengan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Kabupaten Sleman, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, serta instansi-instansi terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

Buku ini memuat empat pokok bahasan. Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sumber data dan pengertian umum.

Bab II diulas gambaran umum Kabupaten Sleman. Tidak hanya uraian letak dan kondisi fisiografis tetapi juga menyangkut kondisi umum demografi, gambaran umum ekonomi,

potensi daerah dan sosial budaya. Uraian itu diharapkan dapat memberikan gambaran umum menyangkut situasi dan kondisi Kabupaten Sleman sebelum membahas hal ihwal dinamika dan perubahan penduduk di bab-bab berikutnya.

Bab III membahas materi profil kuantitas penduduk Kabupaten Sleman terkait komposisi penduduk menurut karakteristik demografi, komposisi penduduk menurut karakteristik sosial dan keluarga.

Bab IV menelaah aspek komponen kualitas penduduk kesehatan (Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak dan Balita, Angka kematian Ibu, Keluarga Berencana dan Pernikahan/Talak/Rujuk) dan ketenagakerjaan.

1.7 Pengertian Umum

Pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan:

1.7.1 Kependudukan

- a. **Penduduk** adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- b. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)** adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
- d. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
- e. **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
- f. **Profil perkembangan kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
- g. **Persebaran penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan.

- h. **Penyebaran penduduk** adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- i. **Umur median** (*median age*) adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median.
- j. **Rasio jenis kelamin** (*sex ratio*) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.
- k. **Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan** (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun).
- l. **Rasio kepadatan penduduk** (*density ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.
- m. **Laju pertumbuhan penduduk** adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu.
- n. **Migrasi penduduk** adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya, dengan tujuan untuk menetap.
- o. **Piramida penduduk adalah** grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.
- p. **Rata-rata usia kawin pertama** (*singulate mean age at marriage*) adalah perkiraan rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin).
- q. **Keluarga** adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.
- r. **Keluarga inti** (*nuclear family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak kandung, angka pangkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
- s. **Keluarga luas** (*extended family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak (baik yang sudah kawin atau belum), cucu, orangtua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

- t. **Jumlah kelahiran** adalah banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.
 - u. **Angka kelahiran menurut umur** ($ASFR = age\ specific\ fertility\ rate$) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan usia produktif (15-49 tahun) menurut kelompok umur yang sama.
 - v. **Angka Kelahiran Umum** (*General Fertility Rate/GFR*), adalah angka yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir dari setiap 1.000 wanita pada usia reproduksi atau melahirkan yaitu pada kelompok usia 15-49 tahun.
 - w. **Angka Kelahiran Kasar** (*Crude Birth Rate/CBR*), adalah angka kelahiran yang menunjukkan jumlah kelahiran perseribu penduduk dalam suatu periode.
 - x. **Rasio anak dan perempuan** ($CWR = child\ women\ ratio$) adalah rasio antara jumlah anak dibawah lima tahun di suatu tempat pada suatu waktu, dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun.
 - y. **Tingkat Kematian Kasar** (*Crude Death Rate/CDR*), adalah angka yang menunjukkan rata-rata kematian perseribu penduduk dalam satu tahun.
 - z. **Tingkat Kematian Menurut Umur** (*Age Specific Death Rate/ASDR*), adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu perseribu penduduk dalam kelompok yang sama.
- aa. **Tingkat Kematian Bayi** (*Infant Mortality Rate/IMR*), adalah angka yang menunjukkan banyaknya bayi yang meninggal dari setiap 1.000 bayi yang lahir hidup.

1.7.2 Tenaga Kerja

Pengertian umum ketenagakerjaan:

- a. **Penduduk** adalah penduduk yang berdomisili atau menetap di wilayah tersebut.
- b. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih.
- c. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang sudah bekerja dan yang belum bekerja tetapi punya keinginan bekerja (masih menganggur).
- d. **Penganggur terbuka** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja tetapi punya keinginan bekerja/sedang mencari pekerjaan atau disebut penganggur murni.

Pada definisi ini benar-benar tidak bekerja, tidak membantu orang lain termasuk orang tua dalam pekerjaannya meskipun tidak dibayar.

- e. **Usia Bekerja** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang bekerja untuk memperoleh pendapatan, atau membantu memperoleh pendapatan.

Bekerja diatas 35 Jam/ Minggu

Penduduk yang bekerja bekerja jika dijumlahkan 35 jam atau lebih dalam satu minggu

Bekerja kurang 35 Jam/ Minggu

Penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Contoh: pekerja serabutan, bekerja di sawah hanya beberapa jam sehari, sopir pengganti, pekerja yang bekerja hanya jika ada pesanan, pekerjaan yang belum menentu waktunya tetapi jika dijumlahkan dalam 1 minggu kurang dari 35 jam seminggu atau disebut Setengah Penganggur

- f. **Usia Sekolah** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang masih sekolah, sedangkan anak sekolah tetapi usianya di bawah 15 tahun tidak termasuk definisi ini, tetapi masuk definisi anak.
- g. **Mengurus Rumah Tangga** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang mengurus rumah tangga, karena sesuatu alasan misalnya pendapatan sudah cukup, mengurus anak dan alasan lain sehingga tidak ingin bekerja atau mencari pekerjaan lagi.
- h. **Penerima pendapatan dan lainnya** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja karena alasan telah menerima pendapatan dari pensiun, simpanan/sewa atas milik dan karena alasan usia tua, pensiun, cacat dan alasan lainnya.
- i. **Anak**

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1.7.3 Sosial

Dua puluh enam jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria antara lain adalah sebagai berikut ini.

- a. **Anak Balita Terlantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang diterlantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksplorasi untuk tujuan tertentu.
 - 1. Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya
 - 2. Tidak pernah/tidak cukup diberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti
 - 3. Makan makanan pokok tidak mencukupi
 - 4. Anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan keterlantaran
 - 5. Apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan moderen (dibawa ke Puskesmas, dan lain-lain)
 - 6. Mengalami eksplorasi
 - b. **Anak Terlantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- Kriteria :
- 1. Berasal dari keluarga fakir miskin
 - 2. Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
 - 3. Diterlantarkan oleh orang tua/keluarga
 - 4. Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
 - 5. Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP
 - 6. Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
 - 7. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
 - 8. Bila sakit tidak diobati
 - 9. Yatim, piatu atau yatim piatu
 - 10. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
 - 11. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja
- c. **Anak berhadapan dengan hukum** adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria:

1. Anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum
 2. Anak yang mengikuti proses peradilan
 3. Anak yang berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan)
 4. Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengikuti pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lapas
 5. Anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum
 6. Anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua: perdata
 7. Anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana
- d. **Anak Jalanan** adalah seorang anak yang berusia 5 sampai 18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria:

1. Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
 2. Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
 3. Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan
 4. Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 (enam) jam per hari dan dihitung untuk 1 (satu) bulan yang lalu
- e. **Anak dengan Kedisabilitasan** (ADK) adalah seseorang yang berusia 18 tahun kebawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang teridri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

1. Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu, wicara
2. Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
3. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
4. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari

f. **Anak yang memerlukan perlindungan khusus** adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban eksplorasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak korban perdagangan
3. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental
4. Anak korban eksplorasi
5. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta
7. Anak yang terinfeksi HIV/AIDS

g. **Lanjut Usia Terlantar** adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

1. Tidak ada keluarga yang mengurusnya
2. Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari
4. Menderita minimal 1 (satu) jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya
5. Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin

Untuk Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu:

LUT Potensial : lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa

LUT Tidak Potensial : lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain

h. **Penyandang disabilitas** adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

1. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari
2. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
3. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
4. Penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
5. Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
6. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda

i. **Tuna susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
2. Menjajakan diri di tempat umum di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotik)

j. **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar
2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dan lain-lain

k. **Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
2. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, dengan alasan meminta sumbangan untuk organisasi tertentu
4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya

l. **Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaur-ulang barang-barang bekas.

Kriteria:

Tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengais langsung dan mendaur-ulang barang bekas, dan lain-lain

m. **Kelompok minoritas** adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.

Kriteria:

1. Tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk
2. Mempunyai perilaku menyimpang

n. **Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)** adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 (tiga) bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
 2. Telah selesai atau segera keluar dari lembaga pemasarakatan karena masalah pidana
 3. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
 4. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
 5. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
- o. **Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
 2. Telah terinfeksi HIV/AIDS
- p. **Korban penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan)
 2. Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba-coba
 3. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang
 4. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya
- q. **Korban trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Kriteria:

1. Mengalami tindak kekerasan
2. Mengalami eksplorasi seksual
3. Mengalami penelantaran

4. Mengalami pengusiran (deportasi)
5. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu
- r. **Korban tindak kekerasan** adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksplorasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria:

Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami:

- tindak kekerasan
- penelantaran
- eksplorasi
- diskriminasi
- bentuk-bentuk tindak kekerasan lainnya

berakibat terganggunya fungsi sosial.

- s. **Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksplorasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Kriteria:

1. Calon pekerja migran
2. Pekerja migran internal
3. Pekerja migran lintas negara
4. Eks pekerja migran

yang mengalami masalah sosial dalam bentuk:

- tindak kekerasan
- eksplorasi
- penelantaran
- pengusiran (deportasi)

- ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempatnya bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu
- t. **Korban bencana alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria:

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. Korban jiwa
2. Kerusakan lingkungan
3. Kerugian harta benda, dan
4. Dampak psikologis

- u. **Korban bencana sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria:

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. Korban jiwa manusia
2. Kerusakan lingkungan
3. Kerugian harta benda, dan
4. Dampak psikologis

- v. **Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria:

1. Perempuan berusia 18-59 tahun
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak
(cek Istilah BPS)

w. **Fakir miskin** adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kriteria:

1. Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota
 2. Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)
 3. Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun)
 4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit
 5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun bagi anak-anaknya
 6. Tidak memiliki harta (*asset*) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin
 7. Tinggal di rumah yang tidak layak huni
 8. Sulit memperoleh air yang bersih
- x. **Keluarga bermasalah sosial psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar

Kriteria:

1. Suami atau istri sering tanpa saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi
2. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
3. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi
4. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi

y. **Keluarga Berumah Tidak Layak Huni** adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Kriteria:

1. Kondisi rumah:

- luas lantai perkapita < 4 m² (perkotaan) dan < 10 m² (perdesaan)
- sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
- tidak mempunyai akses MCK
- bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu/rumbia
- tidak memiliki pembagian ruangan
- lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap
- letak rumah tidak teratur dan berdempetan
- kondisi rusak

2. Kondisi lingkungan

- lingkungan kumuh dan becek
- saluran pembuangan air tidak memenuhi standar
- jalan setapak tidak teratur

3. Kondisi keluarga:

- kebanyakan keluarga miskin (di bawah garis kemiskinan)
- kesadaran untuk ikut serta memiliki dan memelihara lingkungan pada umumnya rendah (ikut bersih kampung, ikut kerja bakti, membuang sampah sembarangan di sungai)

z. **Komunitas Adat Terpencil** adalah sekelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

1. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen
2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan
3. Pada umumnya terpencik secara geografis dan relatif sulit dijangkau
4. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem

5. Peralatan dan teknologinya sederhana
6. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumberdaya alam setempat relatif tinggi
7. Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

2.1 Letak Geografis

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Sleman 574,82 Km² atau 18% dari luas wilayah DIY, terbentang di antara 110°33'00" dan 110°13'00" Bujur Timur, serta 7°34'51" dan 7°47'03" Lintang Selatan. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Magelang, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

2.2 Pembagian Wilayah dan Pemerintahan

Secara administratif, terbagi atas 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 pedukuhan. Selengkapnya dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administratif Kabupaten Sleman

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Pedukuhan
1.	Gamping	2,925	5	59
2.	Godean	2,684	7	77
3.	Moyudan	2,762	4	65
4.	Minggir	2,727	5	68
5.	Seyegan	2,663	5	67
6.	Mlati	2,852	5	74
7.	Depok	3,555	3	58
8.	Berbah	2,299	4	58
9.	Prambanan	4,135	6	68
10.	Kalasan	3,584	4	80
11.	Ngemplak	3,571	5	82
12.	Ngaglik	3,852	6	87
13.	Sleman	3,132	5	83
14.	Tempel	3,249	8	110
15.	Turi	4,309	4	42
16.	Pakem	4,384	5	61
17.	Cangkringan	4,799	5	73
KABUPATEN SLEMAN		57,482	86	1.212

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, 2014

2.3 Karakteristik Wilayah

Wilayah Kabupaten Sleman memiliki ketinggian antara 100 meter hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan relatif datar dengan peruntukan utama sebagai lahan pertanian, industri, dan permukiman, sedangkan bagian utara merupakan lereng Gunung Merapi yang memiliki banyak potensi sumber air. Di lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua buah bukit, yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari kawasan wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Kuning, Boyong, Winongo, Gendol dan Opak.

Berdasarkan karakteristik sumberdaya, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat kawasan, yaitu:

1. Kawasan Lereng Gunung Merapi, di mulai dari jalan yang menghubungkan Kota Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan (*rightbelt*) sampai dengan puncak Gunung Merapi. Wilayah ini kaya sumberdaya air dan potensi ekowisata yang berorientasi pada aktivitas Gunung Merapi dan ekosistemnya.

2. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, Kalasan, Berbah. Wilayah ini kaya akan tempat peninggalan purbakala (candi) sebagai pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.
3. Kawasan Tengah yaitu wilayah aglomerasi Perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini cepat berkembang, merupakan pusat pendidikan, industri, perdagangan, dan jasa.
4. Kawasan Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah dan penghasilan bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu, dan gerabah.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu dari kota Yogyakarta dan dapat dibedakan menjadi:

1. Wilayah aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, yang meliputi Kecamatan Depok, Gamping, serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik, Ngemplak, Kalasan, Berbah, Sleman, dan Mlati.
2. Wilayah sub-urban, meliputi kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik, yang terletak cukup jauh dari Kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
3. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan, yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

Karakteristik wilayah dan arah pengembangan wilayah di Kabupaten Sleman, khususnya pengembangan perumahan, dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Nama dan Luas Desa, Karakteristik Wilayah dan Arah Pengembangan Perumahan di Kabupaten Sleman

No.	Kecamatan (Luas)	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Karakteristik Wilayah/Kawasan	Arah Pengembangan Perumahan
1.	GAMPING (2.925 km ²)	1. Balecatur 2. <i>Ambarketawang</i> 3. Banyuraden 4. Nogotirto 5. Trihanggo	9,86 6,28 4,00 3,49 5,62	Perkotaan Perkotaan (Ibukota Kecamatan) Perkotaan Perkotaan Perkotaan	Perumahan Perumahan Perumahan Perumahan Perumahan
2.	GODEAN (2.684 km ²)	1. Sidorejo 2. Sidoluhur 3. Sidomulyo 4. <i>Sidoagung</i> 5. Sidokarto 6. Sidoarum 7. Sidomoyo	5,44 5,19 2,50 3,32 3,64 3,73 3,02	Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perkotaan Perdesaan	Perumahan
3.	MOYUDAN (2.762 km ²)	1. Sumberrahayu 2. Sumbersari 3. <i>Sumberagung</i> 4. Sumberarum	6,31 5,46 8,20 7,65	Perdesaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan	
4.	MINGGIR (2.727 km ²)	1. Sendangmulyo 2. Sendangarum 3. Sendangrejo 4. <i>Sendangsari</i> 5. Sendangagung	6,70 3,45 5,98 4,58 6,56	Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan	
5.	SEYEGAN (2.663 km ²)	1. Margoluwih 2. Margodadi 3. <i>Margomulyo</i> 3. Margoagung 5. Margokaton	5,00 6,11 5,19 5,18 5,15	Perdesaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perdesaan	
6.	MLATI (2.852 km ²)	1. Tirtoadi 2. Sumberadi 3. <i>Tlogoadi</i> 4. Sendangadi 5. Sinduadi	4,97 6,00 4,82 5,36 7,37	Perkotaan Perkotaan Perkotaan (Ibukota Kecamatan) Perkotaan Perkotaan	Perumahan Perumahan Perumahan Perumahan Perumahan
7.	DEPOK (3.555 km ²)	1. <i>Caturtunggal</i> 2. Maguwoharjo 3. Condongcatur	11,04 15,01 9,50	Perkotaan Perkotaan Perkotaan	Perumahan Perumahan Perumahan
8.	BERBAH (2.299 km ²)	1. Sendangtirto 2. <i>Tegaltirto</i> 3. Jogotirto 4. Kalitirto	5,22 5,73 5,84 6,20	Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perkotaan	Perumahan
9.	PRAMBANAN (4.135 km ²)	1. Sumberharjo 2. Wukirharjo 3. Gayamharjo 4. Sambirejo 5. Madurejo 6. <i>Bokoharjo</i>	9,17 4,75 6,55 8,39 7,09 5,40	Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan)	

No.	Kecamatan (Luas)	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Karakteristik Wilayah/Kawasan	Arah Pengembangan Perumahan
10.	KALASAN (3.584 km ²)	1. Purwomartani 2. <i>Tirtomartani</i> 3. Tamanmartani 4. Selomartani	12,05 7,54 7,30 8,95	Perkotaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perdesaan	Perumahan
11.	NGEMPLAK (3.571 km ²)	1. Wedomartani 2. Umbulmartani 3. <i>Widodomartani</i> 4. Bimomartani 5. Sindumartani	12,44 6,15 6,02 4,44 6,66	Perkotaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perdesaan	Perumahan
12.	NGAGLIK (3.825 km ²)	1. Sariharjo 2. Sinduharjo 3. Minomartani 4. Sukoharjo 5. <i>Sardonoharjo</i> 6. Donoharjo	6,89 6,09 1,53 8,03 9,38 6,60	Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan	Perumahan Perumahan
13.	SLEMAN (3.132 km ²)	1. <i>Caturharjo</i> 2. Triharjo 3. Tridadi 4. Pandowoharjo 5. Trimulyo	7,44 5,78 5,04 7,27 5,79	Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perkotaan (Ibukota Kabupaten) Perdesaan Perdesaan	Perumahan
14.	TEMPEL (3.249 km ²)	1. Banyurejo 2. Tambakrejo 3. Sumberrejo 4. Pondokrejo 5. Mororejo 6. Margorejo 7. <i>Lumbungrejo</i> 8. Merdikorejo	4,82 3,26 2,92 3,27 3,37 5,39 3,33 6,13	Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan	
15.	TURI (4.309 km ²)	1. Bangunkerto 2. <i>Donokerto</i> 3. Girikerto 4. Wonokerto	7,03 7,41 13,07 15,58	Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perdesaan	
16.	PAKEM (4.384 km ²)	1. Purwobinangun 2. Candibinangun 3. Harjobinangun 4. <i>Pakembinangun</i> 5. Hargobinangun	13,48 6,36 5,52 4,18 14,30	Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan	
17.	CANGKRINGAN (4.799 km ²)	1. Wukirsari 2. <i>Argomulyo</i> 3. Glagaharjo 4. Kepuharjo 5. Umbulharjo	14,56 8,47 7,95 8,75 8,26	Perdesaan Perdesaan (Ibukota Kecamatan) Perdesaan Perdesaan Perdesaan	

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 tentang Pengembangan Perumahan

BAB III

PROFIL KUANTITAS PENDUDUK

KABUPATEN SLEMAN

Penduduk adalah modal dasar pembangunan, juga merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk ideal sesuai dengan daya dukung lingkungan, laju pertumbuhan terkendali, diikuti dengan kualitas tinggi adalah modal bagi keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan dapat menjadi dasar bagi terkendalinya jumlah, laju pertumbuhan, dan kualitas penduduk. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Penduduk dari segi kuantitas atau jumlahnya dapat diuraikan menurut jumlah absolut dan relatifnya, sebaran atau distribusinya, dan berdasarkan karakter demografinya. Profil kuantitas penduduk Kabupaten Sleman akan menggambarkan lima hal pokok, yaitu : (1) Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi; (2) Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial; (3) Kondisi Keluarga; (4) Kelahiran dan Kematian.

Dua komponen pokok kependudukan yang penting dikaji adalah proses kependudukan dan struktur kependudukan. Proses kependudukan mencakup aspek kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Struktur kependudukan mencakup aspek komposisi antara lain komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Hasil dari dua komponen baik proses maupun struktur adalah dasar bagi proses pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Kabupaten Sleman dengan struktur penduduk seimbang, ditandai dengan TFR yang rendah, di bawah angka 2,1 akan mencapai momentum demografi berupa

kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan kondisi ekonomi optimal. Pada tahun 2019 berdasarkan angka kelahiran kasar dengan menggunakan Formula Bogue dihitung angka kelahiran total yang menggambarkan jumlah anak yang dimiliki seorang perempuan selama masa reproduksinya yaitu 15-49 tahun. Angka total fertilitas Kabupaten Sleman sudah sangat rendah dibawah 2,1. Inilah yang disebut dengan *demographic deviden* yaitu keuntungan optimal yang diperoleh dari kondisi struktur demografi yang telah stabil. Penduduk pada fase ini betul-betul menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Pertanyaan besar adalah kapan dan bagaimana mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang tersebut. Oleh karenanya, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapat perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Hal pokok yang perlu dikondisikan agar struktur penduduk tumbuh seimbang dapat terwujud adalah kepedulian semua pihak, baik unsur pemerintah, sektor swasta, maupun unsur masyarakat. Melalui kerja keras, terintegrasi, dan berkesinambungan sejalan dengan semangat otonomi daerah, implementasi prinsip “Pembangunan Berwawasan Kependudukan” secara konsisten dan berkelanjutan merupakan paradigma yang tidak dapat ditawar lagi. Lebih dari itu, dengan menggabungkan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, telah memberikan gambar bahwa aspek-aspek kependudukan beserta matranya dan lingkungan hidup, maka ke depan perlu digaungkan prinsip “Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkelanjutan”.

3.1 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Selain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk memegang peranan yang sangat vital dalam upaya untuk menciptakan stabilitas kehidupan dalam masyarakat suatu wilayah. Ukuran yang digunakan dalam komposisi penduduk antara lain struktur umur, umur median penduduk, rasio atau angka ketergantungan, dan rasio jenis kelamin. Ukuran-ukuran tersebut sering digunakan oleh para ahli demografi dan pemerhati masalah-masalah kependudukan sebagai alat evaluasi kebijakan program pembangunan, terutama di bidang kependudukan. Komposisi penduduk juga mencerminkan tingkat kemajuan suatu bangsa atau wilayah.

Komposisi penduduk melibatkan banyak aspek. Jadi bila akan menganalisis komposisi penduduk harus dilihat dari aspek mana penduduk itu akan dianalisis. Komposisi penduduk menurut struktur umur dan jenis kelamin merupakan komposisi penduduk yang paling pokok, sebab kedua kondisi ini sangat mempengaruhi perilaku demografi. Selain itu kedua ciri inipun mudah dikombinasikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, maupun geografis.

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi. Terkait dengan data kependudukan, karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Distribusi penduduk menurut umur tertentu sesuai pengelompokan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (*single age*) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Selain pengelompokan berdasarkan distribusi umur, terdapat juga pengelompokan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar (mengikuti ketetapan WHO), yaitu penduduk usia muda (0-14 tahun), penduduk usia produktif (15-59 tahun), dan penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas). Struktur penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk kelompok umur muda atau tua.

Indikator yang menunjukkan komposisi penduduk menurut karakteristik demografi adalah:

- Umur media (*median age*)
- Rasio jenis kelamin (*sex ratio*)
- Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*)

3.1.1 Jumlah Penduduk

Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki daya tarik bagi para pendatang. Salah satu potensi tersebut disebabkan oleh adanya perguruan tinggi ternama, seperti UGM, UNY, UPN, dan UIN Sunan Kalijaga; empat perguruan tinggi negeri kedinasan (STPN, AAU, MMTC, dan STTN-BATAN), serta 46 perguruan tinggi swasta, seperti UII, USD, dan UAJ. Berdasarkan data SIAK Tahun 2020 seperti dalam Tabel 3.1, jumlah penduduk Kabupaten Sleman sebanyak 1.082.754

jiwa, yang terdiri atas laki-laki sebesar 536.977 jiwa atau 49,59 persen dan perempuan sebesar 545.777 jiwa atau 50,40 persen.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					
		Laki-Laki	Persen	Perempuan	Persen	Jumlah	Persen
1	Gamping	46.793	8,71	47.119	8,63	93.912	8,67
2	Godean	34.840	6,49	35.062	6,42	69.902	6,46
3	Moyudan	16.644	3,10	16.840	3,09	33.484	3,09
4	Minggir	15.858	2,95	16.654	3,05	32.512	3,00
5	Seyegan	25.295	4,71	25.698	4,71	50.993	4,71
6	Mlati	46.268	8,62	46.633	8,54	92.901	8,58
7	Depok	61.159	11,39	62.530	11,46	123.689	11,42
8	Berbah	27.511	5,12	27.987	5,13	55.498	5,13
9	Prambanan	26.718	4,98	27.283	5,00	54.001	4,99
10	Kalasan	41.359	7,70	41.969	7,69	83.328	7,70
11	Ngemplak	31.188	5,81	31.676	5,80	62.864	5,81
12	Ngaglik	48.813	9,09	49.712	9,11	98.525	9,10
13	Sleman	34.688	6,46	35.367	6,48	70.055	6,47
14	Tempel	26.961	5,02	27.380	5,02	54.341	5,02
15	Turi	18.669	3,48	18.681	3,42	37.350	3,45
16	Pakem	18.570	3,46	19.188	3,52	37.758	3,49
17	Cangkringan	15.643	2,91	15.998	2,93	31.641	2,92
KABUPATEN SLEMAN		536.977	100	545.777	100	1.082.754	100

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020

Berdasarkan jumlah penduduk menurut wilayah di Kabupaten Sleman pada tahun 2020, diketahui jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Depok yang mencapai 123.689 jiwa (11,42 persen), terbesar kedua adalah Kecamatan Ngaglik sebanyak 98.525 jiwa (9,10 persen), serta terbesar ketiga adalah Kecamatan Gamping sebanyak 93.912 jiwa (8,67 persen) dan Kecamatan Mlati sebesar 92.901 jiwa. Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Cangkringan dengan jumlah penduduk mencapai 31.641 jiwa (2,92 persen).

Kondisi jumlah penduduk menurut wilayah dapat memberikan gambaran tingkat kemajuan suatu wilayah. Suatu daerah yang memiliki daya tarik, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan, menjadi tujuan bagi para penduduk untuk migrasi ke wilayah tersebut, baik penduduk dari kabupaten lain maupun luar provinsi. Empat kecamatan dengan penduduk terpadat di Sleman tersebut (Depok, Ngaglik, Gamping, dan Mlati) merupakan wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta sehingga tumbuh pesat menjadi pusat pertumbuhan, baik pendidikan, industri, perdagangan, maupun jasa. Kemudian Kecamatan Cangkringan yang memiliki jumlah penduduk terkecil merupakan wilayah yang mempunyai fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) bersama dengan Kecamatan Tempel, Turi, dan Pakem yang berada di lereng Gunung Merapi.

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman tersebut di atas belum termasuk penduduk musiman seperti mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di sejumlah perguruan tinggi yang ada di Sleman. Diperkirakan, banyaknya mahasiswa pada perguruan tinggi yang ada di DIY terdapat kurang lebih 300.000 orang, sebagian besar berlokasi di wilayah Sleman, akibatnya menambah total jumlah penduduk Kabupaten Sleman yang tentu saja akan berdampak pada meningkatnya kepadatan penduduk pada wilayah tertentu yang berimplikasi pada munculnya kebutuhan akan layanan publik dasar.

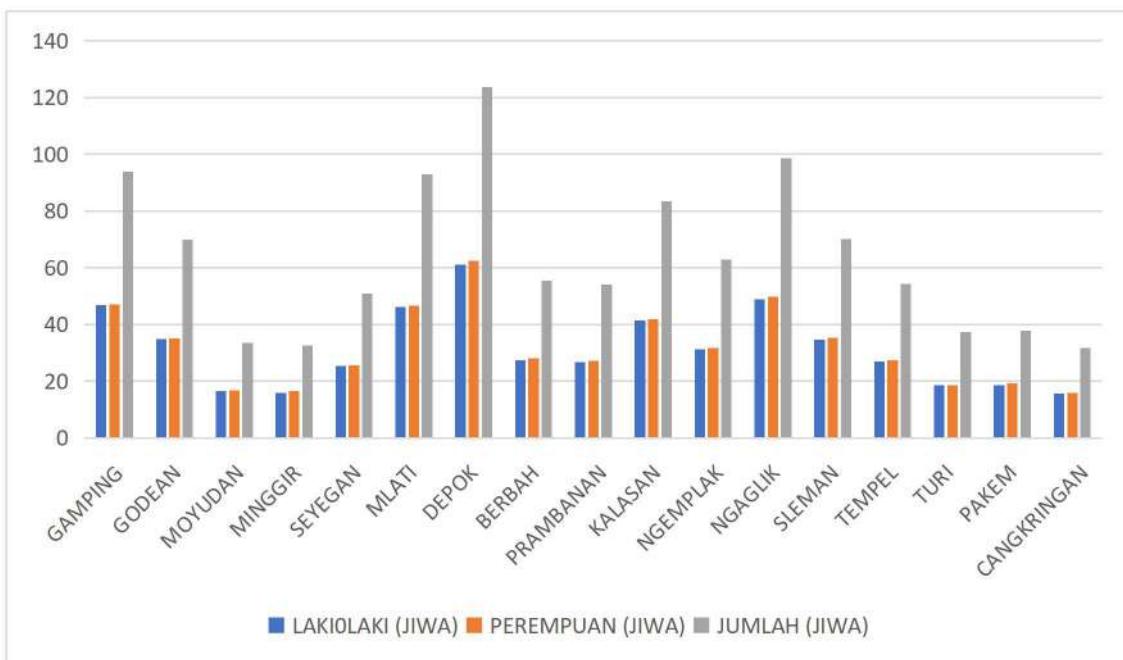
Dari data jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki dapat dikatakan hampir seimbang. Keseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan ini menuntut perlakuan yang sama kepada keduanya untuk mencapai target Indeks Pembangunan Gender.

3.1.2 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang besar dapat membawa keuntungan dan masalah yang rumit bagi suatu daerah. Keuntungan yang dapat diambil adalah apabila penduduk yang banyak tersebut mempunyai kualitas yang baik, sehingga dapat diandalkan menjadi pelaku pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar akan menjadi masalah, kalau penduduk tersebut mempunyai kualitas yang rendah dan penyebaran yang tidak merata sehingga menjadi beban pembangunan. Selain jumlah penduduk, komposisi

penduduk memegang peranan yang sangat penting dalam upaya untuk menciptakan stabilitas kehidupan dalam masyarakat suatu wilayah. Ukuran yang digunakan dalam komposisi penduduk antara lain struktur umur, rasio dan angka ketergantungan, dan rasio jenis kelamin. Ukuran-ukuran tersebut sering digunakan sebagai alat evaluasi kebijakan program pembangunan, terutama dibidang kependudukan. Komposisi penduduk juga mencerminkan tingkat kemajuan suatu bangsa atau wilayah. Sebagai contoh, suatu negara atau wilayah dikatakan maju bila struktur umur penduduknya sebagian besar pada usia produktif (15-64 tahun), atau bentuk piramida penduduknya cenderung pada kelompok umur 15-19 tahun sampai kelompok umur 60-64 tahun.

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020



Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Komposisi penduduk juga mencerminkan tingkat kemajuan suatu wilayah. Struktur umur penduduk dapat dikategorikan sebagai penduduk ‘muda’, yakni jika penduduk usia 0-14 tahun lebih dari 40 persen. Penduduk dikatakan penduduk ‘tua’ jika yang usia 65 tahun ke atas lebih dari 10 persen dan ‘antara muda dan tua (*intermediate*)’ jika penduduk usia 0-14 tahun kurang dari 40 persen dan penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 10 persen (Hobbs, 2004). Sebagai contoh, suatu wilayah dikatakan maju bila struktur umur penduduknya sebagian besar berada pada usia produktif (15-64 tahun) atau bentuk piramida penduduknya cenderung pada kelompok umur 15-19

tahun sampai kelompok umur 60-64 tahun. Tabel 3.2 menjelaskan secara rinci bahwa sebanyak 69,46 persen penduduk di Kabupaten Sleman tergolong dalam usia produktif. Usia produktif merupakan usia penduduk yang berada pada rentang usia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Pada umur tersebut merupakan usia prima bagi seseorang sehingga dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan dalam kondisi yang terbaik. Di Kabupaten Sleman berdasarkan Data SIAK 2020 diketahui jumlah penduduk dalam kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebanyak 752.076 jiwa (69,46 persen), penduduk usia muda (usia 0-14 tahun) sebanyak 229.915 jiwa (21,23 persen), dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) sebanyak 100.763 jiwa (9,30 persen).

Distribusi umur penduduk pada kenyataannya sering memberikan gambaran tentang riwayat mortalitas dan fertilitas serta rata-rata usia penduduk suatu wilayah. Di samping itu, juga merefleksikan beban ketergantungan sekelompok usia tertentu terhadap kelompok lainnya, dalam hal ini beban tanggungan usia muda atau anak-anak (usia 0-14 tahun), dan beban tanggungan usia tua atau usia lanjut (usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin penting diketahui, terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain itu, jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai dengan kelompok umur penduduk.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Kelompok Umur	JUMLAH PENDUDUK					
		Laki-Laki	Persen	Perempuan	Persen	Jumlah	Persen
1	0 - 4	34,395	6,41	32,358	5,93	66,753	6,17
2	5 - 9	40,738	7,59	38,908	7,13	79,646	7,36
3	10 - 14	42,885	7,99	40,631	7,44	83,516	7,71
4	15 - 19	40,31	7,51	37,998	6,96	78,308	7,23
5	20 - 24	39,384	7,33	37,456	6,86	76,84	7,10
6	25 - 29	38,076	7,09	38,103	6,98	76,179	7,04
7	30 - 34	35,715	6,65	36,903	6,76	72,618	6,71
8	35 - 39	42,126	7,85	42,942	7,87	85,068	7,86
9	40 - 44	43,184	8,04	43,283	7,93	86,467	7,99
10	45 - 49	39,952	7,44	40,88	7,49	80,832	7,47

11	50 – 54	37,741	7,03	39,532	7,24	77,273	7,14
12	55 – 59	30,034	5,59	33,103	6,07	63,137	5,83
13	60 – 64	26,305	4,90	29,049	5,32	55,354	5,11
14	65 – 69	18,623	3,47	19,567	3,59	38,19	3,53
15	70 – 74	10,939	2,04	13,769	2,52	24,708	2,28
16	75 – 79	8,54	1,59	9,814	1,80	18,354	1,70
17	80 – 81	2,484	0,46	3,324	0,61	5,808	0,54
18	≥ 82	5,546	1,03	8,157	1,49	13,703	1,27
KABUPATEN SLEMAN		536,977	100	545,777	100	1.082,754	100

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020

Pada Tabel 3.2, data SIAK 2020 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sleman untuk semua jenis kelamin terbanyak adalah pada kelompok umur 40-44 tahun, yaitu sebesar 86.467 jiwa atau 7,99 persen. Jumlah terbanyak kedua adalah kelompok umur 35-39 tahun, yaitu sebesar 85.068 jiwa atau 7,86 persen, dan ketiga terbanyak adalah kelompok umur 45-49 tahun sebanyak 80.832 jiwa atau 7,47 persen.

3.1.3 Umur Median (*Median Age*)

Umur median merupakan salah satu indikator kependudukan yang digunakan untuk mengukur struktur umur penduduk secara cepat, dan seringkali digunakan untuk membandingkan struktur umur penduduk di suatu wilayah apakah relatif lebih “tua” atau “muda”, dengan wilayah lain. Bila umur median disuatu wilayah kurang dari 20 tahun, maka penduduk diwilayah tersebut dikategorikan penduduk muda. Apabila umur mediannya diantara 20 hingga 30 tahun, maka penduduk wilayah tersebut dikategorikan penduduk intermediate, dan bila umur mediannya di atas 30 tahun, maka penduduk wilayah tersebut dikategorikan penduduk “tua”. Umur median adalah umur yang membagi jumlah penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama banyaknya, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.

Dari pengelompokan penduduk menurut umur dapat digambarkan perbedaan umur median antara Kecamatan di Kabupaten Sleman pada tahun 2020. Umur median penduduk Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 3.3 yang didasarkan pada Data SIAK tahun 2020. Data memperlihatkan bahwa umur median penduduk tercatat 35 tahun, yang berarti bahwa setengah dari penduduk Kabupaten Sleman berada di bawah 35 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 35 tahun. Umur median ini

terletak di antara 30-40 tahun sehingga penduduk Kabupaten Sleman dikategorikan sebagai penduduk tua. Pada masa mendatang isu tentang penduduk lanjut usia akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Sleman karena secara absolut maupun relatif jumlahnya akan semakin meningkat. Jika tidak diantisipasi dari saat ini dengan melahirkan kebijakan kependudukan, utamanya dalam hal penanganan terhadap penduduk lanjut usia, yang akan menjadi masalah di kemudian hari.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)			Kumulatif (fx)	Persen Kumulatif
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	0 – 4	34,395	32,358	66,753	66,753	6,17
2	4-9	40,738	38,908	79,646	146,399	13,52
3	10 – 14	42,885	40,631	83,516	229,915	21,23
4	15 – 19	40,31	37,998	78,308	308,223	28,47
5	20 – 24	39,384	37,456	76,84	385,063	35,56
6	25 – 29	38,076	38,103	76,179	461,242	42,60
7	30 – 34	35,715	36,903	72,618	533,860	49,31
8	35 – 39	42,126	42,942	85,068	618,928	57,16
9	40 – 44	43,184	43,283	86,467	705,395	65,15
10	45 – 49	39,952	40,88	80,832	786,227	72,61
11	50 – 54	37,741	39,532	77,273	863,500	79,75
12	55 – 59	30,034	33,103	63,137	926,637	85,58
13	60 – 64	26,305	29,049	55,354	981,991	90,69
14	65 – 69	18,623	19,567	38,190	1.020,181	94,22
15	70 – 74	10,939	13,769	24,708	1.044,889	96,50
16	75 – 79	8,54	9,814	18,354	1.063,243	98,20
17	80 – 81	2,484	3,324	5,808	1.069,051	98,73
18	≥ 82	5,546	8,157	13,703	1.082,754	100
KABUPATEN SLEMAN		536,977	545,777	1.082,754		

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Terkait dengan penduduk usia lanjut di Kabupaten Sleman, jumlahnya saat ini cukup besar dan menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data SIAK tahun 2020, proporsi jumlah penduduk lansia di Kabupaten Sleman mencapai 9,30 persen atau sebanyak 100.763 jiwa dari total penduduk Kabupaten Sleman yang mencapai 1.082.754 jiwa. Angka harapan hidup tertinggi di Indonesia tercatat berada di Kabupaten Sleman dengan umur mencapai 76 tahun. Menurut wilayah, diketahui jumlah lansia paling banyak ada di Kecamatan Depok yang mencapai 10.509 jiwa atau 10,43 persen dari total penduduk lansia. Berikutnya adalah Kecamatan

Ngaglik dengan jumlah lansia mencapai 8.343 jiwa atau 8,28 persen dan Kecamatan Kalasan sebanyak 7.035 jiwa atau 6,98 persen. Wilayah dengan jumlah lansia paling rendah adalah Kecamatan Cangkringan yang tercatat sebanyak 3.285 jiwa atau 3,26 persen dari total lansia. Keberadaan lansia perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar nantinya tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan. Warga lanjut usia perlu diberdayakan sesuai dengan kemampuannya. Salah satu gagasan yang diwacanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah pembentukan Rumah Bahagia Lansia. Di tempat itu para lansia bisa melakukan berbagai kegiatan yang bersifat pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan. Di Rumah Bahagia, lansia juga diajak aktif secara fisik melalui senam, dan kegiatan lain untuk mengasah mental. Sementara lansia yang telantar, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengupayakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa pemberian bantuan dalam bentuk makanan, uang, dan usaha ekonomi produktif. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Sleman, terdapat sekitar 6.900 lansia telantar tanpa sanak saudara.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Lansia (Usia >= 65 Tahun) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Kelompok Umur Penduduk Lansia														
	Umur 65 - 69 Tahun			Umur 70 - 74 Tahun			Umur 75 - 79 Tahun			Umur ≥ 80 Tahun			Jumlah Penduduk Lansia (jiwa)		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Gamping	1.643,00	1.675,00	3.318,00	849	989	1.838	558	658	1.216	582	789	1.371	3.632	4.111	7.743
Godean	1.327,00	1.371,00	2.698,00	721	909	1.630	645	642	1.287	592	761	1.353	3.285	3.683	6.968
Moyudan	695	848	1.543	548	659	1.207	442	464	906	411	541	952	2.096	2.512	14.711
Minggir	686	726	1.412	804	639	1.443	454	504	958	416	578	994	2.360	2.447	4.807
Seyegan	916	970	1.886	550	677	1.227	441	520	961	420	590	1.010	2.327	2.757	5.084
Mlati	1.572,00	1.577,00	3.149,00	841	1.022,00	1.863,00	632	754	1.386	602	853	1.455	3.647	4.206	9.891
Depok	2.066,00	2.300,00	4.366,00	1.115,00	1.380,00	2.495,00	853	1.010,00	1.863,00	730	1.055	1.785	4.764	5.745	10.509
Berbah	857	908	1.765	483	612	1.095	392	439	831	342	552	894	2.074	2.511	4.585
Prambanan	943	949	1.892	605	728	1.333	414	528	942	442	664	1.106	2.404	2.869	15.094
Kalasan	1.317,00	1.335,00	2.652,00	778	958	1.736	596	676	1.272	544	831	1.375	3.235	3.800	7.035
Ngemplak	1.060,00	1.115,00	2.175,00	609	793	1.402	444	577	1.021	484	729	1.213	2.597	3.214	5.811
Ngaglik	1.578,00	1.669,00	3.247,00	941	1.191,00	2.132,00	678	781	1.459	632	873	1.505	3.829	4.514	12.846
Sleman	1.171,00	1.278,00	2.449,00	677	860	1.537	571	587	1.158	437	658	1.095	2.856	3.383	6.239
Tempel	994	941	1.935	612	756	1.368	520	497	1.017	399	605	1.004	2.525	2.799	5.324
Turi	627	664	1.291	397	487	884	324	371	695	329	479	808	1.677	2.001	11.563
Pakem	634	650	1.284	401	594	995	314	442	756	337	520	857	1.686	2.206	3.892
Cangkringan	537	591	1.128	345	452	797	262	364	626	331	403	734	1.475	1.810	3.285
Kabupaten Sleman	18.623	19.567	38.190	11.276	13.706	24.982	8.540	9.814	18.354	8.030	11.481	19.511	46.469	54.568	135.387

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

3.1.4 Rasio Jenis Kelamin

Salah satu aspek dari komposisi penduduk adalah perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang biasanya disebut dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Rasio jenis kelamin merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. *Sex ratio* adalah angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Rasio jenis kelamin dengan angka lebih besar dari 100 berarti di daerah tersebut lebih banyak penduduk laki-laki, begitu pula sebaliknya, jika rasio jenis kelaminnya kurang dari 100 berarti penduduk perempuannya lebih banyak. Menurut kelompok umur, rasio jenis kelamin biasanya mempunyai pola tertentu, dimana pada umur sangat muda (bayi) rasio jenis kelamin biasanya berkisar sekitar 104-105. Kemudian turun pada umur remaja dan dewasa, dan terakhir turun lagi pada umur tua. Hal tersebut disebabkan tingkat kematian penduduk laki-laki yang lebih besar bila dibandingkan dengan tingkat kematian penduduk perempuan. Sebelum umur satu tahun tingkat kematian bayi laki-laki lebih besar dibandingkan dengan bayi perempuan, kemudian hampir seimbang dari umur satu tahun sampai dengan belasan tahun. Selanjutnya mulai dari umur 20 tahun keatas timbul lagi perbedaan tingkat kematian laki-laki yang semakin besar sesuai dengan meningkatnya umur. Pola rasio seperti itu berlaku pada penduduk yang pengaruh perpindahan penduduknya tidak terlalu besar serta tidak ada kesalahan dalam pelaporan umur.

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020

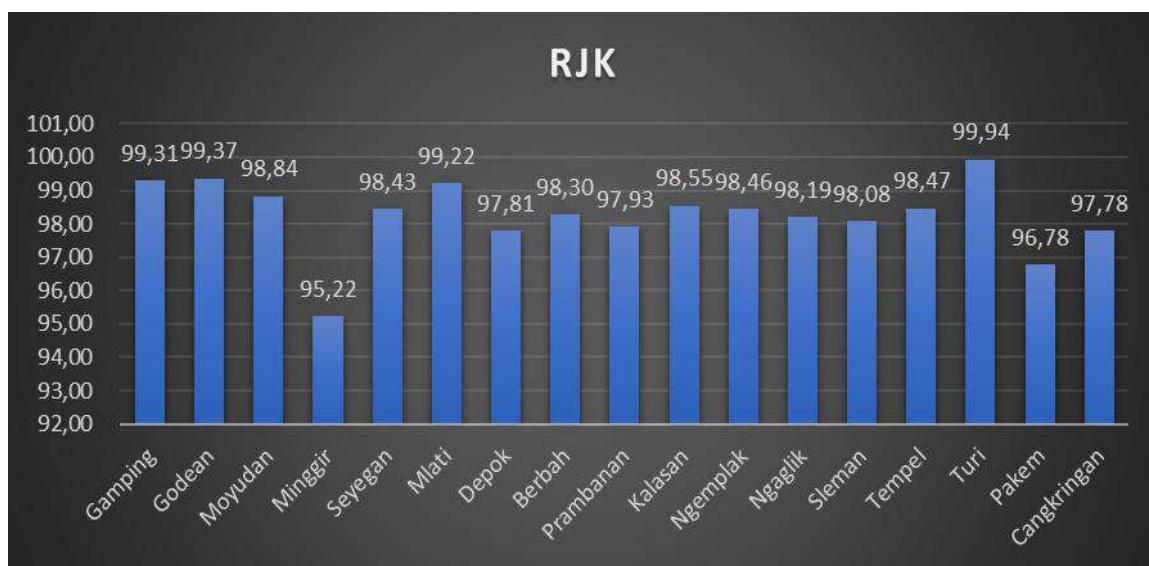
No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin (RJK)
1	0 – 4	34,395	32,358	66,753	1,06
2	5 – 9	40,738	38,908	79,646	1,05
3	10 – 14	42,885	40,631	83,516	1,06
4	15 – 19	40,310	37,998	78,308	1,06
5	20 – 24	39,384	37,456	76,84	1,05
6	25 – 29	38,076	38,103	76,179	1,00
7	30 – 34	35,715	36,903	72,618	0,97
8	35 – 39	42,126	42,942	85,068	0,98

9	40 – 44	43,184	43,283	86,467	1,00
10	45 – 49	39,952	40,880	80,832	0,98
11	50 – 54	37,741	39,532	77,273	0,95
12	55 – 59	30,034	33,103	63,137	0,91
13	60 – 64	26,305	29,049	55,354	0,91
14	65 – 69	18,623	19,567	38,19	0,95
15	70 – 74	10,939	13,769	24,708	0,79
16	75 – 79	8,540	9,814	18,354	0,87
17	80 – 81	2,484	3,324	5,808	0,75
18	≥ 82	5,546	8,157	13,703	0,68
KABUPATEN SLEMAN		536,977	545,777	1.082,754	0,98

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Dari Tabel 3.5 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Sleman berdasarkan data SIAK tahun 2020 secara total diketahui sejumlah 1.082.754 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki mencapai 536.977 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 545.777 jiwa. Angka *sex ratio* diketahui 98 persen yang berarti disetiap 100 orang penduduk perempuan akan terdapat 98 orang penduduk laki-laki. Kondisi ini berlangsung sejak tahun 2018.

Jika diamati menurut kelompok umur diketahui antara 0-29 tahun memiliki angka rasio jenis kelamin diatas 100, sedangkan kelompok umur 30 tahun keatas nilainya dibawah 100. Nilai terendah ada pada kelompok umur diatas 82 tahun, semakin ke atas kelompok umurnya angkanya semakin naik kecuali pada kisaran umur 65-69 tahun angkanya 95 sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok umur 60-64 dengan angka 91.



Gambar 3.2 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

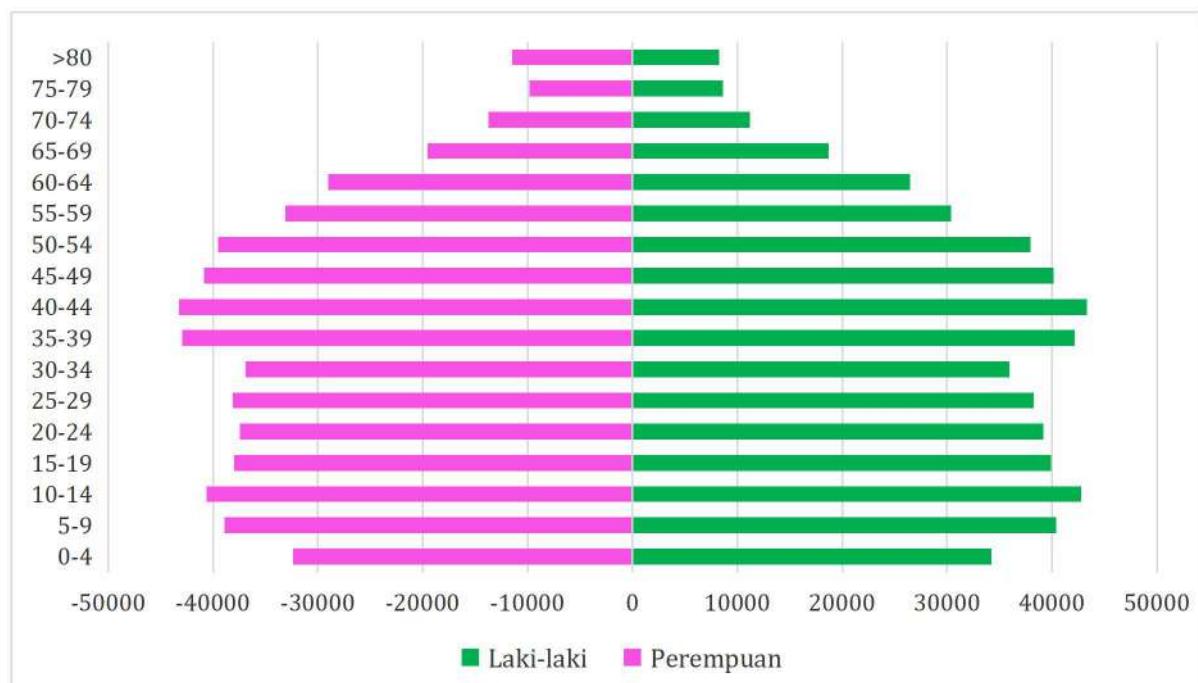
Jika dilihat rasio jenis kelamin berdasarkan wilayah (kecamatan) seperti terlihat pada Gambar 3.2 dapat diketahui bahwa kecamatan dengan rasio jenis kelamin paling tinggi pada tahun 2020 adalah Kecamatan Turi yakni mencapai 99,94 persen. Berikutnya adalah Kecamatan Godean dan Mlati yang mencapai 99,37 persen dan 99,22 persen. Sementara wilayah dengan rasio jenis kelamin paling rendah adalah Kecamatan Minggir mencapai 95,22 persen. Pada tahun ini semua kecamatan mempunyai angka dibawah 100 untuk rasio jenis kelamin, sama seperti tahun 2019.

3.1.5 Piramida Penduduk

Distribusi umur penduduk pada kenyataannya sering memberikan gambaran tentang riwayat mortalitas dan fertilitas serta rata-rata usia penduduk suatu wilayah. Di samping itu, juga merefleksikan beban ketergantungan sekelompok usia tertentu terhadap kelompok lainnya, dalam hal ini beban tanggungan usia muda atau anak-anak (usia 0-14 tahun), dan beban tanggungan tua atau usia lanjut (usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin penting diketahui, terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain itu, jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, sandang pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai dengan kelompok umur penduduk.

Untuk lebih menggambarkan dengan jelas komposisi penduduk Kabupaten Sleman menurut struktur umur dan jenis kelamin adalah dengan piramida penduduk. Piramida penduduk menunjukkan dengan jelas distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Selain itu piramida penduduk juga dapat menunjukkan tingkat perkembangan penduduk untuk setiap kelompok umur yang berbeda. Fluktuasi dalam piramida penduduk paling banyak dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dari setiap kelompok umur selain tingkat kematian dan perpindahan. Piramida penduduk biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan suatu negara atau wilayah. Dengan melihat piramida penduduk, dapat diketahui struktur penduduk suatu wilayah apakah termasuk dalam struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Dalam menyusun berbagai macam kebijakan bidang kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi, struktur

penduduk tersebut menjadi salah satu dasarnya. Pada suatu negara berkembang misalnya, biasanya bentuk piramida penduduknya berbentuk kerucut. Dimana fertilitas dan mortalitasnya tinggi, sehingga proporsi penduduk usia 0-4 tahun sangat tinggi, kemudian secara kontinyu mengecil pada kelompok umur di atasnya. Sebaliknya yang terjadi pada negara-negara maju yang tingkat kesejahteraan penduduknya lebih baik, memiliki bentuk piramida hampir menyerupai bentuk tabung atau mulai mengecil pada kelompok umur muda sampai 0-4 tahun. Bentuk ini berarti angka fertilitas dan mortalitasnya sangat kecil, sedangkan penduduk usia kerjanya besar. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduknya sangat baik, karena beban ketergantungan penduduknya sangat kecil.



Gambar 3.3 Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Gambaran struktur penduduk di Kabupaten Sleman juga dapat dilihat melalui piramida penduduk yaitu Gambar 3.3 yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Bentuk piramida penduduk Kabupaten Sleman adalah piramida penduduk muda (ekspansif), didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif serta anak-anak (kelompok umur 5-19 serta kelompok umur 30-49). Bentuk piramida ekspansif dapat diartikan bahwa terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga terdapat banyak penduduk yang berumur muda, Namun Terdapat kecenderungan angka kelahiran di Kabupaten Sleman mulai menurun

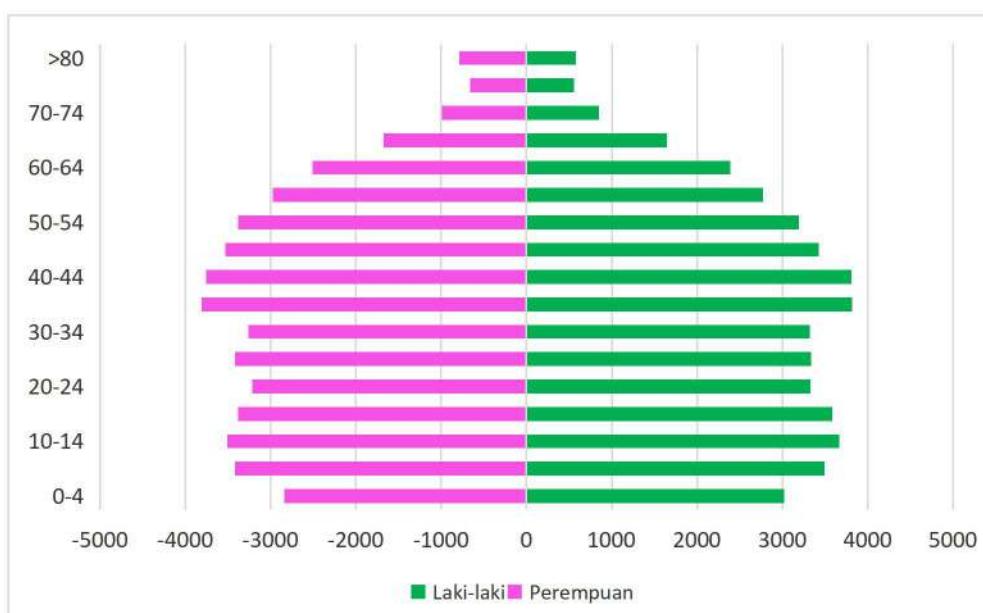
terlihat dari jumlah penduduk kelompok umur 0-4 lebih rendah daripada kelompok umur muda di atasnya.

Kondisi banyaknya penduduk muda ini sering juga dikaitkan dengan fenomena bonus demografi, yang mana bonus demografi itu terjadi saat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 50 persen dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2025-2035 (BKKBN, 2014), sementara itu Kabupaten Sleman saat ini sudah berada pada kondisi tersebut karena jumlah penduduk usia produktif sudah berkisar di angka lebih dari 50 persen dari total populasi. Kondisi ini tentu perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh. Berdasarkan data tahun 2020, penduduk Kabupaten Sleman didominasi oleh kelompok umur 35-49 tahun, kelompok produktif yang pada umumnya merupakan keluarga muda yang memiliki anak usia sekolah. Terlihat pula bahwa besaran jumlah penduduk terjadi pada usia 5-19 tahun, yaitu penduduk berusia sekolah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan sejak usia dini perlu mendapatkan perhatian lebih besar sehingga diharapkan menjadi tulang punggung pelaksana pembangunan yang berkualitas di masa-masa yang akan datang. Selain itu, terdapat potensi peningkatan jumlah penduduk usia lansia pada 5-10 tahun mendatang, yang menjadi beban bagi penduduk usia produktif.

Permasalahan pada masa mendatang di Kabupaten Sleman adalah semakin banyaknya jumlah penduduk lanjut usia. Hal ini harus diantisipasi pemerintah melalui berbagai kebijakan terkait dengan penduduk lanjut usia. Meskipun penduduk Kabupaten Sleman saat ini didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun. Proporsi penduduk usia produktif di Kabupaten Sleman tahun 2020 mencapai 69,46 persen atau 752.076 jiwa. Sedangkan penduduk termasuk dalam kategori lanjut usia (65 tahun keatas) mencapai 100.763 jiwa atau 9,30 persen dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif jumlahnya sangat besar sehingga Kabupaten Sleman memiliki potensi yang besar dalam pemanfaatannya.

3.1.5.1 Piramida Penduduk Kecamatan Gamping

Penduduk Kecamatan Gamping tahun 2020 mencapai 93.778 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 66.214 jiwa atau 70,61 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 27.564 jiwa atau 29,39 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Gamping mengalami penurunan.



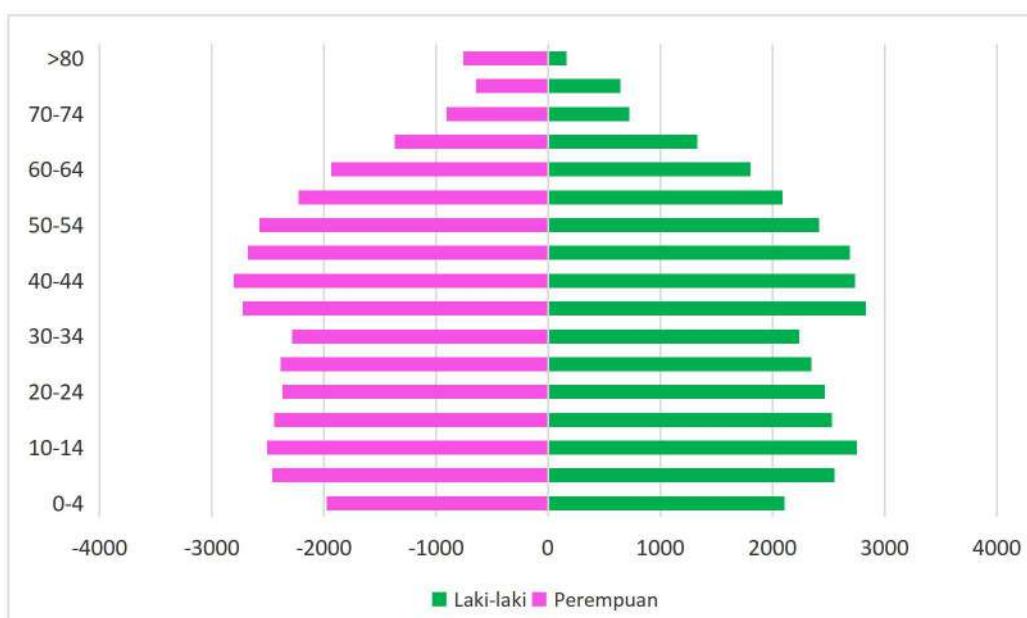
Gambar 3.4 Piramida Penduduk Kecamatan Gamping Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Gamping (Gambar 3.4) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Gamping didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 7.625 jiwa (8,13 persen). Dibawahnya adalah kelompok umur 40-44 tahun yang mencapai 7.567 (8,07 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Gamping mencapai 7.609 jiwa atau 8,11 persen, lebih rendah daripada angka Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.2 Piramida Penduduk Kecamatan Godean

Penduduk Kecamatan Godean tahun 2020 mencapai 73.960 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 48.579 jiwa atau 65,68 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 25.381 jiwa atau 34,32 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Godean mengalami penurunan.



Gambar 3.5 Piramida Penduduk Kecamatan Godean Tahun 2020

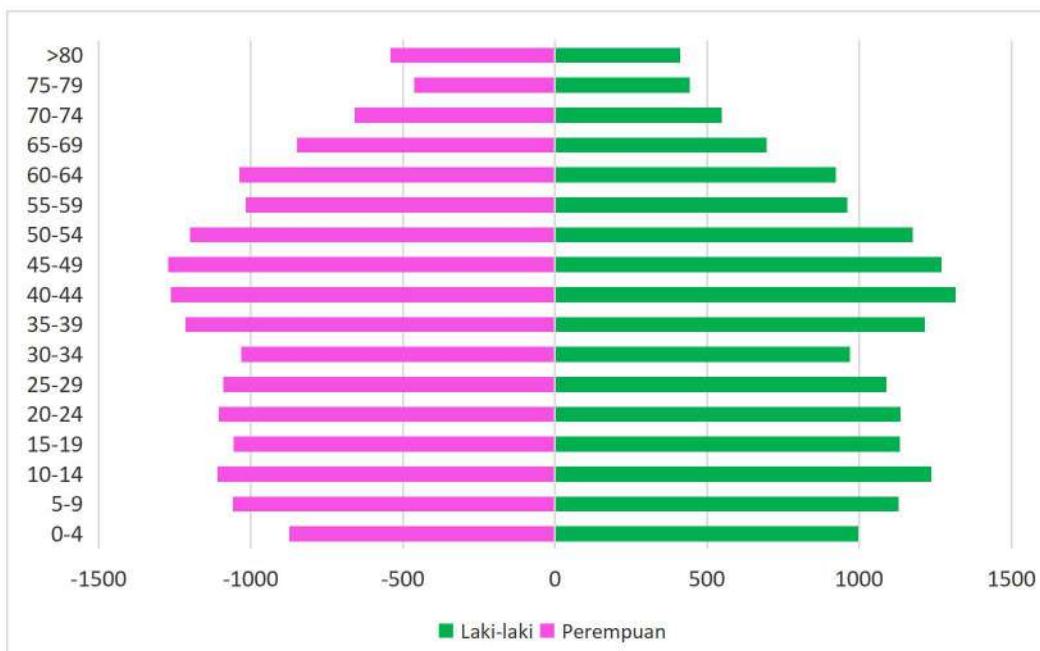
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Godean (Gambar 3.5) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Godean didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 5.634 jiwa (8,05 persen). Selanjutnya adalah kelompok umur 40-44 tahun mencapai 5.485 (7,84 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Godean mencapai 11.026 jiwa atau 14,91 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.3 Piramida Penduduk Kecamatan Moyudan

Penduduk Kecamatan Moyudan tahun 2020 mencapai 33.484 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya

mencapai 22.475 jiwa atau 67,12 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 11.009 jiwa atau 32,88 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Moyudan mengalami penurunan.



Gambar 3.6 Piramida Penduduk Kecamatan Moyudan Tahun 2020

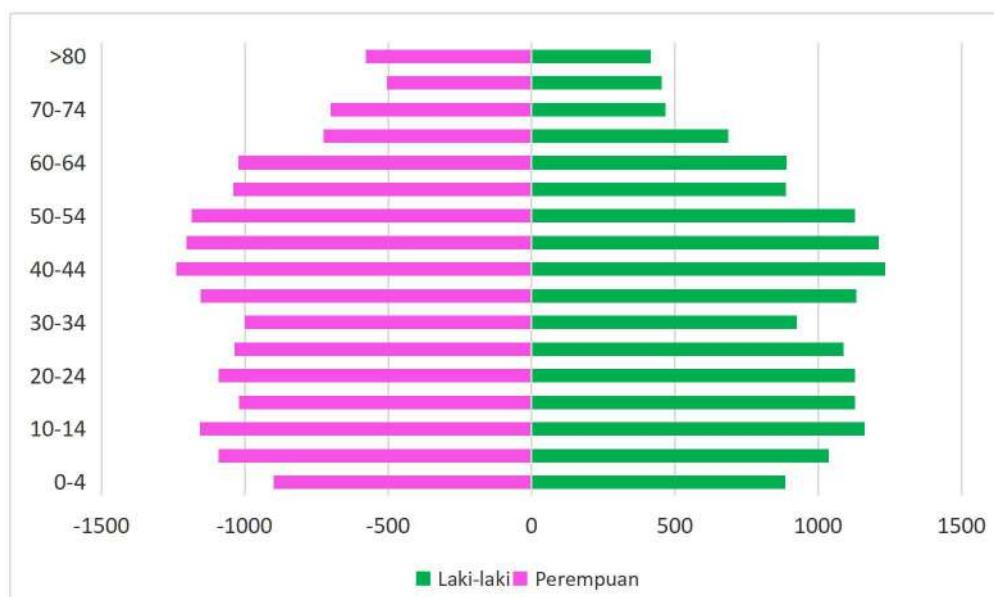
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Moyudan (Gambar 3.6) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Moyudan didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 2.580 jiwa (7,70 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 45-49 tahun sejumlah 2.541 (7,59 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Moyudan mencapai 4.608 jiwa atau 13,76 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.4 Piramida Penduduk Kecamatan Minggir

Penduduk Kecamatan Minggir tahun 2020 mencapai 32.512 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya

mencapai 21.747 jiwa atau 66,89 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 10.765 jiwa atau 33,11 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Minggir mengalami penurunan.



Gambar 3.7 Piramida Penduduk Kecamatan Minggir Tahun 2020

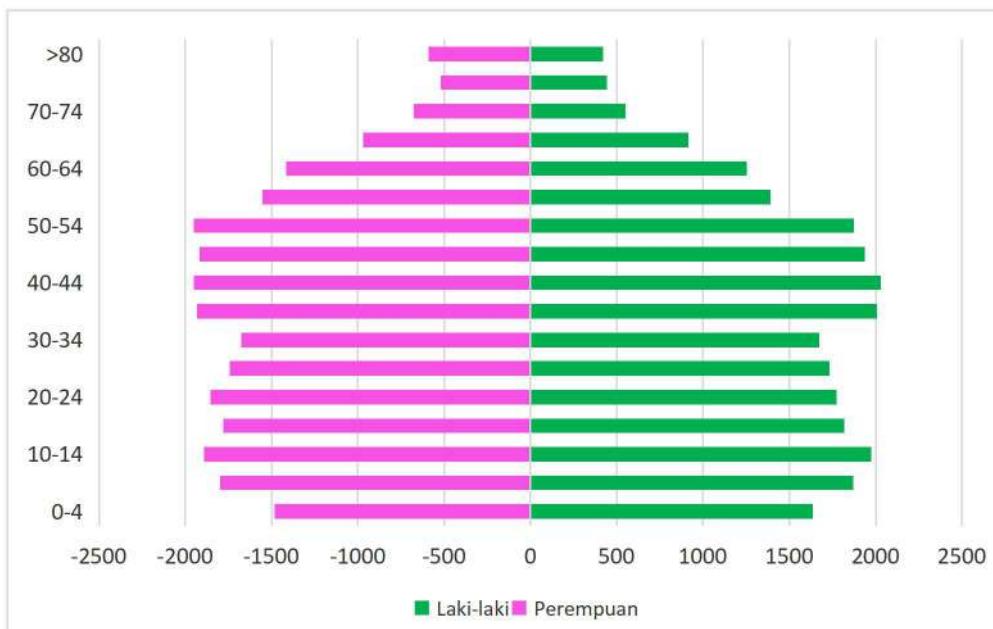
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Minggir (Gambar 3.7) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Minggir didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 2.472 jiwa (7,60 persen). Selanjutnya adalah kelompok usia 45-49 tahun sejumlah 2.415 (7,43 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Minggir mencapai 4.533 jiwa atau 13,94 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.5 Piramida Penduduk Kecamatan Seyegan

Penduduk Kecamatan Seyegan tahun 2020 mencapai 50.993 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 35.258 jiwa atau 69,14 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas

mencapai jumlah 15.735 jiwa atau 30,86 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Seyegan mengalami penurunan.



Gambar 3.8 Piramida Penduduk Kecamatan Seyegan Tahun 2020

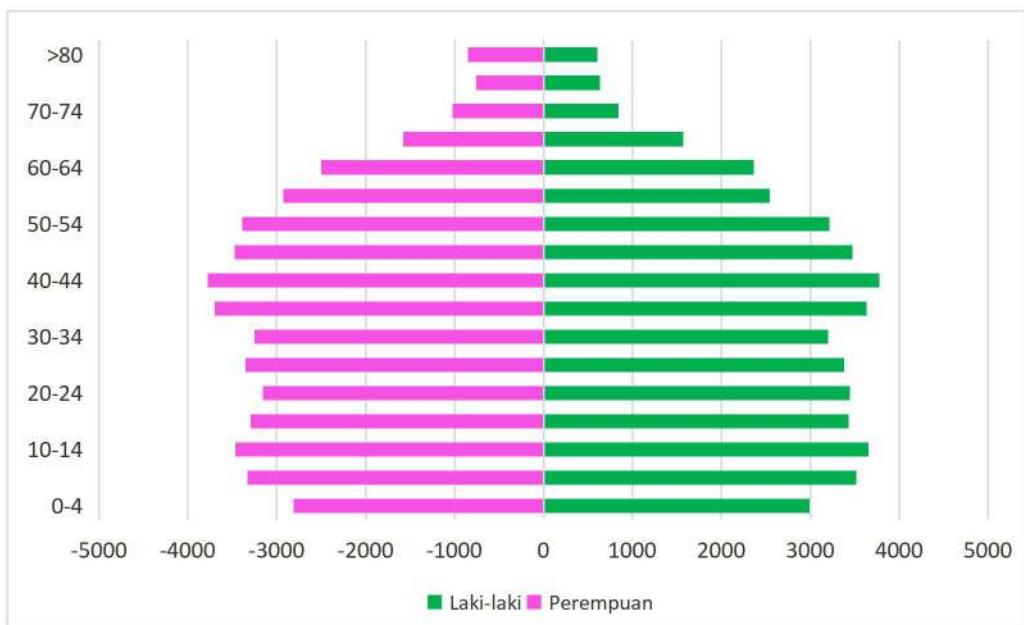
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Seyegan (Gambar 3.8) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Seyegan didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 3.980 jiwa (7,80 persen). Selanjutnya kelompok usia 35-39 sejumlah 3.940 (7,73 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Seyegan mencapai 5.084 jiwa atau 9,97 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.6 Piramida Penduduk Kecamatan Mlati

Penduduk Kecamatan Mlati tahun 2020 mencapai 92.901 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 65.282 jiwa atau 70,27 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 27.619 jiwa atau 29,73 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9

tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Mlati mengalami penurunan.



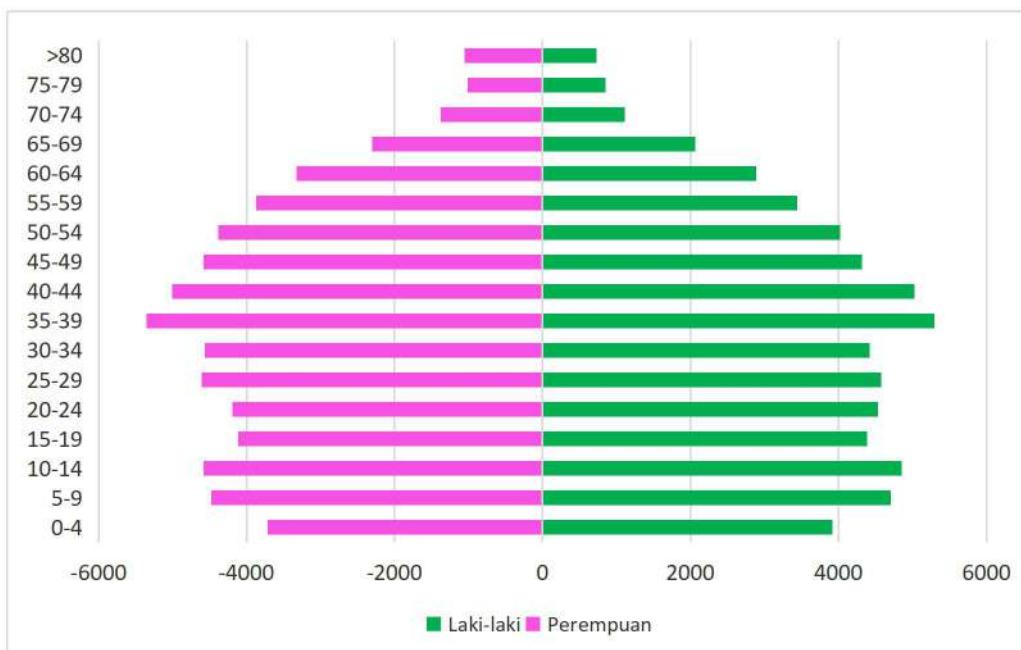
Gambar 3.9 Piramida Penduduk Kecamatan Mlati Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Mlati (Gambar 3.9) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Mlati didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 7.553 jiwa (8,13 persen). Selanjutnya kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 7.332 jiwa (7,89 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Mlati mencapai 7.853 jiwa atau 8,45 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.7 Piramida Penduduk Kecamatan Depok

Penduduk Kecamatan Depok tahun 2020 mencapai 123.689 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 86.917 jiwa atau 70,27 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 36.772 jiwa atau 29,73 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Depok mengalami penurunan.



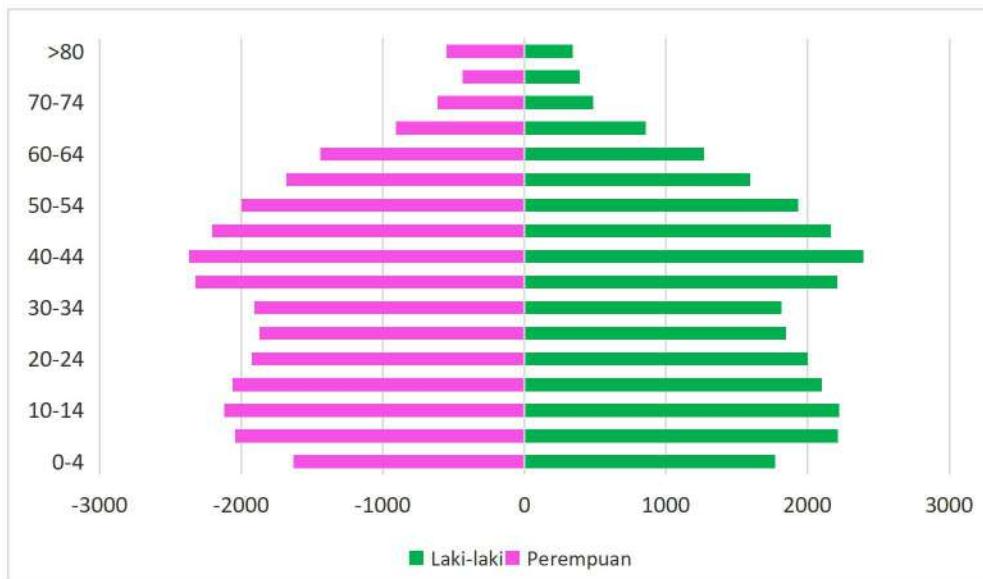
Gambar 3.10 Piramida Penduduk Kecamatan 3.10 Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Depok (Gambar 3.10) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Depok didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 10.646 jiwa (8,61 persen). Selanjutnya penduduk usia 40-44 tahun sejumlah 10.036 jiwa (8,11 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Depok mencapai 10.509 jiwa atau 98,49 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.8 Piramida Penduduk Kecamatan Berbah

Penduduk Kecamatan Berbah tahun 2020 mencapai 55.690 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 39.107 jiwa atau 70,22 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 16.583 jiwa atau 29,78 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Berbah mengalami penurunan.



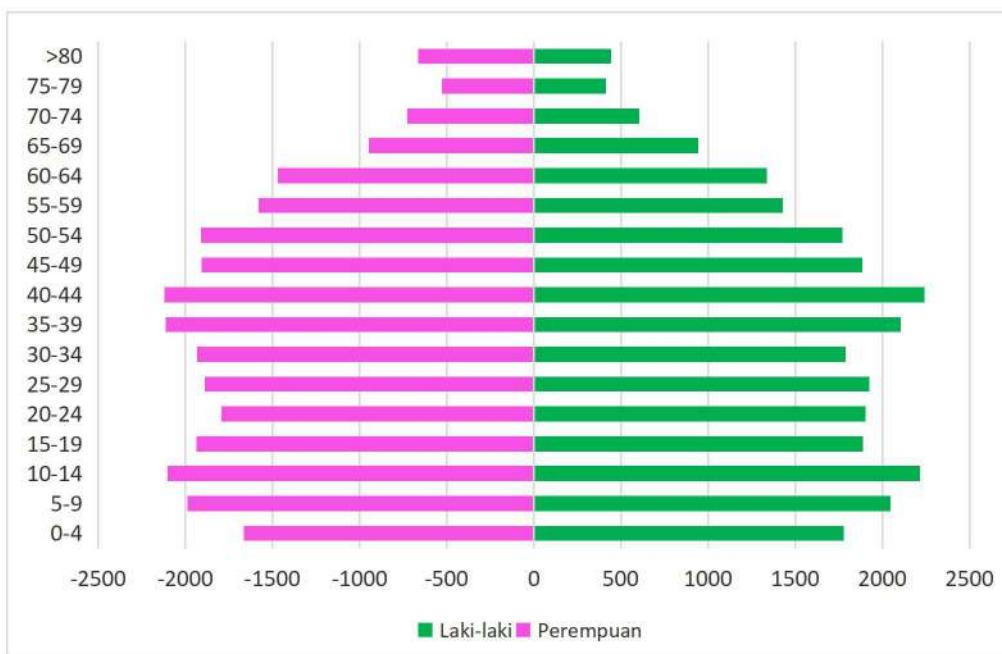
Gambar 3.11 Piramida Penduduk Kecamatan Berbah Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Berbah (Gambar 3.11) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Berbah didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 4.765 jiwa (8,56 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 35-39 tahun sejumlah 4.535 jiwa (8,14 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Berbah mencapai 4.585 jiwa atau 8,23 persen), lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.9 Piramida Penduduk Kecamatan Prambanan

Penduduk Kecamatan Prambanan tahun 2020 mencapai 54.001 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 36.927 jiwa atau 68,38 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 17.074 jiwa atau 31,62 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Prambanan mengalami penurunan.



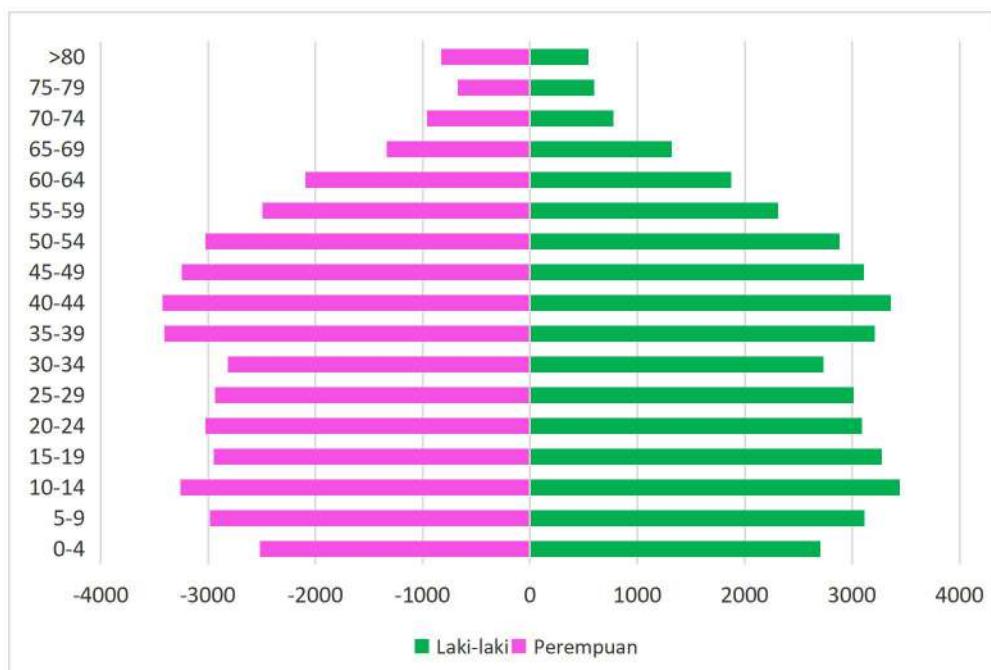
Gambar 3.12 Piramida Penduduk Kecamatan Prambanan Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Prambanan (Gambar 3.12) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Prambanan didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 4.363 jiwa (8,08 persen). Selanjutnya penduduk kelompok umur 35-39 tahun mencapai 4.220 (7,81 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Prambanan mencapai 5.273 jiwa atau 9,76 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.10 Piramida Penduduk Kecamatan Kalasan

Penduduk Kecamatan Kalasan tahun 2020 mencapai 83.328 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 58.277 jiwa atau 69,94 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 25.051 jiwa atau 30,06 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Kalasan mengalami penurunan.



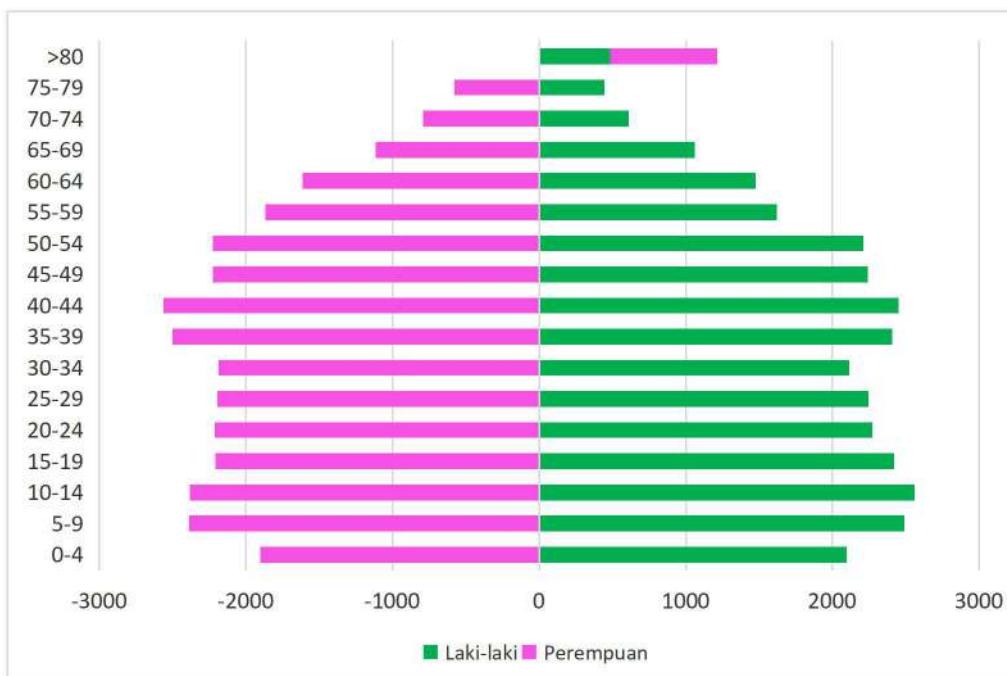
Gambar 3.13 Piramida Penduduk Kecamatan Kalasan Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Kalasan (Gambar 3.13) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Kalasan didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 6.786 jiwa (8,14 persen). Selanjutnya kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 6.616 (7,94 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Kalasan mencapai 7.035 jiwa atau 8,44 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.11 Piramida Penduduk Kecamatan Ngemplak

Penduduk Kecamatan Ngemplak tahun 2020 mencapai 62.864 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 423.238 jiwa atau 68,78 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 19.626 jiwa atau 31,22 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Ngemplak mengalami penurunan.



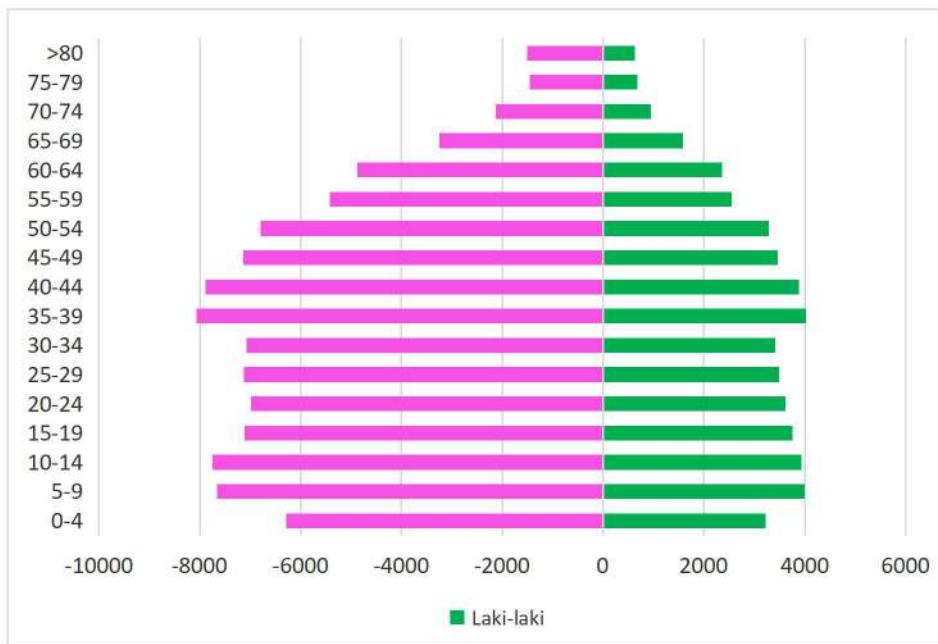
Gambar 3.14 Piramida Penduduk Kecamatan Ngemplak Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Ngemplak (Gambar 3.14) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Ngemplak didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 5.011 jiwa (7,97 persen). Selanjutnya kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 4.907 jiwa (7,80 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Ngemplak mencapai 5.811 jiwa atau 9,24 persen, lebih rendah dibandingkan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.12 Piramida Penduduk Kecamatan Ngaglik

Penduduk Kecamatan Ngaglik tahun 2020 mencapai 98.525 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 68.488 jiwa atau 69,51 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 30.037 jiwa atau 31,49 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Ngaglik mengalami penurunan.



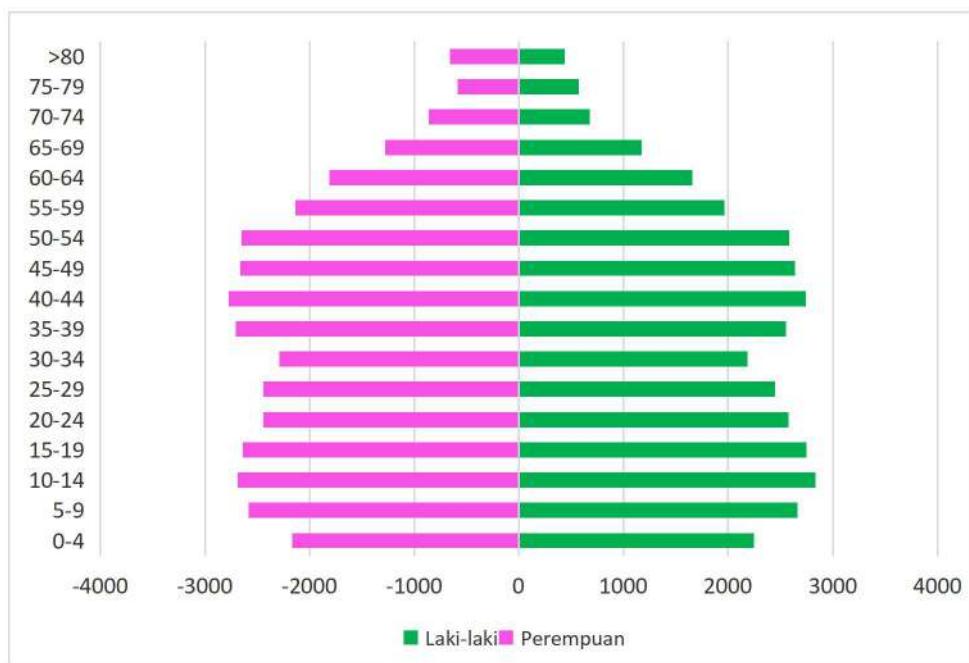
Gambar 3.15 Piramida Penduduk Kecamatan Ngaglik Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Ngaglik (Gambar 3.15) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Ngaglik didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 35-39 tahun yang mencapai 8.069 jiwa (8,19 persen). Selanjutnya kelompok usia 40-44 tahun sejumlah 7.894 jiwa (8,01 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Ngaglik mencapai 8.343 jiwa atau 8,46 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.13 Piramida Penduduk Kecamatan Sleman

Penduduk Kecamatan Sleman tahun 2020 mencapai 70.055 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 48.643 jiwa atau 69,43 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 21.412 jiwa atau 30,56 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Sleman mengalami penurunan.



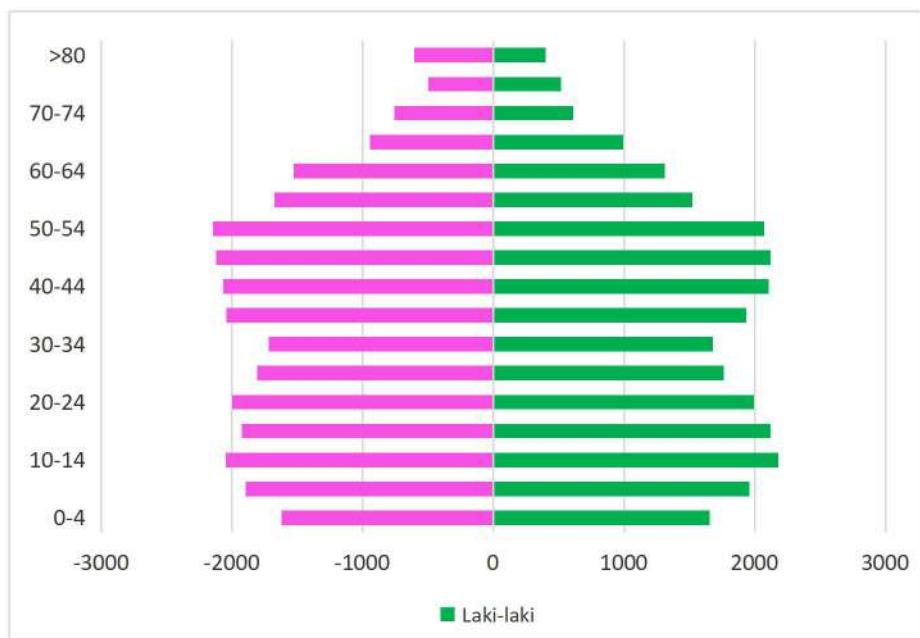
Gambar 3.16 Piramida Penduduk Kecamatan Sleman Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Sleman (Gambar 3.16) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Sleman didominasi oleh penduduk usia 10-14 sejumlah 5.523 (7,88 persen). Selanjutnya didominasi usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 sejumlah 5.516 (7,87 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Sleman mencapai 6.239 jiwa atau 8,90 persen, angkanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.14 Piramida Penduduk Kecamatan Tempel

Penduduk Kecamatan Tempel tahun 2020 mencapai 54.341 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 37.658 jiwa atau 69,29 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 16.683 jiwa atau 30,70 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Tempel mengalami penurunan.



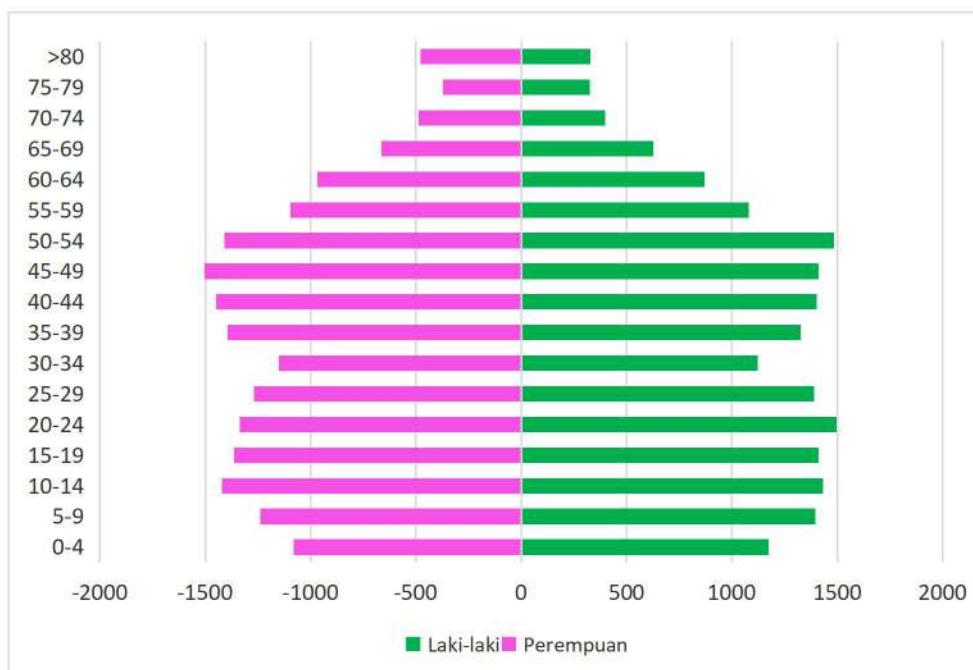
Gambar 3.17 Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Tempel (Gambar 3.17) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Tempel didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 4.243 jiwa (7,81 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 50-54 tahun mencapai 4.220 jiwa (7,76 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Tempel mencapai 5.324 jiwa atau 9,79 persen, angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.15 Piramida Penduduk Kecamatan Turi

Penduduk Kecamatan Turi tahun 2020 mencapai 37.274 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 25.527 jiwa atau 68,48 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 11.747 jiwa atau 31,52 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Turi mengalami penurunan.



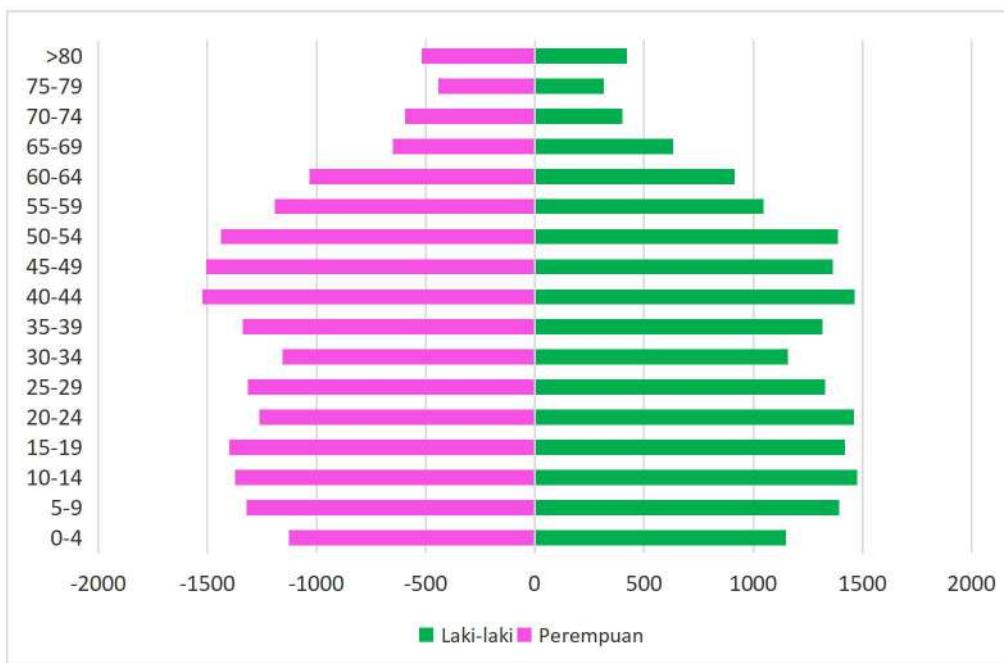
Gambar 3.18 Piramida Penduduk Kecamatan Turi Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Turi (Gambar 3.18) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Turi didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 45-49 yang mencapai 2.916 (7,81 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 50-54 tahun yang mencapai 2.894 jiwa (7,75 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Turi mencapai 3.678 jiwa atau 9,85 persen, angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.16 Piramida Penduduk Kecamatan Pakem

Penduduk Kecamatan Pakem tahun 2020 mencapai 37.588 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 26.030 jiwa atau 68,94 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 11.728 jiwa atau 31,06 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Pakem mengalami penurunan.



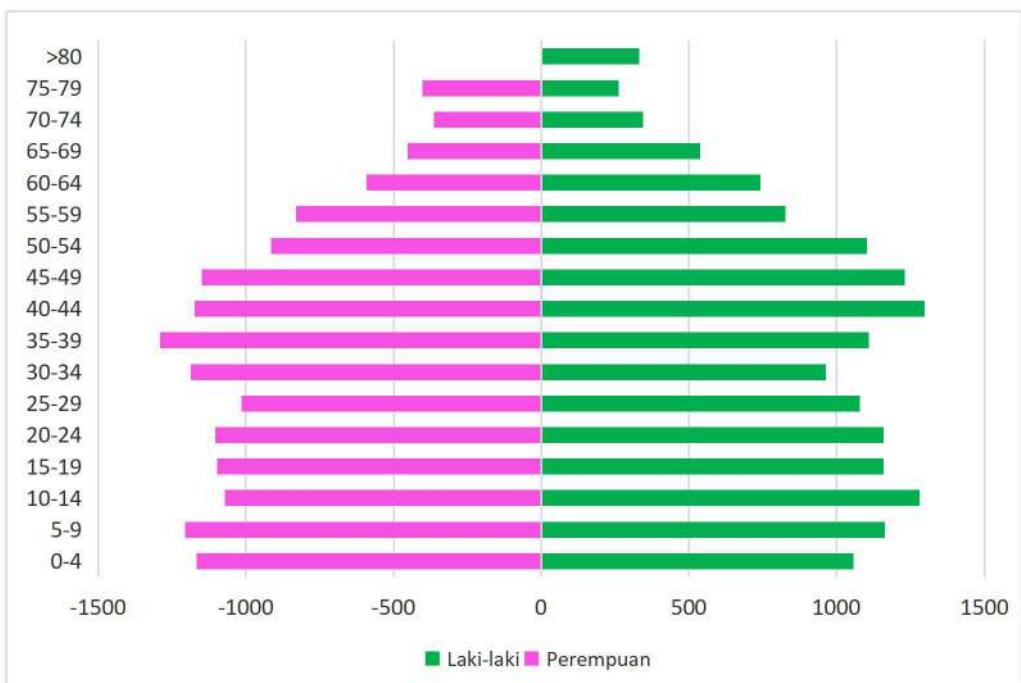
Gambar 3.19 Piramida Penduduk Kecamatan Pakem Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Pakem (Gambar 3.19) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Pakem didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 2.987 jiwa (7,91 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 45-49 tahun mencapai 2.870 jiwa (7,60 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Pakem mencapai 3.892 jiwa atau 10,31 persen, angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.5.17 Piramida Penduduk Kecamatan Cangkringan

Penduduk Kecamatan Cangkringan tahun 2020 mencapai 31.641 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 21.498 jiwa atau 67,94 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 10.143 jiwa atau 32,06 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kecamatan Cangkringan mengalami penurunan.



Gambar 3.20 Piramida Penduduk Kecamatan Cangkringan Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Piramida Kecamatan Cangkringan (Gambar 3.20) dibawah ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Cangkringan didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 2.588 jiwa (8,18 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 10-14 tahun mencapai 2.486 (7,86 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kecamatan Cangkringan mencapai 3.285 jiwa atau 10,38 persen, angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 9,93 persen.

3.1.6 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Angka rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator kependudukan lainnya yang menunjukkan terjadinya perubahan struktur penduduk menurut umur. Perubahan dimaksud adalah terjadinya pergeseran angka rasio antara penduduk yang non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun). Secara fungsional, indikator ini dari tahun ke tahun cenderung semakin kecil sebagai akibat turunnya jumlah penduduk usia muda dan naiknya jumlah penduduk usia produktif.

Rasio ketergantungan sangat penting karena mencerminkan jumlah orang yang secara ekonomi tidak aktif per seratus penduduk yang aktif secara ekonomi. Jika

informasi mengenai aktivitas ekonomi dari setiap individu tidak tersedia, biasanya digunakan rasio antara penduduk kelompok umur 0-14 dan 65 tahun ke atas terhadap penduduk kelompok umur 15-64 tahun. Rasio ketergantungan secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan terhadap usia 65 tahun ke atas.

Tingginya rasio ketergantungan akan menyita lebih banyak pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja. Keluarga-keluarga yang mempunyai jumlah anak banyak cenderung tidak mampu untuk menabung, akibatnya tingkat penanaman modal akan rendah. Penduduk dengan beban tanggungan anak yang tinggi harus membagi dana investasi yang besar untuk penggunaan yang kurang produktif secara segera, misalnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan dan non makanan dan bukan untuk investasi. Lebih jauh lagi, angka beban tanggungan yang besar, akan memaksa pemerintah untuk lebih memprioritaskan penyediaan fasilitas sosial yang cukup besar daripada memperhatikan kualitasnya.

**Tabel 3.6 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sleman Menurut Kecamatan
Tahun 2020**

Kecamatan	Rasio Ketergantungan		
	Muda	Tua	Total
Gamping	30,55	11,85	42,40
Godean	29,94	14,53	44,47
Moyudan	29,00	20,88	49,88
Minggir	29,13	21,19	50,32
Seyegan	30,64	14,63	45,27
Mlati	30,67	12,18	42,85
Depok	30,61	12,25	42,85
Berbah	31,21	11,93	43,14
Prambanan	32,40	14,48	46,87
Kalasan	31,26	12,21	43,47
Ngemplak	32,35	13,61	45,96
Ngaglik	32,09	12,34	44,43
Sleman	31,65	13,01	44,66
Tempel	30,63	14,36	44,99
Turi	30,26	14,37	44,63
Pakem	30,53	15,16	45,69
Cangkringan	32,38	15,51	47,88
KABUPATEN SLEMAN	30,99	13,58	44,56

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Dalam perhitungan rasio ketergantungan, untuk penduduk tua digunakan kelompok umur 65 tahun ke atas. Berdasarkan Tabel 3.6 diketahui angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sleman adalah sebesar 44,56 persen yang menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk kelompok umur 15-64 tahun yang produktif menanggung sekitar 44-45 orang penduduk tidak produktif. Rasio ketergantungan sebesar 44,56 persen ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda sebesar 30,99 persen dan rasio penduduk tua sebesar 13,58 persen. Sementara berdasarkan wilayah diketahui rasio ketergantungan paling tinggi pada tahun 2020 adalah Kecamatan Minggir yang mencapai 50,32 persen. Sementara wilayah dengan rasio ketergantungan paling rendah di seluruh wilayah Sleman adalah Kecamatan Gamping sebesar 42,40 persen. Fenomena angka rasio ketergantungan di Kabupaten Sleman dalam beberapa tahun ini sangat dinamis, dikarenakan struktur penduduk rata-rata bergeser ke kelompok usia tua. Pada kasus Kecamatan Minggir rasio ketergantungan yang tinggi disumbang oleh kelompok muda 29,13 dan tua sebesar 21,19. Hal ini menunjukkan struktur penduduk tua di Kecamatan Minggir.

Gambaran penduduk di Kabupaten Sleman berdasarkan rasio beban ketergantungan ini menunjukkan adanya perkembangan produktivitas sumberdaya manusianya sudah tinggi dan beban penduduk tidak produktif dalam pembangunan semakin rendah. Dengan demikian maka pembangunan dapat terus dilakukan karena penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh usia produktif. Kabupaten Sleman akan menikmati dekade *Window of Opportunity* atau jendela kesempatan. Hal itu akan terjadi pada kondisi dimana jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) meningkat sedangkan jumlah usia yang tidak produktif (0-14 tahun dan 65+) menurun. Pemanfaatan peluang ini dapat terjadi dengan prasyarat, antara lain iklim investasi kondusif untuk membuka kesempatan kerja produktif serta terdapat sumber daya pemerintah untuk diharapkan akan terjadi *window of opportunity* tersebut dengan angka ketergantungan mencapai 44-50 persen. Kondisi rasio beban ketergantungan penduduk Sleman sudah mencapai di bawah 50 persen yaitu 44,56 di tahun 2020. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sleman telah menikmati *window of opportunity*.

3.1.7 Rasio Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*)

Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan

luas ruangannya (Sarwono, 1992). Sementara menurut Mantra (2003), kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Kepadatan penduduk merupakan indikator terjadinya tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Menurut BPS (1995), kepadatan penduduk dibagi menjadi tiga jenis yaitu.

- a. Kepadatan penduduk kasar (*Crude Population Density*), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.
- b. Kepadatan fisiologis (*Physiological Density*), yang menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah. Lahan yang ditanami (*Cultivable Land*).
- c. Kepadatan agraris (*Agriculture Density*), menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi wilayah *Cultivable Land*. Ukuran ini menggambarkan intensitas pertanian dari petani terhadap lahan yang mencerminkan efisiensi teknologi pertanian dan intensitas tenaga kerja pertanian.

Kepadatan penduduk kasar merupakan ukuran persebaran penduduk yang umum digunakan, karena selain data dan cara penghitungannya sederhana, ukuran ini sudah distandarisasi dengan luas wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk setiap 1 (satu) kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk, menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Selain itu, indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan. Sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan.

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun, karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah, baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan. Sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan. Berdasarkan karakteristik sumberdaya, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat kawasan, salah satunya adalah Kawasan Tengah yaitu wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini cepat berkembang, merupakan pusat pendidikan, industri, perdagangan, dan jasa, sehingga

tidak mengherankan jika Kecamatan Depok, Gamping, dan Mlati dan Gamping memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

Sebagaimana diketahui karakteristik perkembangan wilayah dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yakni gambaran densitas penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu kepadatan juga menunjukkan persebaran penduduk pada setiap bagian wilayah di suatu daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang membagi tingkat kepadatan penduduk menjadi 4 kriteria, yaitu:

- (a) Tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/km²;
- (b) kurang padat antara 51-250 jiwa/km²;
- (c) cukup padat 251-400 jiwa/km²; dan
- (d) sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/km².

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman sangat bervariasi mulai dari 3.479,30 jiwa/km² di Kecamatan Depok sampai dengan 659,32 jiwa/km² di Kecamatan Cangkringan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman tergolong dalam sangat padat. Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.7. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 mencapai 1.948,98 jiwa per km² dan wilayah paling padat adalah Kecamatan Depok tercatat sebanyak 3.479,30 jiwa per km². Kecamatan Depok merupakan pusat perkembangan Kabupaten Sleman, karena banyaknya perguruan tinggi di Depok sehingga menjadi daya tarik bagi pendatang. Wilayah terpadat kedua adalah Kecamatan Mlati yang mencapai 3.257,40 jiwa per km² dan ketiga adalah Kecamatan Gamping yang mencapai 3.210,67 jiwa per km². Sementara itu, wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Cangkringan yang hanya mencapai 659,32 jiwa per km².

Tabel 3.7 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Persentase Persebaran Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Gamping	29,25	93.912	9,69	3.210,67
2	Godean	26,84	69.902	7,86	2.604,40
3	Moyudan	27,62	22.484	2,46	814,05
4	Minggir	27,27	32.512	3,60	1.192,23
5	Seyegan	26,63	50.993	5,78	1.914,87

6	Mlati	28,52	92.901	9,83	3.257,40
7	Depok	35,55	123.689	10,50	3.479,30
8	Berbah	22,99	55.498	7,29	2.414,01
9	Prambanan	41,35	54.001	3,94	1.305,95
10	Kalasan	35,84	83.328	7,02	2.325,00
11	Ngemplak	35,71	62.864	5,31	1.760,40
12	Ngaglik	38,52	98.525	7,72	2.557,76
13	Sleman	31,32	70.055	6,75	2.236,75
14	Tempel	32,49	54.341	5,05	1.672,55
15	Turi	43,09	37.350	2,62	866,79
16	Pakem	43,84	37.758	2,60	861,27
17	Cangkringan	47,99	31.641	1,99	659,32
Kabupaten Sleman		574,82	1.082.754		1.948,98

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 3.7 di bawah ini terlihat bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi ada di wilayah kecamatan yang berada/berbatasan dengan kawasan perkotaan yaitu Kecamatan Depok, Mlati, dan Gamping. Kepadatan rendah terjadi di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Gunung Api Merapi yaitu Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Apabila dilihat dari luas wilayah, tiga kecamatan tersebut memiliki wilayah terluas, tetapi kepadatan penduduknya justru terendah. Hal tersebut karena tidak semua wilayah di keempat kecamatan tersebut dapat dijadikan tempat hunian akibat letaknya yang berada di lereng Gunung Merapi, terutama Kecamatan Cangkringan, Pakem, dan Turi. Wilayah tersebut sangat rentan bahaya terkait dengan aktivitas Gunung Merapi yang seharusnya tidak dimanfaatkan sebagai kawasan hunian. Penyebaran penduduk yang kurang merata merupakan salah satu masalah kependudukan yang juga perlu mendapat perhatian. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kepadatan penduduk yang heterogen menimbulkan munculnya berbagai aspek permasalahan yang berbeda yang berakibat pada kebijakan pengembangan wilayah yang berbeda pula. Meskipun demikian, fenomena kepadatan penduduk di kawasan perkotaan cukup tinggi, hal ini disebabkan fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Yogyakarta, sebagai daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan, dan daerah pengembangan pemukiman/perumahan.

Padatnya penduduk disuatu wilayah pada batas tertentu akan mengganggu stabilitas kehidupan penduduk di wilayah itu sendiri. Wilayah yang padat akan menimbulkan banyak persoalan tidak saja masalah pemenuhan fasilitas tapi juga

masalah keamanan, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Sebaliknya kepadatan penduduk yang sangat rendah akan menyulitkan penduduk dalam mengakses fasilitas yang ada karena tempat tinggal penduduk menjadi sangat tersebar sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi relatif lebih mahal.

3.2 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

3.2.1 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Tingkat pendidikan juga dianggap sebagai investasi Sumber Daya Manusia (*human capital investment*) selain kesehatan. Adam Smith, seorang ekonom, berpendapat bahwa pendidikan dianggap sebagai investasi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas, artinya investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) seperti halnya investasi pada kapital fisik.

Tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan makin baiknya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, sekaligus juga menunjukkan makin tingginya tingkat sosial ekonomi masyarakat. Pendidikan yang tinggi memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, juga pendapatan yang lebih baik, dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Peningkatan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pada gilirannya akan berdampak pada perbaikan kinerja dalam melakukan pekerjaan. Perbaikan kinerja dalam pengertian ekonomis berarti terjadi peningkatan *output* yang dihasilkan.

Perencanaan di bidang pendidikan memerlukan data-data sebagai acuan dasar. Untuk itu, dalam subbab berikut ini akan disajikan beberapa indikator yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan program pendidikan di masa datang khususnya di Kabupaten Sleman. Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di Kabupaten Sleman pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin per kecamatan dalam bentuk tabel. Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di suatu kabupaten/kota sekaligus kualitas sumberdaya manusia.

Menurut data SIAK Data Konsolidasi Bersih (DKB), diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar pada tingkat pendidikan rendah. Pada tahun 2020 paling banyak penduduk Sleman berpendidikan SMA yang mencapai 347.626 jiwa atau 32,11 persen. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak kedua adalah tidak memiliki ijazah yang mencapai 179.238 jiwa atau 16,55 persen, Penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yaitu setara dengan Diploma III ke atas sampai dengan Strata III masih tercatat sebanyak 161.731 jiwa atau 14,94 persen.

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020

No.	Kecamatan	Tidak Sekolah	Belum tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Strata III	Total
1	Gamping	17.012	9.370	12.794	12.237	27.627	874	3.143	9.446	1.247	162	93.912
2	Godean	11.582	6.932	9.274	9.280	22.545	638	2.154	6.705	693	99	69.902
3	Moyudan	5.132	3.043	4.015	4.180	11.765	504	1.107	3.489	230	19	33.484
4	Minggir	5.405	3.631	4.466	4.005	10.476	360	1.001	2.979	170	19	32.512
5	Seyegan	8.896	5.204	7.298	7.914	16.965	313	1.162	2.998	231	12	50.993
6	Mlati	14.337	10.004	11.272	12.024	29.482	822	3.121	10.266	1.374	199	92.901
7	Depok	20.068	10.314	10.270	12.820	38.289	1.512	5.976	20.367	3.490	583	123.689
8	Berbah	8.975	5.695	6.923	8.791	18.232	470	1.547	4.395	425	45	55.498
9	Prambanan	9.762	4.854	9.563	8.192	17.592	251	960	2.616	197	14	54.001
10	Kalasan	14.089	8.803	9.314	11.214	26.723	813	2.853	8.281	1.063	175	83.328
11	Ngemplak	10.384	6.314	5.961	7.834	21.161	541	2.122	7.247	1.079	221	62.864
12	Ngaglik	16.592	9.084	9.206	11.416	29.933	886	4.244	14.290	2.371	503	98.525
13	Sleman	11.086	6.996	7.889	10.923	23.683	585	2.272	5.958	608	55	70.055
14	Tempel	8.745	6.261	7.959	8.637	17.565	453	1.275	3.191	242	13	54.341
15	Turi	6.180	3.683	5.488	5.401	12.675	347	867	2.523	171	15	37.350
16	Pakem	5.905	3.668	4.679	5.043	13.054	411	1.355	3.357	263	23	37.758
17	Cangkringan	5.088	3.247	6.175	4.590	9.859	229	614	1.691	141	7	31.641
KABUPATEN SLEMAN		179.238	107.103	132.546	144.501	347.626	10.009	35.773	109.799	13.995	2.164	1.082.754

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa penduduk Sleman berdasarkan ijazah yang dimiliki paling banyak adalah SMA/sederajat. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, diketahui penduduk dengan ijazah SMA/sederajat tersebut lebih tinggi laki-laki dibanding perempuan. Pada tahun 2020 tercatat laki-laki dengan ijazah SMA/sederajat sebanyak 183.110 jiwa atau 34,10 persen, sedangkan perempuan sebanyak 164.516 jiwa atau 30,14 persen. Majoritas perbandingan laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan di semua tingkatan sekolah kecuali tingkat SMP, SMA, S2 dan S3.

Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020

Ijazah tertinggi	Jenis Kelamin				Total	
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Persen
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen		
Tidak mempunyai ijazah	87.691	16,33	91.547	16,77	179.238	16,64
Belum tamat SD	52.658	9,81	54.445	9,98	107.103	9,89
SD/MI	59.400	11,06	73.146	13,40	132.546	12,24
SMP/Mts	72.380	13,48	72.121	13,21	144.501	13,35
SMA/SMK/MA	183.110	34,10	164.516	30,14	347.626	32,11
DI/DII	4.044	0,75	5.965	1,09	10.009	0,92
DIII/Akademi	15.254	2,84	20.519	3,76	35.773	3,30
DIV/S1	52.950	9,86	56.849	10,42	109.799	10,14
S2	7.973	1,48	6.022	1,10	13.995	1,29
S3	1.517	0,28	647	0,11	2.164	0,20
Jumlah	536.977	100	545.777	100	1.082.754	100

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

3.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama/kepercayaan di suatu kabupaten/kota pada waktu tertentu yang disajikan per kecamatan dalam bentuk tabel. Dari tabel tersebut akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Penduduk Sleman berdasarkan agama dan kepercayaan menurut wilayah tempat tinggal dari data SIAK diketahui paling banyak tinggal di Kecamatan Depok. Mulai dari Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghuchu paling banyak berdomisili di Kecamatan Depok. Penduduk yang beragama Islam yang tinggal di Kecamatan Depok pada tahun 2020 tercatat sebanyak 104.653 jiwa atau 10,69 persen dari total penduduk Sleman yang beragama Islam. Berikutnya adalah penduduk yang beragama Katolik yang tinggal di Kecamatan Depok pada tahun 2020 sebanyak 10.876 jiwa atau 15,63 persen dari total penduduk Sleman yang beragama Katolik.

Penduduk yang beragama Kristen yang tinggal di Kecamatan Depok tahun 2020 tercatat sebanyak 7.632 jiwa atau 23,86 persen dari total penduduk yang beragama Kristen di Sleman. Sementara penduduk yang beragama Hindu paling banyak juga tinggal di Kecamatan Depok yakni mencapai 297 jiwa atau 26,10 persen dari total

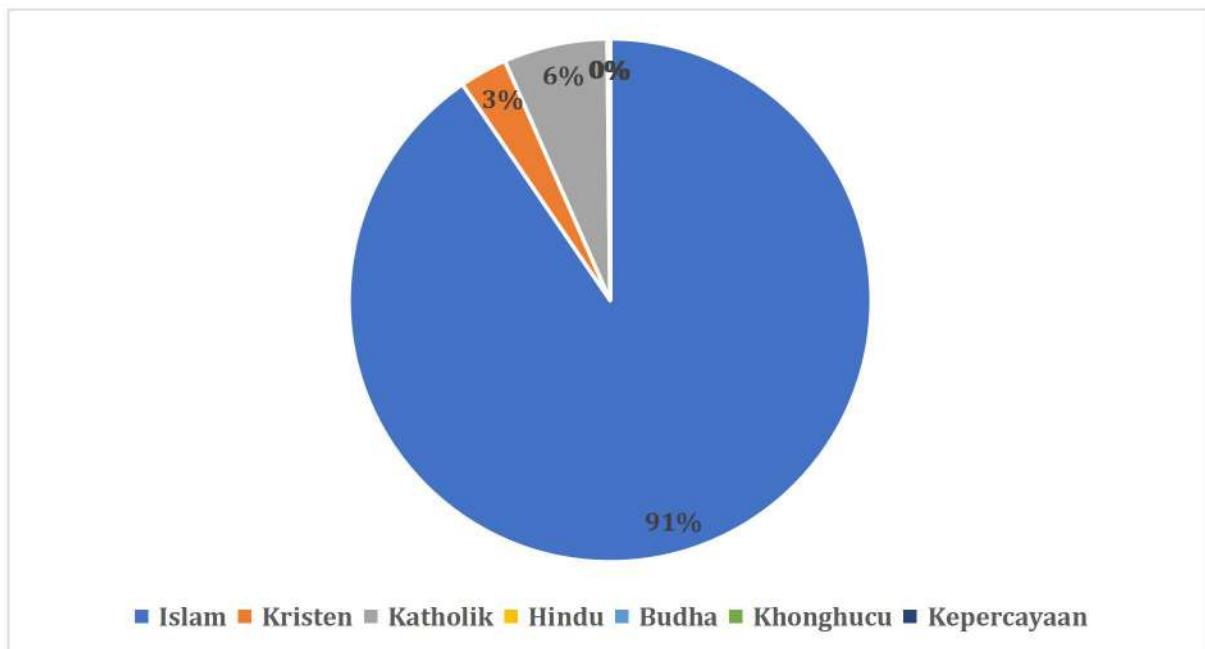
penduduk Sleman yang beragama Hindu. Penduduk dengan agama Budha yang tinggal di Kecamatan Depok sebanyak 211 jiwa atau 30,01 persen dari total penduduk yang beragama Budha. Khonghuchu yang telah diakui oleh pemerintah sebagai salah satu agama di Indonesia paling banyak tinggal di Kecamatan Depok yakni sebesar 8 jiwa atau 15,69 persen. Penduduk dengan aliran kepercayaan terbanyak juga tinggal di Kecamatan Depok yakni 12 orang atau 52,17 persen dari total 23 orang penganut Kepercayaan di Kabupaten Sleman.

Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020

Kecamatan	Agama/Kepercayaan																				
	Islam			Kristen			Katholik			Hindu			Budha			Khonghucu			Kepercayaan		
	L	P	Jml	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
Gamping	42.277	42.374	84.651	1.821	1.963	3.784	2.596	2.696	5.292	42	30	72	55	55	110	2	1	3	0	0	0
Godean	31.805	31.891	63.696	1.370	1.465	2.835	1.619	1.664	3.283	18	17	35	23	23	46	5	2	7	0	0	0
Moyudan	14.433	14.532	28.965	234	239	473	1.973	2.065	4.038	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minggir	12.565	13.125	25.690	320	370	690	2.971	3.156	6.127	2	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Seyegan	24.510	24.834	49.344	167	192	359	572	616	1.188	43	52	95	3	4	7	0	0	0	0	0	0
Mlati	41.276	41.653	82.929	1.515	1.615	3.130	3.353	3.240	6.593	59	65	124	60	54	114	5	6	11	0	0	0
Depok	51.903	52.750	104.653	3.726	3.906	7.632	5.268	5.608	10.876	144	153	297	109	102	211	5	3	8	4	8	12
Berbah	25.389	25.708	51.097	852	921	1.773	1.242	1.332	2.574	21	23	44	7	3	10	0	0	0	0	0	0
Prambanan	25.255	25.829	51.084	222	251	473	1.225	1.189	2.414	11	8	19	4	6	10	1	0	1	0	0	0
Kalasan	36.768	37.324	74.092	1.414	1.428	2.842	3.088	3.138	6.226	71	59	130	15	19	34	3	0	3	0	1	1
Ngemplak	28.624	28.939	57.563	872	975	1.847	1.616	1.698	3.314	62	55	117	13	7	20	0	2	2	1	0	1
Ngaglik	43.772	44.609	88.381	1.588	1.660	3.248	3.304	3.309	6.613	78	78	156	65	50	115	5	4	9	1	2	3
Sleman	32.252	32.896	65.148	595	589	1.184	1.823	1.864	3.687	10	4	14	5	11	16	2	3	5	1	0	1
Tempel	26.456	26.857	53.313	106	112	218	394	403	797	1	3	4	3	3	6	1	0	1	0	2	2
Turi	17.499	17.468	34.967	91	95	186	1.077	1.114	2.191	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
Pakem	16.074	16.559	32.633	554	539	1.093	1.935	2.087	4.022	5	2	7	2	1	3	0	0	0	0	0	0
Cangkringan	15.361	15.705	31.066	113	112	225	162	178	340	6	3	9	0	0	0	1	0	1	0	0	0
KABUPATEN SLEMAN	486.219	493.053	979.272	15.560	16.432	31.992	34.218	35.357	69.575	578	560	1.138	364	339	703	30	21	51	8	15	23

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Berdasarkan data SIAK diketahui penduduk Sleman menurut agama dan kepercayaan dianut tahun 2020 paling banyak adalah Islam yang mencapai 979.272 jiwa atau 90,44 persen. Urutan kedua terbanyak adalah Katolik yang mencapai 69.575 jiwa atau 6,43 persen dan berikutnya adalah Kristen sebanyak 31.992 jiwa atau 2,95 persen. Berikutnya adalah Hindu sebanyak 1.138 jiwa atau 0,11 persen, Khonghucu sebanyak 51 jiwa atau 0,005 persen, Budha mencapai 703 jiwa atau 0,06 persen, dan pengikut Kepercayaan 23 jiwa atau 0,002 persen.



Gambar 3.21 Persentase Penduduk Sleman Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

3.2.3 Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin

Perkawinan merupakan peristiwa demografis yang penting dalam proses transisi menuju masa dewasa. Dalam demografi, perkawinan menandai berbagai transisi dalam kehidupan, dari anak menjadi dewasa, dari anggota rumah tangga inti menjadi terpisah dan membentuk keluarga mandiri, dan juga transisi ke dalam masa reproduksi potensial yang diakui oleh masyarakat serta hukum negara dan agama (Hull, 2011).

Di Indonesia sendiri, perkawinan dianggap sebagai gerbang untuk membangun keluarga. Perkawinan dipandang sebagai hal yang sakral dalam kaca mata agama dan budaya karena perkawinan tidak hanya menandai kedewasaan tetapi juga status sosial

seseorang di masyarakat. Proses menuju perkawinan melibatkan banyak negosiasi tidak saja antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Faktor sosial serta budaya sangat berperan dalam proses menuju perkawinan tersebut.

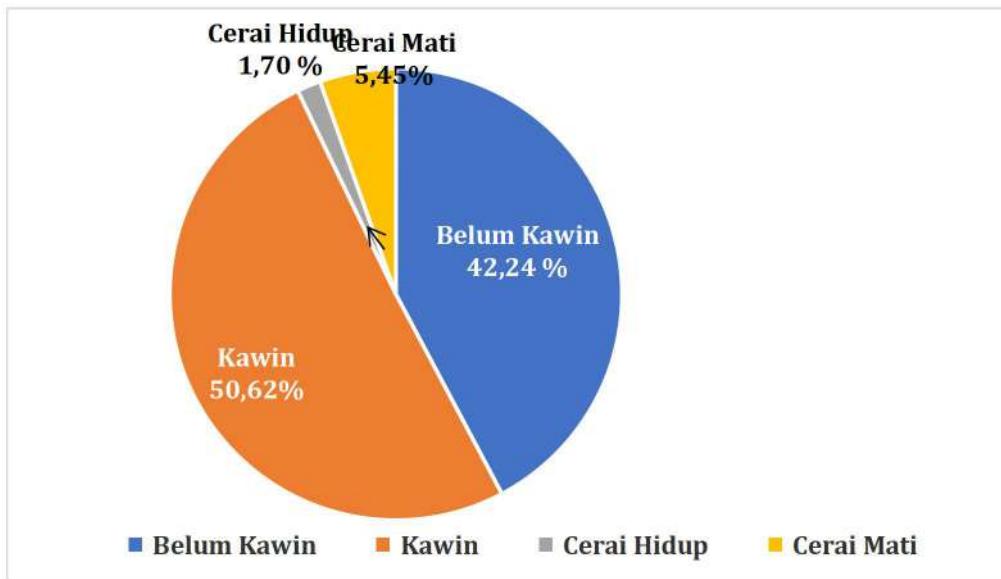
Perkawinan merupakan langkah awal pembentukan suatu keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu status perkawinan ini penting untuk dianalisis sebab dari perkawinan ini akan merubah perilaku demografi yaitu dengan adanya kelahiran. Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, dan lama kawin akan berguna untuk melakukan estimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orangtua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga. Indikator perkawinan ini, berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana atau pembangunan keluarga.

Perkawinan merupakan peristiwa demografis yang sangat kental dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Tidak seperti kelahiran dan kematian yang merupakan peristiwa terkait biologis, perkawinan dan perceraian ditentukan oleh undang-undang, konsensus, serta budaya yang dalam beberapa kasus sulit untuk diukur dalam statistik. Dalam konteks tertentu, baik di negara maju maupun berkembang, perkawinan tidak selalu berarti ikatan yang disahkan oleh negara atau agama, namun dapat juga berupa konsensus (*mutual consent*) baik dari pasangan itu sendiri maupun dengan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, definisi status perkawinan dalam sensus dan survey perlu diperhatikan agar semua peristiwa terkait perkawinan dapat tercatat dengan baik.

Mengukur peristiwa perkawinan dalam statistik memerlukan definisi yang sesuai dengan konsep perkawinan di suatu wilayah. Hull (2011) merangkum empat kategori status perkawinan yang umum digunakan dalam sensus dan survey penduduk di negara Asia termasuk Indonesia.

1. Belum menikah (*single/never married*), yaitu status belum/tidak terikat dalam perkawinan. Status ini melekat sejak lahir hingga perkawinan pertama. Secara sosial, masa lajang (*singlehood*) diasosiasikan dengan masa anak-anak dan belum dewasa.
2. Menikah atau kawin adalah status terikat dalam perkawinan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Menikah merupakan bersatunya dua insan untuk meneruskan keturunan (*reproductive union*) yang diakui oleh masyarakat, agama dan budaya serta hukum dan negara. Umumnya, status menikah dibuktikan dengan sebuah sertifikat yang diterbitkan pemerintah, otoritas agama, atau masyarakat. Meskipun tidak ada sertifikat atau surat nikah, keabsahan status kawin dapat ditentukan oleh masyarakat sekeliling yang menganggap pasangan sebagai suami istri.
3. Janda/duda mati atau cerai mati, yaitu status yang diperoleh setelah kematian pasangan. Status ini dibuktikan dengan surat nikah disertai dengan akta kematian dari pasangan.
4. Janda/duda cerai hidup, yaitu status yang diperoleh setelah pernikahan berakhir secara hukum. Status ini dibuktikan dengan surat keterangan bercerai. Hukum agama sendiri pada dasarnya tidak membolehkan terjadinya perceraian sehingga status cerai tersebut terkadang diperoleh dari pengakuan individu disertai pengakuan dari masyarakat. Dalam Sensus Penduduk, seseorang akan dicatat sebagai cerai hidup meskipun belum resmi secara hukum.

Dalam pencatatan status menikah, keempat status di atas sangat tergantung kepada pengakuan responden yang juga dipengaruhi oleh konsensus masyarakat tentang perkawinan itu sendiri.



Gambar 3.22 Persentase Penduduk Sleman Menurut Status Perkawinan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Berdasarkan status perkawinan penduduk Sleman menurut data SIAK diketahui paling banyak adalah berstatus kawin yakni mencapai 548.069 jiwa atau 50,62 persen di tahun 2020. Urutan kedua penduduk berdasarkan status perkawinan adalah belum kawin yang mencapai 457.304 jiwa atau sekitar 42,23 persen dan selanjutnya adalah penduduk yang berstatus cerai mati sebanyak 58.959 jiwa atau 5,44 persen. Sementara penduduk dengan status cerai hidup sebanyak 18.422 jiwa atau 1,70 persen. Status perkawinan penduduk Sleman berdasarkan lokasi tempat tinggal, diketahui paling banyak tinggal di Kecamatan Depok, baik yang berstatus kawin, belum kawin, cerai hidup, maupun cerai mati (123.689 jiwa atau 11,42 persen).

Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Berdasarkan Kecamatan Menurut Data SIAK Tahun 2020

NO	Kecamatan	Status Perkawinan				
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
1	Gamping	40.338	47.293	1.579	4.702	93.912
2	Godean	29.212	35.860	1.128	3.702	69.902
3	Moyudan	13.400	17.318	409	2.357	33.484
4	Minggir	12.973	16.916	425	2.198	32.512
5	Seyegan	21.047	26.299	854	2.793	50.993
6	Mlati	39.702	46.667	1.772	4.760	92.901
7	Depok	54.442	60.636	2.341	6.270	123.689
8	Berbah	23.327	28.047	1.052	3.072	55.498
9	Prambanan	21.764	28.302	851	3.084	54.001

10	Kalasan	35.553	41.888	1.499	4.388	83.328
11	Ngemplak	26.835	31.613	1.033	3.383	62.864
12	Ngaglik	42.809	49.238	1.668	4.810	98.525
13	Sleman	29.867	35.272	1.166	3.750	70.055
14	Tempel	22.361	27.889	895	3.196	54.341
15	Turi	15.536	19.055	577	2.182	37.350
16	Pakem	15.732	18.949	664	2.413	37.758
17	Cangkringan	12.406	16.827	509	1.899	31.641
KABUPATEN SLEMAN		457.304	548.069	18.422	58.959	1.082.754

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

3.3 Keluarga

Keluarga menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1988 adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 1999 mendefinisikan keluarga sebagai dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian dari Depkes dan BKKBN di atas, definisi keluarga dapat lebih disederhanakan menjadi sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

Keluarga memiliki beberapa peran penting baik dilihat dari fungsi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistik serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Fungsi pendidikan, bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan juga pendidikan spiritualnya. Fungsi kesehatan berintikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja.

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) bahwa fungsi keluarga dibagi menjadi 7. Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, yaitu:

1. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa datang

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/ hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

Sudiharto (2007) menjelaskan bahwa keluarga yang dikenal dalam masyarakat kita memiliki dua bentuk yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti (*Nuclear family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin. Sementara itu, keluarga luas (*extended family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Indikator untuk menggambarkan kondisi keluarga, antara lain jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga, hubungan dengan kepala keluarga, karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin, karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin, karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan, dan karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan.

3.3.1 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga besar menjadi keluarga kecil.

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 adalah 2,94 orang, artinya rata-rata jumlah anggota keluarga kurang lebih terdiri dari tiga orang dan ini dapat dikategorikan sebagai keluarga inti. Rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak tiga orang ini, merata di setiap kecamatan di Kabupaten Sleman. Berdasarkan wilayah diketahui bahwa kecamatan paling banyak rata-rata anggota keluarganya adalah Kecamatan Ngaglik yang mencapai 3,01 jiwa. Sementara rata-rata anggota keluarga paling kecil adalah Kecamatan Minggir dan Moyudan yang mencapai 2,78 jiwa dan 2,80 jiwa.

3.3.2 Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK)

Kepala Keluarga adalah laki-laki atau perempuan yang berstatus kawin atau janda/duda yang mengepalai suatu keluarga yang anggotanya terdiri dari suami/isteri

dan atau anak-anaknya. Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga, seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orangtua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama, seperti: pembantu rumah tangga.

Tabel 3.11 Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga, dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga		
	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga
Gamping	31.566	93.912	2,98
Godean	23.907	69.902	2,92
Moyudan	11.943	33.484	2,80
Minggir	11.684	32.512	2,78
Seyegan	17.585	50.993	2,90
Mlati	31.399	92.901	2,96
Depok	41.551	123.689	2,98
Berbah	18.919	55.498	2,93
Prambanan	18.681	54.001	2,89
Kalasan	28.042	83.328	2,97
Ngemplak	21.003	62.864	2,99
Ngaglik	32.737	98.525	3,01
Sleman	23.832	70.055	2,94
Tempel	18.701	54.341	2,91
Turi	12.618	37.350	2,96
Pakem	13.016	37.758	2,90
Cangkringan	11.029	31.641	2,87
KABUPATEN SLEMAN	368.213	1.082.754	2,941

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Data SIAK tahun 2020 memperlihatkan jumlah total penduduk Sleman tahun 2020 mencapai 1.082.754 jiwa dan terdiri dari 368.213 KK. Jika dilihat dari status hubungan dengan kepala keluarga, tampak bahwa paling banyak berstatus sebagai anak, yakni 432.617 jiwa atau 39,96 persen. Selanjutnya adalah status sebagai kepala keluarga, yaitu sebesar 368.213 KK atau 34,01 persen, dan ketiga adalah status istri yang mencapai 255.020 atau 23,55 persen. Kepala keluarga umumnya dipegang oleh suami, tetapi di Kabupaten Sleman terdapat 75.198 KK perempuan atau 13,78 persen perempuan yang menjadi kepala keluarga.

**Tabel 3.12 Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga
Tahun 2020**

Status Hubungan dengan Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk (jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Persen
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen		
Kepala keluarga	293.015	54,57	75.198	13,78	368.213	34,01
Suami	74	0,01	-	0	74	0,01
Isteri	-	0	255.020	46,73	255.020	23,55
Anak	231.610	43,13	201.007	36,83	432.617	39,96
Menantu	266	0,05	434	0,08	700	0,06
Cucu	5.124	0,95	4.413	0,81	9.537	0,88
Orangtua	301	0,06	2.316	0,42	2.617	0,24
Mertua	129	0,02	991	0,18	1.120	0,10
Famili lain	5.429	1,01	5.259	0,96	10.688	0,99
Pembantu	5	0,00	51	0,01	56	0,01
Lainnya	1.024	0,19	1.088	0,20	2.112	0,20
KABUPATEN SLEMAN	536.977	100	545.777	100	1.082.754	100

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

3.3.3 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Informasi tentang karakteristik kepala keluarga merupakan informasi yang penting terutama dalam program pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan dan lain-lain. Tabel 3.16, menunjukkan bahwa proporsi kepala keluarga tertinggi berada pada kelompok umur 45-49 tahun yaitu 42.047 KK atau 11,8 persen. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman merupakan keluarga yang berada pada kelompok produktif.

Tabel 3.13 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin					
	Laki-laki	Persen	Perempuan	Persen	Total	Persen
15-19	222	0,08	115	0,16	337	0,1
20-24	3.450	1,20	718	1,03	4.168	1,2
25-29	14.907	5,18	1.414	2,03	16.321	4,6
30-34	26.237	9,12	1.967	2,82	28.204	7,9
35-39	35.982	12,50	3.045	4,36	39.027	10,9
40-44	36.323	12,62	3.937	5,64	40.260	11,3
45-49	36.980	12,85	5.067	7,26	42.047	11,8
50-54	33.741	11,72	6.508	9,32	40.249	11,3
55-59	28.721	9,98	7.487	10,73	36.208	10,1
60-64	24.290	8,44	8.295	11,89	32.585	9,1
65-69	16.415	5,70	7.326	10,50	23.741	6,6
70-74	11.122	3,86	7.262	10,41	18.384	5,1
75 - 79	9.651	3,35	7.043	10,09	16.694	4,7
>80	9.730	3,38	9.607	13,77	19.337	5,4
Kab Sleman	287.771	100,00	69.791	100,00	357.562	100,00

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Dan yang menarik adalah adanya kepala keluarga usia 15-19 tahun dan semakin membesar di kelompok umur berikutnya. Kepala keluarga pada kelompok umur 15-19 tahun meskipun jumlahnya paling sedikit yaitu 337 jiwa atau 0,1 persen, walaupun persentasenya kecil tetapi harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini menjadi indikasi perubahan kualitas keluarga dengan usia kepala keluarga yang matang.

3.3.5 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat *partriarchi* yang memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, membahas kepala keluarga perempuan menjadi sangat menarik. Di satu sisi munculnya kepala keluarga perempuan merupakan indikator kemiskinan, karena absennya laki-laki sebagai pencari nafkah. Tetapi di sisi lain dapat pula dipahami bahwa munculnya kepala rumah tangga perempuan merupakan indikasi masuknya perempuan ke sektor publik atau pergeseran dari fungsi reproduksi ke produksi.

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga. Hal ini menyebabkan mereka pada umumnya menyandang

jabatan sebagai kepala keluarga. Namun dalam beberapa dekade ini terlihat adanya peningkatan jumlah perempuan yang menyandang jabatan kepala keluarga tersebut. Konstruksi sosial bahwa laki-laki adalah kepala keluarga nampaknya mulai bergeser. Namun sering kali terjadi meskipun menjabat sebagai kepala keluarga, justru perempuan menanggung beban untuk menanggung seluruh kebutuhan keluarga. Hal semacam ini sering terjadi pada kepala keluarga perempuan lansia. Beratnya beban untuk mencukupi kebutuhan hidup dan tanggung jawab terhadap berbagai hal atau masalah dalam keluarga menyebabkan perempuan menjadi pihak yang sangat rentan terjebak dalam kemiskinan.

Tabel 3.14 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga					
		Laki	Persen	Perempuan	Persen	Jumlah	Persen
1	Gamping	25.240	8,61	6.326	8,41	31.566	8,57
2	Godean	19.098	6,52	4.809	6,40	23.907	6,49
3	Moyudan	9.362	3,20	2.581	3,43	11.943	3,24
4	Minggir	9.063	3,09	2.621	3,49	11.684	3,17
5	Seyegan	14.066	4,80	3.519	4,68	17.585	4,78
6	Mlati	24.972	8,52	6.427	8,55	31.399	8,53
7	Depok	32.478	11,08	9.073	12,07	41.551	11,28
8	Berbah	15.114	5,16	3.805	5,06	18.919	5,14
9	Prambanan	15.024	5,13	3.657	4,86	18.681	5,07
10	Kalasan	22.428	7,65	5.614	7,47	28.042	7,62
11	Ngemplak	16.807	5,74	4.196	5,58	21.003	5,70
12	Ngaglik	26.144	8,92	6.593	8,77	32.737	8,89
13	Sleman	18.907	6,45	4.925	6,55	23.832	6,47
14	Tempel	15.000	5,12	3.701	4,92	18.701	5,08
15	Turi	10.213	3,49	2.405	3,20	12.618	3,43
16	Pakem	10.134	3,46	2.882	3,83	13.016	3,53
17	Cangkringan	8.965	3,06	2.064	2,74	11.029	3,00
Jumlah		293.015	100	75.198	100	368.213	100

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Seperti telah diuraikan sebelumnya, jumlah kepala keluarga paling banyak di Kabupaten Sleman Tahun 2020 menurut jenis kelamin adalah laki-laki, yaitu sebanyak 293.015 jiwa (79,58 persen) dan perempuan sebesar 75.198 jiwa (20,42 persen). Apabila dibandingkan antar wilayah di Kabupaten Sleman, kecamatan yang paling banyak kepala keluarga perempuannya dibandingkan dengan wilayah lain adalah

Kecamatan Depok yang mencapai 41.551 KK atau 11,28 persen dan terendah adalah Kecamatan Cangkringan, yaitu sebesar 2,74 persen atau 2.064 KK.

Berdasarkan data tentang kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa laki-laki masih tetap dominan sebagai kepala keluarga dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya budaya yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pengambilan keputusan dalam keluarga dan sumber utama pencari nafkah utama, laki-laki masih dominan. Namun posisi laki-laki sebagai kepala keluarga lambat laun mulai digantikan perannya oleh perempuan. Data menunjukkan jumlah perempuan sebagai kepala keluarga mengalami peningkatan yang cukup pesat.

3.3.5 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggungjawab sebagai kepala keluarga, baik secara ekonomi, sosial maupun psikologis. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status perkawinan dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai, baik hidup maupun mati.

Tabel 3.15 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Kecamatan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020

NO	Kecamatan	Status Perkawinan				
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
1	Gamping	40.338	47.293	1.579	4.702	93.912
2	Godean	29.212	35.860	1.128	3.702	69.902
3	Moyudan	13.400	17.318	409	2.357	33.484
4	Minggir	12.973	16.916	425	2.198	32.512
5	Seyegan	21.047	26.299	854	2.793	50.993
6	Mlati	39.702	46.667	1.772	4.760	92.901
7	Depok	54.442	60.636	2.341	6.270	123.689
8	Berbah	23.327	28.047	1.052	3.072	55.498
9	Prambanan	21.764	28.302	851	3.084	54.001
10	Kalasan	35.553	41.888	1.499	4.388	83.328
11	Ngemplak	26.835	31.613	1.033	3.383	62.864
12	Ngaglik	42.809	49.238	1.668	4.810	98.525
13	Sleman	29.867	35.272	1.166	3.750	70.055
14	Tempel	22.361	27.889	895	3.196	54.341
15	Turi	15.536	19.055	577	2.182	37.350

16	Pakem	15.732	18.949	664	2.413	37.758
17	Cangkringan	12.406	16.827	509	1.899	31.641
KABUPATEN SLEMAN		457.304	548.069	18.422	58.959	1.082.754

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Total kepala keluarga di Kabupaten Sleman berdasarkan data SIAK Tahun 2020 mencapai 1.082.754 KK. Kepala keluarga menurut status perkawinan paling banyak adalah kawin, yaitu 50,62 persen atau 548.069 KK. Berikutnya adalah cerai mati sebanyak 5,45 persen atau 58.959 KK dan ketiga adalah belum kawin sebanyak 457.304 KK atau 42,24 persen. Hal yang menarik dari data tersebut adalah adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin dan jumlahnya cukup besar. Biasanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin merupakan anggota keluarga yang mengantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dijadikan sebagai kepala keluarga bukan hanya didasarkan pada status perkawinannya, tetapi lebih kepada kemampuan dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga. Selain itu, konstruksi sosial bahwa laki-laki adalah kepala keluarga nampaknya mulai bergeser dengan adanya kepala keluarga perempuan tidak hanya kepala keluarga laki-laki berstatus kawin. Sementara itu, jika diperhatikan lebih lanjut terdapat kepala keluarga yang berstatus cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati). Laki-laki pada umumnya segera melakukan perkawinan kembali sesudah terjadi perceraian, sementara perempuan lebih banyak yang menunda dengan berbagai alasan.

3.3.6 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia, serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Untuk itu, jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel 3.16 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2020

Kecamatan	Tidak Sekolah	Belum tamat SD/MI	Tamat SD/MI	SMP/ MTs	SMA/SMK /MA	Diploma I/II	Akademi	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Strata III	Total
Gamping	964	1.060	5.745	4.609	12.102	375	1.414	4.443	734	120	31.566
Godean	697	972	4.383	3.540	9.541	280	934	3.078	402	80	23.907
Moyudan	422	463	2.032	1.352	5.254	244	506	1.524	134	12	11.943
Minggir	692	756	2.106	1.525	4.658	171	414	1.266	84	12	11.684
Seyegan	751	869	3.688	2.825	7.423	145	441	1.307	130	6	17.585
Mlati	585	1.181	4.903	4.507	12.723	323	1.371	4.856	806	144	31.399
Depok	603	799	4.373	4.075	16.046	639	2.771	9.732	2.073	440	41.551
Berbah	570	563	3.349	3.065	8.188	212	657	2.014	271	30	18.919
Prambanan	1.730	165	4.606	2.875	7.533	93	401	1.154	114	10	18.681
Kalasan	1.014	965	3.799	4.114	11.835	377	1.313	3.835	643	147	28.042
Ngemplak	723	693	2.805	2.678	8.842	217	910	3.333	634	168	21.003
Ngaglik	727	842	3.831	3.611	12.873	376	1.934	6.739	1.422	382	32.737
Sleman	766	622	3.674	3.863	10.509	260	993	2.739	367	39	23.832
Tempel	679	1.068	3.792	3.353	7.611	199	478	1.366	145	10	18.701
Turi	543	354	2.733	2.105	5.162	177	378	1.068	90	8	12.618
Pakem	315	500	2.233	1.663	5.809	187	641	1.491	159	18	13.016
Cangkringan	376	365	3.014	1.780	4.387	106	223	698	76	4	11.029
Kab Sleman	12.157	12.237	61.066	51.540	150.496	4.381	15.779	50.643	8.284	1.630	368.213

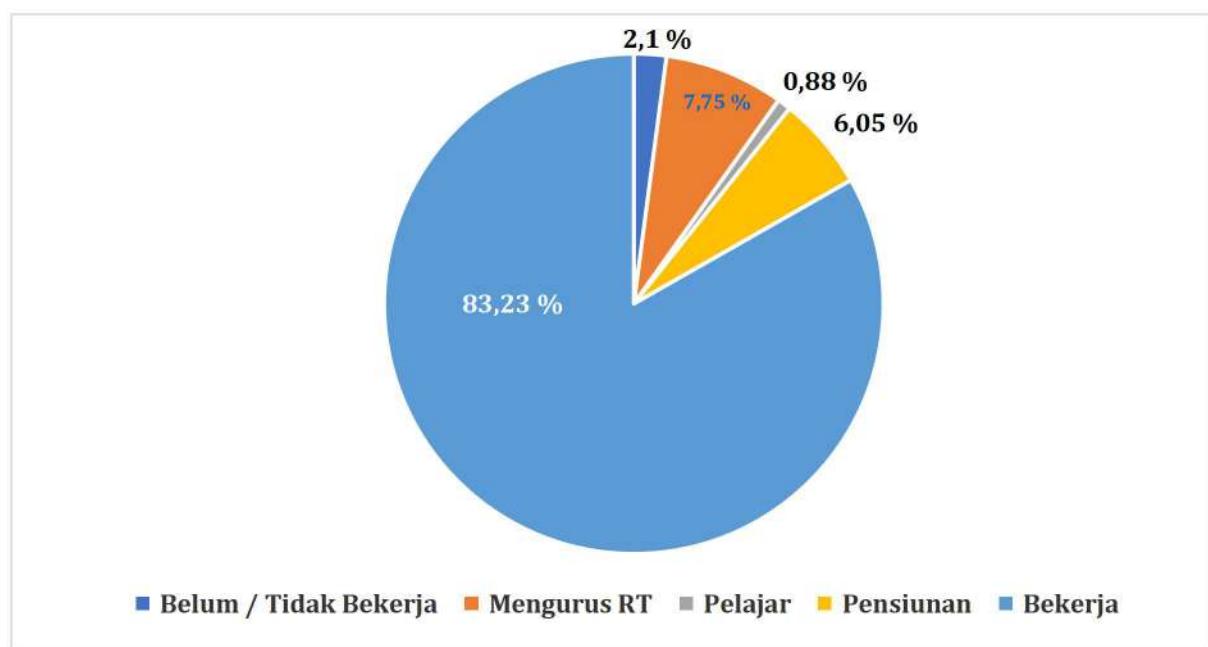
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Tingkat pendidikan yang dicapai kepala keluarga merupakan salah satu indikator kualitas hidup yang menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan keluarga. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan dari orang yang bersangkutan maupun anggota keluarganya. Selain itu pendidikan kepala keluarga mempunyai hubungan yang signifikan dengan pendidikan anggota keluarga. Data SIAK Tahun 2020 memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga di Kabupaten Sleman tergolong rendah. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan ini, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal. Tingkat pendidikan kepala keluarga dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu pendidikan rendah (dibawah SLTA), pendidikan menengah (SLTA), dan pendidikan

tinggi yaitu dari Diploma sampai dengan S3. Data menunjukkan paling banyak kepala keluarga di Kabupaten Sleman berpendidikan menengah, yakni mencapai 202.036 jiwa.

3.3.7 Karakteristik Kepala keluarga Berdasarkan Status Bekerja

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota, serta seberapa besar sumbangannya terhadap potensi ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Gambar 3.23 memperlihatkan persentase kepala keluarga berdasarkan status bekerja. Paling banyak kepala keluarga di Kabupaten Sleman adalah bekerja, tahun 2020 sebanyak 83,23 persen. Selain kepala keluarga yang berstatus bekerja, terdapat juga kepala keluarga yang status tidak bekerja yang terdiri dari tidak bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga.



Gambar 3.23 Persentase Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja Tahun 2020

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Berdasarkan data SIAK Kabupaten Sleman tahun 2020 diketahui kepala keluarga yang statusnya tidak bekerja besarnya mencapai 16,77 persen yang terdiri atas pensiunan (6,05 persen), mengurus rumah tangga (7,75 persen), belum bekerja (2,10 persen), dan statusnya pelajar (0,88 persen). Ada hal yang menarik terkait dengan status pekerjaan kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari harus ditanggung

oleh anggota keluarga lainnya yang bekerja. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sleman perlu memperhatikan keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun proporsi mereka kecil. Kepala keluarga yang tidak bekerja, dapat disebabkan karena sudah memasuki usia pensiun atau memang tidak mampu masuk ke pasar kerja. Untuk mereka ini perlu diberikan intervensi untuk membantu meningkatkan status kesejahteraan mereka, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja memiliki status ekonomi yang rendah. Karena bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan diduga mereka tidak mempunyai penghasilan, sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 3.17 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Bekerja dan Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Belum / Tidak Bekerja	Mengurus RT	Pelajar	Pensiunan	Bekerja	Total
Gamping	734	2.340	283	1.630	26.579	31.566
Godean	565	1.788	136	1.307	20.111	23.907
Moyudan	305	1.011	42	1.165	9.420	11.943
Minggir	303	960	54	896	9.471	11.684
Seyegan	482	1.324	75	811	14.893	17.585
Mlati	608	2.789	361	1.750	25.891	31.399
Depok	703	4.088	787	3.281	32.692	41.551
Berbah	463	1.473	127	971	15.885	18.919
Prambanan	396	832	55	724	16.674	18.681
Kalasan	572	2.444	225	1.675	23.126	28.042
Ngemplak	437	1.505	189	1.398	17.474	21.003
Ngaglik	498	2.662	492	2.474	26.611	32.737
Sleman	677	1.840	135	1.361	19.819	23.832
Tempel	439	1.389	83	809	15.981	18.701
Turi	212	650	66	629	11.061	12.618
Pakem	180	984	87	922	10.843	13.016
Cangkringan	155	466	26	458	9.924	11.029
Jumlah	7.729	28.545	3.223	22.261	306.455	368.213

Sumber:Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

BAB IV

KUALITAS PENDUDUK

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Peningkatan kualitas penduduk berkaitan dengan upaya menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia melalui pembangunan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengembangan kualitas fisik, dan pengembangan kualitas non fisik untuk mewujudkan produktifitas dan ketahanan penduduk, khususnya terhadap kelompok anak, remaja, dewasa, usia lanjut, wanita, penduduk, dan masyarakat rentan.

Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Dengan kualitas tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu, pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam arti kualitas dan kuantitas, maka tantangan di masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan agar tantangan tersebut diatasi dengan baik.

Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh tiga hal : Pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2035 adalah penduduk yang sehat, cerdas produktif dan berakhhlak mulia serta karakter. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan produktivitas, tingkat sosial, ketahanan kemandirian kecerdasan. Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, kebangsaan, dan hidup

layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas dan berdaya saing. Penduduk dengan kualitas seperti itu diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin menguat.

Kuantitas penduduk seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk, kepadatan dan persebaran penduduk, komposisi penduduk menurut usia, jenis kelamin, pendidikan, status, dan lainnya telah dibahas dalam bab sebelumnya. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pengendalian kuantitas penduduk namun juga harus mengedepankan aspek kualitas penduduk sebagai tujuan utama pembangunan kependudukan. Dengan kata lain, kebijakan pembangunan kependudukan yang terarah dan terencana senantiasa berupaya melakukan pengendalian jumlah dan perkembangan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penertiban dokumen kependudukan. Harapan akhir adalah tercipta penduduk yang berkualitas dan tersebar secara merata di seluruh wilayah serta mampu menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkeadilan.

Penduduk dari segi kualitas sangat menentukan kemajuan suatu wilayah. Penduduk yang besar apabila tidak disertai dengan kualitas yang baik tidak akan menjadi kekuatan namun justru akan menjadi beban bagi wilayah. Kualitas penduduk dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan situasi mobilitas. Pada bab ini akan dibahas penduduk dilihat dari kualitasnya di Kabupaten Sleman. Pembahasan pada bab ini dibatasi pada permasalahan kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

4.1 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih hingga pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan SDG's adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030,

ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (*tobacco control*), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Secara nasional MDG's yang dicapai pada tahun 2015 masih menyisakan persoalan yaitu permasalahan yang belum tuntas ditangani, seperti upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, dan malaria, terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatiannya. Hal-hal tersebut, di antaranya yakni kematian akibat penyakit tidak menular (PTM); penyalahgunaan narkotika dan alkohol; kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas; asuransi kesehatan umum; dan kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah; serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan. Bagaimana dengan Kabupaten Sleman yang memiliki indeks pembangunan manusia dengan indikator angka harapan hidup tertinggi di Indonesia.

Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas penduduk dari aspek kesehatan adalah kelahiran dan kematian. Kedua indikator ini mempengaruhi perubahan jumlah dan struktur penduduk.

4.1.1. Angka Kematian Bayi

Kematian atau mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap jumlah, struktur dan komposisi penduduk. Dua komponen proses demografi lainnya adalah kelahiran (*fertilitas*), dan mobilitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat *mortalitas* penduduk di suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut (Mantra, 2003). Yang dimaksud dengan mati ialah peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Budi Utomo, 1985). Dari definisi ini terlihat bahwa keadaan "mati" hanya bisa terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup.

Dengan demikian keadaan mati selalu didahului oleh keadaan hidup. Dengan kata lain, mati tidak pernah ada kalau tidak ada kehidupan. Sedangkan hidup selalu dimulai dengan lahir hidup (*live birth*).

Pengaruh *mortalitas* adalah mengurangi jumlah penduduk suatu daerah. Peristiwa kematian dapat terjadi pada semua penduduk baik laki-laki, perempuan, usia bayi, usia anak, usia dewasa dan tua. Besar kecilnya *mortalitas* menurut karakteristik tersebut beragam. Keragaman tersebut menyebabkan perubahan dalam struktur umur penduduk suatu wilayah ataupun komposisi penduduk menurut jenis kelamin (Sumantri dan Anwar, 1995). Berbeda dengan *fertilitas* dan migrasi yang dapat berulang kali terjadi dalam sepanjang hidupnya. Tetapi mortalitas hanya sekali terjadi serangkaian peristiwa penyakit atau kesakitan atau morbiditas.

Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate = IMR*) menunjukkan jumlah bayi yang meninggal selama setahun untuk 1000 kelahiran. Angka atau tingkat kematian bayi merupakan ukuran kematian yang mengacu pada jumlah bayi yang meninggal dari bayi yang lahir hidup. Bayi lahir hidup yang dimasud adalah janin yang keluar dari rahim ibu dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan meskipun hanya sekejap. Bayi didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 0 tahun atau belum mencapai ulang tahun yang pertama.

Terdapat variasi tingkat kematian bayi antara negara berkembang dan negara maju. Pada negara-negara berkembang, tingkat kematian bayi bisa mencapai 200 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan di negara-negara maju angka tersebut bisa di bawah 15 per 1000 kelahiran (Budi Utomo, 1983). Demikian juga terdapat variasi angka kematian bayi di dalam suatu negara, misalnya antara daerah geografi yang satu dengan lainnya, antara kota dengan desa, antara berbagai golongan sosial ekonomi penduduk. Di samping itu angka kematian bayi pada suatu tempat juga bervariasi menurut waktu.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang sangat berguna, tidak saja terhadap status kesehatan anak, tetapi juga terhadap status penduduk keseluruhan dan kondisi ekonomi di mana penduduk tersebut bertempat tinggal. Angka kematian bayi tidak hanya merefleksikan besarnya masalah kesehatan yang bertanggungjawab langsung terhadap kematian bayi, seperti diare, infeksi saluran pernafasan, salah gizi, penyakit-penyakit infeksi spesifik dan kondisi prenatal, tetapi juga merefleksikan

tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan dan secara umum tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Baik di negara maju, maupun di negara yang sedang berkembang, terdapat hubungan yang terbalik antara tingkat kematian bayi dengan status ekonomi orang tua.

Angka kematian bayi juga telah menunjukkan fungsinya sebagai indikator ampuh dalam menilai perubahan kondisi kesehatan di suatu negara. Beda negara-negara di mana angka kematian bayi telah dihitung selama periode yang lama, terlihat reduksi angka kematian bayi sejajar dengan perbaikan standar hidup dan kondisi sanitasi termasuk juga kemudahan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat.

Angka kematian bayi Kabupaten Sleman telah berada pada angka yang sangat rendah, sebagaimana terjadi di negara maju, yakni pada angka di bawah 10 kematian dari 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan tabel 4.1 berikut terlihat angka kematian bayi di Kabupaten Sleman sangat rendah yaitu 4 (empat) orang per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi berada di bawah 5 (lima) yang telah dicapai sejak tahun 2012, hanya dicapai oleh negara maju di Eropa dan Amerika. Beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman terlaporkan tidak memiliki kasus kematian bayi. Kecamatan Cangkringan, Seyegan dan Prambanan merupakan tiga kecamatan dengan angka kematian bayi tertinggi di Kabupaten Sleman itupun nilai angka kematian bayi masih jauh dibawah nasional yang menyentuh angka 11 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi laki-laki lebih tinggi (5 orang per 1.000 kelahiran hidup) dibandingkan dengan kematian bayi perempuan (3 orang per 1.000 kelahiran hidup). Meskipun angka kematian bayi di Kabupaten Sleman dan disetiap kecamatan relatif rendah, namun merujuk tujuan kesehatan SDG's adalah kesehatan bagi semua umur, maka kondisi ini perlu mendapatkan perhatian. Angka kematian bayi di Kabupaten Sleman lebih disebabkan karena BBLR. Posisi di Kabupaten Sleman sudah mencapai "*hardrock*" atau angka kematian yang sangat kecil sehingga sulit untuk diturunkan karena dipengaruhi oleh faktor yang sangat sulit dikendalikan yaitu faktor genetik. Namun demikian upaya cakupan pelayanan kesehatan yang disertai dengan peningkatan mutu pelayanan, sistem rujukan yang optimal, serta peningkatkan kompetensi sumberdaya manusia pelayanan neonatal dan bayi harus tetap dilakukan dalam upaya menekan angka kematian bayi.

Tabel 4.1. Distribusi Angka Kematian Bayi menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup			Jumlah Kematian Bayi			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	TOTAL
1.	Gamping	648	538	1.186	4	5	9	6,17	9,29	7,59
2.	Godean	473	402	875	1	0	1	2,11	0	1,14
3.	Moyudan	166	154	320	0	0	0	0	0	0
4.	Minggir	225	247	472	1	2	3	4,44	8,10	6,36
5.	Seyegan	286	290	576	5	0	5	17,48	0	8,68
6.	Mlati	520	487	1.007	2	0	2	3,85	0	1,99
7.	Depok	702	744	1.446	3	1	4	4,27	1,34	2,77
8.	Berbah	323	454	777	0	0	0	0	0	0
9.	Prambanan	370	375	745	4	2	6	10,81	5,33	8,05
10.	Kalasan	407	337	744	0	2	2	0	5,93	2,69
11.	Ngemplak	394	394	788	2	3	5	5,08	7,61	6,35
12.	Ngaglik	600	673	1.273	3	1	4	5	1,49	3,14
13.	Sleman	372	349	721	2	1	3	5,38	2,87	4,16
14.	Tempel	333	357	690	2	0	2	6,01	0	2,90
15.	Turi	220	220	440	1	1	2	4,55	4,55	4,55
16.	Pakem	224	213	437	3	0	3	13,39	0	6,86
17.	Cangkringan	189	185	374	2	2	4	10,58	10,81	10,70
KABUPATEN SLEMAN		6.452	6.419	12.871	35	20	55	5,42	3,12	4,27

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2020

Angka kematian bayi dalam pembahasan ini dibedakan menjadi dua yaitu angka kematian neonatal dan angka kematian post neonatal. Angka kematian neonatal merupakan kematian bayi sebelum berumur satu bulan tetapi kurang dari satu tahun, sedangkan yang dimaksud dengan kematian lepas baru lahir atau *post neo natal death* merupakan kematian bayi setelah berumur satu bulan tetapi kurang dari satu tahun.

Tabel 4.2. Distribusi Kematian Neonatal menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup			Jumlah Kematian Neo-natal			Angka Kematian Neo Natal
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1.	Gamping	648	538	1.186	5	1	6	5,06
2.	Godean	473	402	875	2	4	6	6,86
3.	Moyudan	166	154	320	0	0	0	0,00
4.	Minggir	225	247	472	0	0	0	0,00
5.	Seyegan	286	290	576	1	0	1	1,74

6.	Mlati	520	487	1.007	2	0	2	1,99
7.	Depok	702	744	1.446	1	0	1	0,69
8.	Berbah	323	454	777	0	0	0	0,00
9.	Prambanan	370	375	745	2	3	5	6,71
10.	Kalasan	407	337	744	0	0	0	0,00
11.	Ngemplak	394	394	788	2	1	3	3,81
12.	Ngaglik	600	673	1.273	2	2	4	3,14
13.	Sleman	372	349	721	1	1	2	2,77
14.	Tempel	333	357	690	0	2	2	2,90
15.	Turi	220	220	440	3	1	4	9,09
16.	Pakem	224	213	437	2	1	3	6,86
17.	Cangkringan	189	185	374	3	2	5	13,37
KABUPATEN SLEMAN		6.452	6.419	12.871	26	18	44	3,42

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2020

Kematian neonatal pada umumnya dikarenakan *asfiksia* atau kondisi yang terjadi ketika bayi kekurangan oksigen sebelum, selama, dan setelah proses persalinan. Tanpa asupan oksigen yang cukup, jaringan dan organ tubuh bayi akan mengalami kerusakan. Bayi yang mengalami *asfiksia* bisa mengalami *sianosis* atau kondisi kuku, biru, dan bibir tampak kebiruan. Kondisi ini membutuhkan penanganan medis segera, karena semakin lama bayi tidak mendapatkan cukup oksigen, akan semakin besar pula risikonya mengalami kerusakan pada organ, seperti paru-paru, jantung, otak, dan ginjal. Penting bagi ibu hamil untuk rutin menjalani pemeriksaan kehamilan dengan USG agar kondisi kesehatan janin dapat terpantau dengan baik. mengkonsumsi makanan bernutrisi selama hamil sangat dianjurkan untuk meminimalkan resiko tersebut.

Tabel 4.3. Distribusi Kematian Post-Neonatal menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020

No.	Kecamatan	Kehairan Hidup			Kematian Post-Neonatal (Usia 1 Bulan - < 1 Tahun)			Post-Neonatal
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1.	Gamping	648	538	1.186	4	1	5	4,22
2.	Godean	473	402	875	1	1	2	2,29
3.	Moyudan	166	154	320	0	0	0	0
4.	Minggir	225	247	472	0	0	0	0
5.	Seyegan	286	290	576	1	0	1	1,74
6.	Mlati	520	487	1.007	0	2	2	1,99
7.	Depok	702	744	1.446	0	0	0	0
8.	Berbah	323	454	777	0	0	0	0
9.	Prambanan	370	375	745	1	0	1	1,34
10.	Kalasan	407	337	744	0	0	0	0

11.	Ngemplak	394	394	788	0	1	1	1,27
12.	Ngaglik	600	673	1.273	0	0	0	0
13.	Sleman	372	349	721	0	1	1	1,39
14.	Tempel	333	357	690	0	0	0	0
15.	Turi	220	220	440	0	0	0	0
16.	Pakem	224	213	437	0	0	0	0
17.	Cangkringan	189	185	374	0	0	0	0
KABUPATEN SLEMAN		6.452	6.419	12.871	7	6	13	1,01

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2020

Berdasarkan tabel 4.2. dan 4.3. terlihat bahwa angka kematian bayi lebih banyak terjadi pada umur dibawah 1 bulan. Banyak sekali faktor yang dapat dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari segi penyebabnya, kematian bayi dibedakan menjadi dua jenis yaitu *endogen* dan *eksogen*. Kematian bayi *endogen* adalah kematian bayi yang disebabkan oleh faktor-faktor anak yang dibawa sejak lahir, diwarisi oleh orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat dari ibunya selama kehamilan. Sedangkan kematian bayi *eksogen* adalah kematian bayi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Perbedaan antara kedua jenis penyebab kematian tersebut idealnya dapat dilakukan melalui data statistik penyebab kematian, tetapi dalam praktek tidak mudah karena masalah kualitas data (United Nations, 1973).

Dengan semakin meningkatnya usia, penyebab kematian *endogen* semakin berkurang dan penyebab kematian *eksogen* meningkat. Sementara semua kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan (*post neonatal*) merupakan kematian *eksogen*, maka kematian *eksogen* pada bayi sebelum usia satu bulan (*neonatal*) besarnya kira-kira 25 persen dari seluruh kematian bayi pada *post neonatal* (Bourgouis Pichat, 1952). Dengan kata lain, jumlah kematian *eksogen* pada bayi adalah 1,25 kali lipat dari kematian bayi pada periode *post neonatal*. Gambaran ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan luar berkontribusi besar sebagai penyebab kematian bayi. Kualitas lingkungan pada bentuk kondisi *hygiene*, sanitasi dan sosial ekonomi akan sangat menentukan terhadap tinggi-rendahnya kematian bayi.

Apabila kematian bayi tinggi, maka rasio kematian bayi *post neonatal* terhadap kematian bayi *neonatal* adalah juga tinggi. Rasio ini menurun dengan semakin rendahnya kematian bayi yang sampai pada suatu saat dengan terkontrolnya faktor lingkungan luar, porsi kematian *neonatal* menjadi lebih dominan. Pada keadaan ini, kematian bayi lebih banyak disebabkan faktor *endogen*, yang pengontrolannya memerlukan kemampuan

untuk menembus pengetahuan tentang masalah-masalah biologi yang lebih mendasar (Keyfitz, 1977). Di Indonesia dan di banyak negara berkembang lainnya, keadaan tersebut masih jauh dari jangkauan.

4.1.2. Angka Kematian Anak dan Balita

Angka kematian anak (*Child Mortality Rate = CMR*) didefinisikan sebagai jumlah kematian anak berumur 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun. Dengan demikian angka kematian anak tidak menyertakan angka kematian bayi. Parameter CMR ini banyak digunakan sebagai indikator keadaan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan yang dimaksud adalah air bersih, kebersihan lingkungan tempat tinggal dan perumahan. Sanitasi udara dan kelembaban dan faktor lainnya yang berkaitan dengan tingginya prevalensi penyakit menular, gizi buruk akibat pola makan yang tidak betul. Jadi CMR lebih ditujukan pada faktor yang mempengaruhi kematian di luar faktor ibu yaitu keadaan lingkungan. Berbeda dengan IMR yang berhubungan dengan keadaan ibu seperti keadaan gizi ibu sebelum kehamilan, pemantauan atau pemeriksaan kehamilan dan penolong kelahiran, pemberian air susu ibu serta makanan tambahan hingga akan mencapai usia kurang dari satu tahun.

Dibandingkan dengan angka kematian bayi, angka kematian anak lebih merefleksikan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka ini tinggi pada keadaan salah gizi, hygiene buruk, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak dan insiden kecelakaan di dalam atau di sekitar rumah. Dalam menunjukkan kemiskinan, indikator ini lebih unggul dibandingkan dengan tingkat kematian bayi.

Sementara itu, tingkat kematian anak balita didefinisikan sebagai jumlah kematian anak usia dibawah lima tahun selama satu tahun per 1000 anak usia yang sama (0-4) tahun pada pertengahan tahun. Angka ini sekaligus merefleksikan tinggi rendahnya angka kematian bayi dan angka kematian anak. Hanya dengan menggunakan angka kematian bayi belum cukup untuk menggambarkan tingkat kematian anak pada umur di atas satu tahun. Dua penduduk dengan tingkat kematian bayi yang sama, belum tentu sama dalam hal angka kematian anak di atas satu tahun. Variasi angka ini, di negara berkembang dapat lebih tinggi dari 100, tetapi di negara maju dapat lebih rendah dari 2 (dua).

Peraturan perundangan No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kesempatan anak Indonesia untuk hidup sehat, tumbuh, dan berkembang secara optimal menjadi semakin terbuka. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial.

Tabel 4.4. menggambarkan bahwa anak-anak di Kabupaten Sleman memiliki derajat kesehatan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari 10.000 anak yang ada (1-5 tahun) hanya terdapat 1 anak yang mengalami kematian. Beberapa wilayah kecamatan tidak memiliki angka kematian anak (Moyudan , Seyegan, Mlati, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan) namun masih ada beberapa kecamatan (Gamping, Godean, Minggri dan Depok) yang memiliki angka kematian anak melebihi angka kematian anak kabupaten. Jika merujuk pada amanah pembangunan keberlanjutan bidang kesehatan, upaya meningkatkan derajat kesehatan anak masih perlu diusahakan meskipun sangat susah untuk menurunkan di angka yang sudah rendah.

Tabel 4.4. Distribusi Angka Kematian Anak menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020

No.	Kecamatan	Penduduk Usia 0-4 Tahun Semester I Tahun 2020			Kematian Anak (Usia 1 ≤ 5 Tahun)			Angka Kematian Anak
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Gamping	2.887	2.731	5.618	2	1	3	0,53
2	Godean	2.040	1.937	3.977	1	0	1	0,25
3	Moyudan	941	836	1.777	0	0	0	0
4	Minggir	853	863	1.716	0	1	1	0,58
5	Seyegan	1.560	1.439	2.999	0	0	0	0
6	Mlati	2.895	2.710	5.605	0	0	0	0
7	Depok	3.755	3.619	7.374	0	1	1	0,14
8	Berbah	1.733	1.594	3.327	0	0	0	0
9	Prambanan	1.701	1.625	3.326	0	0	0	0
10	Kalasan	2.560	2.433	4.993	0	0	0	0
11	Ngemplak	2.036	1.876	3.912	0	0	0	0
12	Ngaglik	3.146	2.947	6.093	0	0	0	0
13	Sleman	2.184	2.066	4.250	0	0	0	0
14	Tempel	1.631	1.551	3.182	0	0	0	0
15	Turi	1.153	1.049	2.202	0	0	0	0
16	Pakem	1.098	1.102	2.200	0	0	0	0
17	Cangkringan	994	922	1.916	0	0	0	0
KABUPATEN SLEMAN		33.167	31.300	64.467	3	3	6	0,09

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2020

Berbeda dengan angka kematian anak, angka kematian balita terlihat lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena angka kematian balita mengikutkan kelompok 0 tahun dalam perhitungannya. Sementara itu diketahui bahwa angka kematian 0 tahun atau angka kematian bayi mendominasi dalam perhitungan angka kematian balita. Artinya kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dapat memfokuskan pada faktor *endogen* atau *biomedical* meskipun tetap memperhatikan faktor *eksogen* yaitu sosial ekonomi, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan kependudukan.

Tabel 4.5. Distribusi Angka Kematian Balita menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020

No.	Kecamatan	Penduduk Usia 0-4 Tahun Semester I Tahun 2020			Kematian Balita			Angka Kematian Anak
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Gamping	2.887	2.731	5.618	11	3	14	2,49
2	Godean	2.040	1.937	3.977	4	5	9	2,26
3	Moyudan	941	836	1.777	0	0	0	0
4	Minggir	853	863	1.716	0	1	1	0,58
5	Seyegan	1.560	1.439	2.999	2	0	2	0,67
6	Mlati	2.895	2.710	5.605	2	2	4	0,71
7	Depok	3.755	3.619	7.374	1	1	2	0,27
8	Berbah	1.733	1.594	3.327	0	0	0	0
9	Prambanan	1.701	1.625	3.326	3	3	6	1,80
10	Kalasan	2.560	2.433	4.993	0	0	0	0,00
11	Ngemplak	2.036	1.876	3.912	2	2	4	1,02
12	Ngaglik	3.146	2.947	6.093	2	2	4	0,66
13	Sleman	2.184	2.066	4.250	1	2	3	0,71
14	Tempel	1.631	1.551	3.182	0	2	2	0,63
15	Turi	1.153	1.049	2.202	3	1	4	1,82
16	Pakem	1.098	1.102	2.200	2	1	3	1,36
17	Cangkringan	994	922	1.916	3	2	5	2,61
KABUPATEN SLEMAN		33.167	31.300	64.467	36	27	63	0,98

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2020

Sinkronisasi dan koordinasi program-program antar instansi dan antara pemerintah dan swasta dan lembaga swadaya yang melibatkan peran aktif masyarakat perlu ditingkatkan. Dengan memperhatikan beragamnya faktor-faktor yang menjadi penyebab kematian bayi, anak dan balita, maka kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan anak sangat diperlukan. Kontribusi ini harus diformulasikan sebagai kebijakan kesehatan anak yang menyeluruh dengan

strategi-strategi khusus bagi berbagai tingkat penyedia pelayanan dan berbagai grup sasaran

4.1.3. Angka Kematian Ibu

Angka kematian maternal (*Maternal Mortality Rate = MMR*) menunjukkan jumlah ibu yang meninggal dalam proses melahirkan selama satu tahun terhadap jumlah ibu seluruhnya. Yang dimaksud jumlah ibu meninggal adalah selama dalam kehamilan dan atau dalam proses melahirkan. Ibu hamil yang meninggal karena kecelakaan, bunuh diri atau hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kehamilan dan proses melahirkan tidak dimasukkan dalam perhitungan ini. Oleh sebab itu ukuran ini dinyatakan per 100.000 ibu dan bukan per 1000 ibu karena jumlah kasus dalam setahun relatif kecil.

Menurut Sumantri dan Anwar (1995) kematian maternal merupakan kejadian yang jarang terjadi (*Rare Event*) maka dinyatakan per 100.000 ibu. Namun demikian banyak digunakan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan upaya peningkatan kesehatan, khususnya kesehatan ibu. Menurut WHO (1988) risiko kematian ibu selama hidupnya karena kehamilan atau persalinan adalah 1 per 14 sampai 1 per 50 untuk negara berkembang dibandingkan 1 per 4000 sampai 1 per 10000 di negara maju. Perbedaan angka kematian maternal antara negara maju dan negara sedang berkembang merupakan disparitas antar negara. Masalah-masalah yang menjadi penyebab angka kematian ibu menurut WHO, yaitu pendarahan *postpartum* (setelah melahirkan). Pendarahan secara berlebihan setelah melahirkan yang menyebabkan ibu kehilangan banyak darah. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar, penyebab yang kedua adalah hipertensi. Perawatan dan pemeriksaan prenatal bisa mendeteksi dan menangani masalah, seperti halnya tekanan darah tinggi dan protein dalam urine. Ibu tanpa perawatan yang tepat, akan berkembang menjadi preeklampsia yang menyebabkan kematian jika sudah terlampau parah. Gangguan hipertensi menjadi salah satu penyebab tertinggi kematian ibu terkait dengan kehamilan. Penyebab yang ketiga adalah infeksi. Wanita bisa mengalami infeksi akibat aborsi yang tidak aman, persalinan yang tidak sehat, ataupun persalinan yang sangat lama. Selain itu, kurangnya pemahaman dan informasi mengenai cara membersihkan area kewanitaan ataupun perawatan tubuh setelah melahirkan, dapat membuat ibu berisiko terkena infeksi. Jika infeksi ini tidak mendapat penanganan yang tepat maka kematian ibu bisa saja terjadi.

Tabel 4.6. Distribusi Angka Kematian Ibu menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup			Jumlah Kematian Ibu				Angka Kematian Ibu
		L	P	Jumlah	Hamil	Bersalin	Nifas	Jumlah	
1.	Gamping	648	538	1.186	1	0	0	1	0,84
2.	Godean	473	402	875	0	0	1	1	1,14
3.	Moyudan	166	154	320	0	0	0	0	0,00
4.	Minggir	225	247	472	0	0	0	0	0,00
5.	Seyegan	286	290	576	0	0	0	0	0,00
6.	Mlati	520	487	1.007	0	0	1	1	0,99
7.	Depok	702	744	1.446	1	0	1	2	1,38
8.	Berbah	323	454	777	0	0	0	0	0,00
9.	Prambanan	370	375	745	0	0	1	1	1,34
10.	Kalasan	407	337	744	0	0	0	0	0,00
11.	Ngemplak	394	394	788	0	0	0	0	0,00
12.	Ngaglik	600	673	1.273	0	0	0	0	0,00
13.	Sleman	372	349	721	0	0	0	0	0,00
14.	Tempel	333	357	690	0	0	0	0	0,00
15.	Turi	220	220	440	0	0	0	0	0,00
16.	Pakem	224	213	437	0	1	0	1	2,29
17.	Cangkringan	189	185	374	0	0	1	1	2,67
KABUPATEN SLEMAN		6.452	6.419	12.871	2	1	5	8	0,62

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2020

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Sleman sangat rendah yaitu 5 sampai 6 orang setiap 10.000 ibu yang melakukan persalinan. Beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman tidak memiliki kasus angka kematian ibu karena melahirkan, namun kecamatan yang memiliki kasus kematian ibu terbaca per 1000 ibu yang melakukan persalinan.

Kecamatan Cangkringan memiliki kasus 1 orang ibu yang mengalami kematian ibu karena melahirkan atau terdapat 2 sampai 3 ibu setiap 1000 ibu yang melakukan persalinan. Angka tersebut sangatlah rendah, namun tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah *zero accident*. Secara keseluruhan dalam penjabaran tentang angka kematian, dapat disimpulkan bahwa derajat kesehatan penduduk Kabupaten Sleman sangatlah baik. Upaya yang harus dilakukan adalah mempertahankan angka yang sudah terlalu rendah dan diusahakan mencapai titik nol. Visi Kemenkes adalah mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong

royong akan terwujud dengan memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan dan meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan.

4.1.2 Fertilitas

Fertilitas merupakan salah satu proses demografi yang akan mempengaruhi jumlah dan pertumbuhan penduduk. Menurut Shryock dan Siegel (1976) istilah *fertilitas* adalah sama dengan kelahiran hidup (*live birth*), yaitu bayi yang dilahirkan dengan tanda-tanda kehidupan, misalnya menangis, bergerak-gerak, dan jantung berdenyut. Bilamana pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan disebut dengan lahir mati (*still birth*). Dalam studi kependudukan lahir mati tidak dianggap atau tidak dihitung sebagai suatu peristiwa kelahiran. Dengan demikian, pengukuran fertilitas hanya didasarkan pada peristiwa lahir hidup dan lahir mati tidak diikutkan dalam perhitungan.

Pengukuran *fertilitas* lebih kompleks dari pada *mortalitas*, karena perempuan maupun laki-laki hanya akan meninggal satu kali saja, akan tetapi perempuan tersebut dapat melahirkan lebih dari satu kali. Risiko meninggal hanya sekali peristiwa terjadi pada hari atau waktu tertentu saja, yang telah meninggal tidak akan meninggal lagi. Sebaliknya seorang perempuan yang telah melahirkan seorang anak tidak berarti tidak ada risiko untuk melahirkan lagi. Kompleksitas pengukuran fertilitas karena melibatkan dua orang (suami-istri), sedangkan mortalitas hanya melibatkan satu orang yang meninggal.

Fertilitas dalam kajian ini dihitung berdasarkan data registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Perhitungan fertilitas yang paling mendasar adalah angka kelahiran kasar. Berdasarkan tabel 4.7 berikut ini menunjukkan bahwa setiap 1000 penduduk di Kabupaten Sleman terdapat 12 sampai 13 kelahiran. Angka kelahiran kasar tertinggi di Kecamatan Ngaglik, Minggir, dan Berbah.

Tabel 4.7. Distribusi Parameter Kelahiran di Kabupaten Sleman Tahun 2020

Kecamatan	CBR	TFR	GFR	CWR
Gamping	12,64	1,64	48,66	24,05
Godean	12,49	1,62	49,44	23,06
Moyudan	9,50	1,20	39,83	23,28
Minggir	14,48	1,89	60,94	23,03
Seyegan	11,28	1,45	44,82	24,26
Mlati	10,92	1,40	41,95	24,15
Depok	11,80	1,52	44,60	23,54
Berbah	14,15	1,84	53,37	13,22
Prambanan	13,80	1,80	54,40	25,15
Kalasan	9,01	1,14	34,13	23,93
Ngemplak	12,58	1,63	48,99	24,87
Ngaglik	23,85	3,18	49,41	24,41
Sleman	10,36	1,32	40,16	24,56
Tempel	12,67	1,64	50,27	23,95
Turi	11,79	1,52	46,48	23,82
Pakem	11,61	1,50	46,00	23,96
Cangkringan	11,93	1,54	47,12	25,73
Jumlah	12,49	1,62	48,49	24,05

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2020

Rendahnya angka *fertilitas* ini juga terlihat dari angka kelahiran umum atau sering disebut dengan GFR (*Gross Fertility Rate*). GFR merupakan jumlah kelahiran per 1000 perempuan umur 15-49 tahun. Berdasarkan tabel parameter fertilitas terlihat bahwa setiap 1000 perempuan umur 15-49 tahun terdapat 48 kelahiran hidup. Distribusi GFR tidak pernah diatas 60 dan dibawah 40.

Ukuran *fertilitas* yang lain adalah rasio anak dengan jumlah perempuan 15-49 tahun. Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa setiap 100 perempuan umur 15-49 tahun terdapat 24 atau 25 anak. Rasio anak dan perempuan umur 15-49 tahun terendah di Kecamatan Berbah yaitu sebesar 13,22.

Kebijakan pengaturan jumlah kelahiran penduduk dengan keluarga berencana telah dijalankan di DIY termasuk Kabupaten Sleman sudah dimulai sejak awal program KB digulirkan. Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori wilayah Jawa-Bali I yaitu sejak awal program KB sudah menjalankannya. Indonesia telah melakukan upaya pengendalian angka kelahiran melalui Program Keluarga Berencana (KB) sejak era

1970-an. Program KB telah berhasil menurunkan jumlah anak per satu perempuan hampir setengahnya dalam waktu yang relatif singkat. Program KB di Indonesia menjadi salah satu program *family planning* terbaik di dunia dan merupakan program perencanaan keluarga berbasis komunitas terbesar di dunia. Dampak positif program KB secara nyata telah dirasakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB memberikan dampak positif pada tiga hal pokok, yaitu: (1) Secara umum, meningkatkan investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia karena beban penduduk muda menjadi berkurang; (2) Secara khusus, meningkatkan kualitas hidup perempuan, keluarga dan masyarakat, dan (3) Meningkatkan produktivitas ekonomi yang tercermin dari peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Program KB secara tidak langsung juga telah berhasil memperbaiki tingkat kesehatan dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa).

Program KB sangat berdampak secara signifikan menurunkan tingkat *fertilitas* di Kabupaten Sleman. Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui tingkat *fertilitas* di Kabupaten Sleman sudah sangat rendah meskipun di beberapa kecamatan terdapat nilai diatas kabupaten. Tingkat *fertilitas* di Kabupaten Sleman juga berada pada titik yang sangat rendah sehingga upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mempertahankan nilai tersebut, dan seandainya memungkinkan ditingkatkan menjadi 2,1 untuk total fertilitasnya. Kebijakan mempertahankan nilai *fertilitas* lebih sulit dibandingkan dengan upaya menurunkannya karena *fertilitas* sangat dipengaruhi oleh faktor individu.

Mengacu pada dokumen *Grand Design Pembangunan Kependudukan* (GDPK) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2035 dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan dalam hal ini adalah kuantitas penduduk adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS), adalah angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1 per perempuan atau *Net Reproduction Rate* (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1 per perempuan (Tukiran, 2010).

Pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) merupakan harapan kondisi kependudukan setiap daerah baik pada level negara ataupun level yang lebih kecil. Kondisi tersebut ditandai dengan jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang)

dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner dan kondisinya terus stabil seperti itu (Iskandar, 1977; Swanson and Siegel, 2004; Tukiran, 2010). Capaian penduduk tumbuh seimbang juga ditandai dengan Rendahnya nilai TFR yang berada pada angka 2,1 dan NRR sebesar 1 (Tukiran, 2010). Dengan menggunakan indikator tersebut sebenarnya TFR dan NRR Kabupaten Sleman telah memenuhi target.

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari DIY yang memiliki TFR yang sudah rendah. Meskipun demikian pada tahun 2035 Kabupaten Sleman tetap menargetkan TFR yang lebih rendah lagi yaitu sebesar 1,7. Salah satu aspek yang mendukung penurunan tersebut adalah adanya program keluarga berencana yang gencar diterapkan di Sleman. Seperti diketahui bahwa di negara-negara maju TFR yang rendah akan menciptakan kemajuan. Di negara maju TFR mencapai 1,5 per wanita atau bahkan nilai TFR nya lebih rendah dari 1 per wanita. Hal ini dikarenakan penduduk yang terus menurun akibat *fertilitas* yang sangat rendah akan mengakibatkan proporsi produktif sangat banyak. Dengan kondisi ini maka akan dapat tercipta bonus demografi (*demographic dividend*), yang muaranya adalah kondisi kesejahteraan akan terwujud.

4.1.4. Keluarga Berencana

Menurut Davis dan Blake (1956), ada 11 variabel yang termasuk dalam variabel antara (faktor langsung/*intermediate variable*) selain faktor tidak langsung (demografi, sosial, ekonomi, program, norma) yang mempengaruhi *fertilitas*, yaitu: umur pertama melakukan hubungan seksual, selibat permanen (tidak menikah), lamanya berstatus kawin, abstinensi sukarela, abstinensi terpaksa, frekuensi senggama, infekunditas sengaja, pemakaian kontrasepsi, infekunditas tidak disengaja dan *mortalitas* janin disengaja. Persepsi atau norma masyarakat tentang keluarga berencana sangat mempengaruhi keputusan pasangan suami isteri dalam memutuskan menggunakan kontrasepsi.

Salah satu parameter keluarga berencana yaitu kepesertaan KB atau disebut juga dengan prevalensi kontrasepsi. Berdasarkan tabel 4.8. terlihat bahwa prevalensi kontrasepsi di Kabupaten Sleman sudah sangat tinggi yaitu sebesar 77 persen yang berarti setiap 100 Pasangan Usia Subur (PUS) maka 77 diantaranya menggunakan salah satu metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang dimaksud adalah metode kontrasepsi modern baik yang bersifat jangka panjang maupun tidak.

Tabel 4.8. Parameter Keluarga Berencana menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020

No.	Kecamatan	Peserta Aktif (PA) terhadap PUS	PA pemerintah	PA Swasta	Unmet Need terhadap PUS
1	GAMPING	79,22	32,23	67,77	7,50
2	GODEAN	77,38	29,39	70,61	8,45
3	MOYUDAN	77,16	30,86	69,14	6,63
4	MINGGIR	70,97	39,32	60,68	6,51
5	SEYEGAN	78,43	34,41	65,59	8,22
6	MLATI	77,67	39,03	60,97	8,41
7	DEPOK	76,50	25,70	74,30	8,41
8	BERBAH	78,29	30,80	69,20	6,67
9	PRAMBANAN	78,08	26,83	73,17	7,00
10	KALASAN	78,31	36,15	63,85	6,27
11	NGEMPLAK	78,59	45,57	54,43	6,98
12	NGAGLIK	75,35	27,95	72,05	7,58
13	SLEMAN	76,62	37,41	62,59	10,85
14	TEMPEL	76,85	30,21	69,79	8,11
15	TURI	79,05	39,24	60,76	8,70
16	PAKEM	75,95	35,72	64,28	8,55
17	CANGKRINGAN	77,23	52,01	47,99	9,80
JUMLAH		77,34	33,77	66,23	7,95

Sumber: Dinas P3AP2KB Sleman, 2020

Kecamatan Minggir dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Sleman memiliki angka prevalensi kontrasepsi terendah yaitu 70 persen. Namun tingkat fertilitas di Kecamatan Minggir sudah sangat rendah sehingga seyogyanya kebijakan kependudukan tidak diarahkan pada peningkatan peserta KB aktif namun lebih pada peningkatan kualitas metode kontrasepsi yang digunakan seperti pada penggunaan metode kontrasepsi mantap. Kebijakan ini juga relevan untuk wilayah kecamatan lain yang sudah memiliki tingkat prevalensi kontrasepsi tinggi.

Melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) program keluarga berencana yang mengatur norma keluarga kecil bahagia sejahtera dapat tertanam di masyarakat. Pasangan Usia Subur (PUS) sadar akan arti penting melakukan pengaturan dan pengendalian kelahiran melalui pemakaian alat kontrasepsi. Sebagian besar pasangan usia subur secara sukarela memilih menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah dan mengatur kehamilan. Jenis alat kontrasepsi meliputi pil, suntik, implant, IUD, MOW, MOW dan implant.

Tabel 4.8. diatas menjelaskan bahwa sebagian besar PUS di Kabupaten Sleman lebih memilih pelayanan swasta (66,23 persen) untuk memenuhi kebutuhan kontrasepsi dibandingkan dengan pelayanan pemerintah (33,77 persen). Sebanyak 66,23 persen PUS di Kabupaten Sleman menggunakan pelayanan swasta untuk memenuhi kebutuhan kontrasepsinya, bahkan di Kecamatan Ngaglik, Prambanan, Depok dan Godean berada diatas 70 persen. Terdapat dua kecamatan dengan persentase dibawah 60 yaitu Kecamatan Cangkringan dan Ngemplak dengan persentase masing-masing sebesar 47,99 persen dan 54,43 persen. Hal ini bisa saja dipengaruhi semakin berkurangnya penyediaan alat kontrasepsi secara gratis oleh pemerintah pada fasilitas kesehatan milik pemerintah. Selain itu, bisa juga dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang belum sama antara penyedia layanan pemerintah dengan swasta. Dalam beberapa studi mengenai akses layanan ber KB, seperti yang ditemukan oleh Widyaningrum (2005) yang menyebutkan bahwa mutu layanan jaringan pemerintah lebih rendah dibandingkan dengan swasta. Sebagian pengguna layanan akhirnya memutuskan untuk menggunakan layanan swasta dalam ber KB dengan pertimbangan kualitas layanan, keramahan petugas, meski dari sisi biaya lebih mahal. Pengguna layanan swasta mengaku merasa aman dan nyaman ketika menggunakan layanan swasta. Indikasi lainnya adalah ketidaksesuaian antara waktu pelayanan pemerintah dengan kebutuhan.

Jika kenyamanan dan keamanan menjadi alasan PUS menggunakan pelayanan swasta, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas alat kontrasepsi yang diberikan pada masyarakat. Kusumaningrum (2009) menyatakan pengetahuan tentang alat kontrasepsi mempengaruhi pemilihan terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang akan digunakan. Angriani (2019) lebih lanjut menyatakan alasan pemilihan alat kontrasepsi adalah manfaat, kenyamanan, kemudahan, dan biaya.

Kekhawatiran kegagalan, efek samping suatu jenis alat kontrasepsi terhadap kesehatan, larangan dari pasangan atau suami, ketidaknyamanan, biaya yang harus dikeluarkan, tidak ingin repot, hingga pengalaman subjektif bahwa selama ini tanpa alat kontrasepsi pun tidak terjadi kehamilan menyebabkan pasangan usia subur tidak bersedia menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka tidak menginginkan kehamilan. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan *unmet need* atau kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi. *Unmet need* dapat disebabkan karena ketersediaan alat kontrasepsi tidak sesuai dengan yang diinginkan sehingga masyarakat

berkeinginan menggunakan alat kontrasepsi atau alat kontrasepsi tersedia namun masyarakat khawatir akan efek samping alat kontrasepsi.

“*Unmet Need*” atau kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dapat digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pelayanan program KB telah memenuhi keperluan mereka yang membutuhkan. Angka *unmet need* merupakan persentase wanita kawin yang sedang tidak memakai alat/cara KB dan tidak ingin punya anak lagi atau ingin menunda kelahiran berikutnya. Wanita yang memerlukan alat/cara KB untuk menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan alat/cara KB (*unmet need for spacing*) mencakup wanita hamil yang kandungannya tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*) pada waktu itu, wanita yang belum mulai haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*) pada waktu itu, dan wanita yang tidak sedang hamil atau sudah mulai haid setelah melahirkan yang tidak menggunakan alat/cara KB dan ingin menunda kelahiran anak berikutnya dua tahun atau lebih. Wanita yang memerlukan KB untuk membatasi kelahiran (*unmet need for limiting*) mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan, dan wanita yang tidak hamil dan sudah mulai haid tetapi tidak memakai alat/cara KB namun tidak ingin anak lagi.

Terdapat tiga pendekatan dalam pengukuran kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini yaitu pendekatan istri, suami, dan pasangan. Pendekatan yang selama ini digunakan adalah pendekatan istri. Dalam konsep tersebut, perempuan menikah yang masih dalam usia subur, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi dikatakan terpenuhi kebutuhannya, padahal perempuan tersebut sudah tidak ingin mempunyai anak lagi, atau bermaksud mengatur jarak kelahiran. Dalam perkembangannya pendekatan yang digunakan untuk mengukur kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi adalah pendekatan suami pendekatan pasangan. Dalam konsep ini memandang kebutuhan kontrasepsi tidak terbatas pada perempuan saja, namun menyertakan persoalan penggunaan kontrasepsi pada laki-laki, dan pada pasangan usia subur. Pendekatan pasangan mengukur kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi pada keduanya, baik suami maupun istri.

Pasangan usia subur dengan kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini selanjutnya menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam suatu wilayah. Untuk itu, wilayah tersebut akan berusaha untuk menurunkan angka kebutuhan kontrasepsi tidak

terpenuhi ini. Upaya penurunan angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini merupakan strategi yang cocok sebagai upaya pencapaian program keluarga berencana. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang termasuk angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi di suatu daerah, maka angka kelahiran dengan kehamilan pada waktu yang tidak diinginkan di daerah tersebut dapat dipastikan menjadi tinggi. Sehingga menyebabkan tingginya angka aborsi, dan angka kematian ibu (Ashford, 2003).

Unmet need Kabupaten Sleman 7,95 terendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Yogyakarta. Namun demikian jumlah yang tidak ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi dibandingkan dengan PUS yang tidak menggunakan kontrasepsi cukup besar yakni mencapai 43 persen, bahkan di Kecamatan mencapai 51 persen.

Fenomena *unmet need* KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan. Secara umum, *unmet need* KB banyak terjadi pada perempuan yang menghadapi hambatan keuangan, pendidikan, geografis, dan sosial. Kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan menjadi penyebab tingginya *unmet need*, tetapi wilayah lain dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memadai juga memiliki tingkat *unmet need* yang tinggi. Faktor yang melatarbelakangi kedua hal tersebut jelas berbeda. Pendidikan dan kondisi ekonomi merupakan variabel penting untuk menjelaskannya. Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping. Oleh sebab itu, gerakan meniadakan *unmet need* KB harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Setidaknya, akses tempat pelayanan KB harus menjangkau ke seluruh PUS sasaran dan kualitas pelayanannya harus sesuai dengan harapan masyarakat.

Hal penting lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah memperkuat advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB. Kegiatan advokasi KIE KB yang melibatkan Penyuluhan KB dan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (PPKBD, Sub PPKBD, Pok KB dan KB KS) maupun kader kesehatan lainnya selain harus menjangkau seluruh *unmet need* KB, juga harus mampu menjawab berbagai kegalauan PUS yang belum ber-KB karena alasan agama, tradisi dan budaya. Termasuk mampu meyakinkan mereka bahwa menggunakan kontrasepsi modern itu sangat bermanfaat bagi keluarga dalam perencanaan masa depannya untuk mencapai keluarga berkualitas (bahagia dan

sejahtera). Kader IMP sekarang ini mempunyai 6 peran dalam rangka ikut mensukseskan program KB, yang kemudian dikenal Istilah, "Enam Peran Bakti". Keenam peran bakti institusi tersebut adalah : Pengorganisasian, Pertemuan, KIE, dan Konseling, Pencatatan Pendataan, Pelayanan Kegiatan, dan Kemandirian. Dengan enam peran baktinya, kader IMP telah menjangkau seluruh aspek, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. IMP melakukan kegiatan penyuluhan, motivasi dan Konseling Program KB. Mendorong peningkatan kesertaan dalam ber KB yang semakin mandiri dan lestari. Dengan enam peran bakti yang dimainkan, dapat diketahui bahwa IMP memiliki kedudukan yang strategis dalam pengembangan program KB di wilayahnya masing-masing.

4.1.4. Pernikahan, Talak, Rujuk

Perkawinan menurut Undang-Undang adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri, bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah pada tahun 2019 mengeluarkan peraturan memperbaiki syarat pernikahan. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperbarui dengan Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia wali nikah dapat dibagi menjadi 2, yaitu wali nasab dan wali hakim.

- a. Wali nasab yaitu nasab adalah wali nikah dari pengantin perempuan yang berasal dari keluarganya. Wali nasab bisa bapak kandung, saudara kandung, saudara yang satu bapak, keponakan kandung, keponakan yang satu bapak, saudara kandung dari bapak atau paman, saudara sebapak dari bapak (paman), sepupu dari saudara laki-laki bapak sekandung atau saudara laki-laki sebapak, dan seterusnya keatas dan kebawah.
- b. Wali hakim, adalah wali nikah yang mewakilkan keluarga karena alasan tertentu yang tidak berasal dari keluarga, dalam hal ini dari pihak yang berwenang mengurus pernikahan yaitu kementerian agama. Dengan syarat pengantin wanita sama sekali tidak memiliki wali nasab atau dalam kondisi wali nasab tidak dapat hadir karena jauh, sedang haji atau berada dalam tempat yang tidak bisa ditemui.

Berdasarkan Tabel 4.9. terlihat bahwa sebagian besar (92,71 persen) pernikahan di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 menggunakan wali nasab. Sementara itu, hanya terdapat 7,28 persen pernikahan di Kabupaten Sleman yang menggunakan wali hakim. Kecamatan Depok merupakan kecamatan dengan jumlah pernikahan dengan wali nasab terbanyak di Kabupaten Sleman (816). Dalam bahasa Arab, nasab berarti keturunan atau kerabat, yaitu pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Nasab adalah pertalian kekeluargaan yang didasarkan pada akad perkawinan yang sah. Dalam ajaran fikih Islam, seorang anak bernaasab kepada ayahnya.

Tabel 4.9. Distribusi Pernikahan, Wali Nikah, Cerai, dan Rujuk menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020

No.	KECAMATAN	Wali		Nikah		Dibawah Umur			Cerai	Rujuk
		Nasab	Hakim	Campur	Poligami	L	P	L+P		
1	GAMPING	541	41	0	1	2	9	7	0	0
2	GODEAN	399	27	0	1	1	5	4	0	0
3	MOYUDAN	130	15	0	0	0	2	0	0	0
4	MINGGIR	154	10	0	0	0	0	0	0	0
5	SEYEGAN	289	19	0	1	3	3	6	0	0
6	MLATI	520	36	1	2	7	14	3	0	0
7	DEPOK	816	68	3	0	2	4	6	0	0
8	BERBAH	292	25	0	1	0	7	1	0	0
9	PRAMBANAN	316	19	0	0	3	8	1	0	0
10	KALASAN	433	39	1	1	3	7	0	0	1
11	NGEMPLAK	326	20	1	0	1	7	3	0	0
12	NGAGLIK	594	42	1	1	2	4	1	0	0
13	SLEMAN	423	53	0	0	3	5	5	0	0
14	TEMPEL	322	19	0	1	0	4	3	0	0
15	TURI	246	12	0	0	1	3	3	0	0
16	PAKEM	215	26	1	0	5	4	7	0	0
17	CANGKRINGAN	192	17	0	0	2	6	7	0	0
	SLEMAN	6208	488	8	9	35	92	57	0	1

Sumber: Kantor Kementerian Agama Sleman, 2020

Berdasarkan Tabel 4.9 juga terlihat bahwa kasus poligami di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 cukup tinggi. Pada tahun 2020 dari 17 pernikahan yang tercatat secara Islam ada 9 pernikahan poligami. Catatan kasus poligami 2 terjadi di Kecamatan Mlati. Meski melegalkan poligami, pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia mendukung monogami. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang perkawinan (UUP) tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa seorang pria hanya boleh beristri satu dan sebaliknya.

Tabel 4.9 menjelaskan persoalan sosial yang perlu diperhatikan dalam masyarakat yakni perkawinan usia anak. Undang-Undang Perkawinan baru dalam merevisi UUP tahun 1974 salah satunya tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Artinya pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun masuk dalam kategori pernikahan anak, dan seandainya tetap diselenggarakan karena suatu hal harus melalui jalur dispensasi menikah yang disahkan oleh kantor pengadilan.

Sebanyak 27,56 persen perkawinan usia anak terjadi karena umur laki-laki masih dibawah umur. Sementara itu 72,44 persen perkawinan usia anak karena umur perempuan masih dibawah umur dan sebanyak 44,88 persen pelanggaran keduanya. Undang-undang perkawinan merevisi umur minimal pernikahan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun membuka peluang semakin meningkatnya kasus perkawinan usia anak.

Peran pemerintah daerah baik pada tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa sangat penting. Oleh karena itu, secara berjenjang hendaknya Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan perhatian dan merumuskan kebijakan yang jelas terkait penurunan atau penghilangan perkawinan usia anak. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab mensosialisasikan undang-undang pernikahan baru, namun lebih mengarahkan dampak negatif dari perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak berakibat pada buruknya kondisi perempuan yang menikah muda, seperti resiko terhadap kondisi kesehatannya sebagai dampak dari melahirkan pada usia dini, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk baik pada ibu maupun anak, dan seringkali juga mengakibatkan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka umumnya mengalami kondisi yang buruk dibandingkan dengan perempuan yang menunda usia perkawinannya atau menikah sesuai dengan usia ideal. Ancaman-ancaman tersebut perlu selalu disampaikan kepada remaja agar melakukan perencanaan matang dalam menentukan biduk rumah tangga.

4.1.5. Pendidikan

Investasi sumber daya manusia adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi. Investasi yang demikian disebut dengan *human capital*. Istilah modal manusia (*human capital*) ini dikenal sejak tiga puluh tahun lalu ketika Gary S. Becker, seorang penerima Nobel di bidang ekonomi

membuat sebuah buku yang berjudul *Human*. Dalam ilmu ekonomi, pendidikan, baik formal dan informal, dianggap sebagai salah satu bentuk investasi mutu modal manusia selain kesehatan dan migrasi (Schultz, 1963; Todaro & Smith, 2007). Dengan pendidikan, produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkat sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas tersebut dicerminkan oleh peningkatan pendapatan atau kesejahteraan individu yang melakukan investasi tersebut, sehingga ukuran keberhasilan atau manfaat dari investasi pendidikan adalah melalui peningkatan pendapatan seseorang, walaupun pendapatan yang berasal dari upah/gaji belum tentu merupakan suatu indikator peningkatan produktivitas (Mankiw, 2007). Pendidikan merupakan sebuah investasi sumber daya manusia yang tidak hanya menentukan kesuksesan seorang individu namun juga menentukan kemajuan suatu bangsa. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi pendidikan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Oleh karena itu bidang ini menjadi satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tepatnya Tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. RPJMN 2020-2024 tersebut merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pendidikan menjadi bagian dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari 7 agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Fokus utama pembangunan pendidikan pada RPJMN 2020-2024 masih kepada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur derajat pendidikan suatu wilayah adalah angka partisipasi kasar atau sering disingkat dengan APK. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. Angka partisipasi kasar dapat melebihi 100 karena jumlah siswa jenjang pendidikan tertentu melebih jumlah penduduk pada jenjang pendidikan tersebut. APK di Kabupaten Sleman pada jenjang SD dan SMP memiliki angka di atas 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semua anak usia SD dan SMP sudah bersekolah bahkan terdapat anak yang belum berusia 7 tahun sudah bersekolah di SD.

Tabel 4.10. Angka Partisipasi Kasar SD - SMP Kabupaten Sleman Tahun 2020

No.	Kecamatan	APK SD			APK SMP		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	BERBAH	90,98	85,33	88,27	77,60	99,60	88,59
2	CANGKRINGAN	93,16	93,34	93,25	63,48	56,30	60,00
3	DEPOK	116,28	119,17	117,67	93,95	92,96	93,47
4	GAMPING	100,46	95,51	98,04	95,97	93,17	94,57
5	GODEAN	96,78	100,17	98,40	88,31	103,36	95,66
6	KALASAN	101,86	98,19	100,05	78,40	84,05	81,01
7	MINGGIR	85,30	80,72	82,99	110,53	113,73	112,09
8	MLATI	94,73	94,78	94,76	95,99	94,36	95,20
9	MOYUDAN	90,58	91,12	90,84	143,36	141,40	142,41
10	NGAGLIK	104,87	103,52	104,21	92,47	93,66	93,04
11	NGEMPLAK	89,66	84,55	87,17	88,26	88,69	88,47
12	PAKEM	114,29	112,15	113,28	179,08	167,85	173,48
13	PRAMBANAN	114,32	109,36	111,93	169,32	175,99	172,70
14	SEYEGAN	89,70	66,17	87,96	74,60	68,38	71,64
15	SLEMAN	115,96	115,34	115,66	116,71	119,37	117,98
16	TEMPEL	97,56	93,74	95,70	110,43	106,45	108,50
17	TURI	92,81	92,54	92,68	106,46	98,20	102,51
Jumlah		101,31	99,48	100,41	100,75	102,68	101,69

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2020

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa APK pada jenjang pendidikan SD melebihi angka 100 persen yang menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar kelompok umur 7-12 tahun. Dengan kata lain, murid SD yang bersekolah lebih banyak dibandingkan jumlah anak pada usia 7-12 tahun. Banyak hal bisa menjadi alasan, antara lain beberapa orang tua terkadang mendaftarkan anaknya yang belum mencapai usia 7 tahun langsung ke sekolah dasar tanpa melewati PAUD terlebih dahulu, angka mengulang kelas yang masih tinggi dan sebagainya. Semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APK juga akan semakin rendah. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sudah tidak ada lagi diskriminasi gender dalam memperoleh pendidikan di Indonesia seperti yang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu. Hal ini terlihat dari data APK laki-laki dan perempuan yang hampir sama dan hanya terdapat sedikit perbedaan. Tidak semua perempuan umur 7-12 tahun di Kabupaten Sleman menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Kondisi APK SD yang paling jelek adalah Kecamatan Minggir dengan nilai 83, artinya dari 100 penduduk usia 7-12 tahun di Kecamatan Minggir yang sedang menempuh pendidikan sekolah dasar hanya 83 orang.

Kondisi pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan pertama sedikit lebih baik. Secara umum penduduk umur 13-15 tahun di Kabupaten Sleman telah menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan pertama. Kondisi ini terjadi baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian untuk Kecamatan Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Mlati, Ngaglik, Ngemplak dan Seyegan angka partisipasi kasar SMP belum mencapai 100.

Data pada Tabel 4.10 ini menunjukkan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Sleman, utamanya yang terjadi di beberapa kecamatan perlu mendapatkan perhatian. Sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama merupakan pendidikan dasar yang seharusnya terentaskan untuk Yogyakarta yang memiliki predikat sebagai Kota Pelajar. Amanah pendidikan telah dicanangkan sejak tahun 1994 dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan pada tahun 2006 tekanan tersebut diperkuat dengan diterbitkan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Berdasarkan PP tersebut maka Pendidikan termasuk urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar.

Faktor ekonomi rumah tangga masih memiliki peran penting dalam menentukan tingkat pendidikan seseorang. Mengingat bahwa di Indonesia, pendidikan ‘gratis’ yang sebenarnya belum dapat terlaksana. Walaupun biaya di beberapa jenjang pendidikan sudah mulai ditiadakan, tapi kenyataannya pendidikan memang membutuhkan biaya ekstra seperti biaya untuk seragam, buku pelajaran, perlengkapan alat tulis dan berbagai penunjang lain. Biaya tersebut turut berpengaruh terhadap kesempatan mengenyam pendidikan anggota rumah tangga. Ketika perekonomian rumah tangga tersendat, seringkali kebutuhan pendidikan bukan lagi menjadi prioritas. Apalagi ketika biaya kebutuhan sehari-hari meningkat, rumah tangga dengan ekonomi rendah akan semakin sulit memenuhi biaya pendidikan anggota rumah tangganya. Tinggi rendahnya status ekonomi rumah tangga dapat berpengaruh pada proses pendidikan seseorang.

Bappenas (2009) menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka partisipasi kasar adalah kemiskinan. Pengaruh kemiskinan terhadap APK adalah negatif, artinya semakin penduduk terjebak dalam kemiskinan maka angka partisipasi kasarnya rendah. Kemiskinan menyebabkan beberapa anak tidak mampu mengakses sekolah karena tidak memiliki waktu cukup untuk belajar karena tekanan ekonomi. Biaya pendidikan dasar dengan adanya regulasi Wajar 9 tahun menjadi tanggung jawab pemerintah atau tidak berbayar. Aksesibilitas fasilitas pendidikan bisa juga dipengaruhi oleh derajat kesehatan anak sehingga mereka tidak memungkinkan untuk sekolah. Beberapa faktor ini harus diurai satu persatu sehingga akan terumuskan kebijakan pendidikan yang tepat.

Indikator pendidikan lain adalah minat baca. Pendidikan formal sebagai indikator kualitas pendidikan, namun minat baca yang tinggi mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mampu menguasai dunia. Minat baca yang dimaksud dalam kajian ini adalah minat membaca buku bukan membaca pengetahuan yang ada dalam media sosial. Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perpustakaan di Kabupaten Sleman, pada

tahun 2020 terjadi peningkatan yang luar biasa. Dari 100 masyarakat Sleman sebanyak 57 orang memiliki minat baca. Kondisi ini sangat bagus mengingat membaca adalah jendela dunia,

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Peserta didik diharapkan dapat memfungsikan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi, sehingga pengetahuannya menjadi luas dan berkualitas. Mewujudkan perpustakaan sekolah yang memadai dan sesuai standar perlu diprioritaskan, agar perpustakaan dapat menjadi sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Perpustakaan yang representatif dan didukung dengan koleksi buku yang lengkap, telah memotivasi para pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum untuk memanfaatkan perpustakaan yang ada di Sleman. Data menunjukkan minat baca masyarakat di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 masih dalam kategori rendah, yaitu di bawah 50 persen (14,34 persen). Sementara itu, untuk fasilitas baca Kabupaten Sleman sudah mempunyai fasilitas baca yang cukup banyak dan lengkap. Kabupaten Sleman memiliki 873 perpustakaan dengan koleksi buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah mencapai 34.815 judul buku dengan jumlah eksemplar sebanyak 62.847 eksemplar. Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki 5 armada keliling yang menjangkau 60 lokasi layanan. Jumlah pengunjung perpustakaan berdasarkan data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebanyak 159.952. Selain itu, terdapat juga kantong-kantong perpustakaan yang dikelola oleh desa dan masyarakat setempat. Hingga saat ini Kabupaten Sleman memiliki kantong perpustakaan di 18 lokasi. Pemerintah Kabupaten Sleman juga membentuk rintisan desa gemar membaca di 20 lokasi. Keberadaan perpustakan desa inilah yang hendaknya dapat terus dikembangkan baik melalui penataan manajemen pengelolaan perpustakaan desa, maupun melalui pencanangan berbagai inovasi yang tujuannya adalah menumbuhkembangkan minat baca secara optimal.

4.1.6. Ketenagakerjaan

Dinamika kependudukan di Kabupaten Sleman dilihat dari sisi ketenagakerjaan, pada umumnya adalah tentang perkembangan dari angkatan kerja yang dianggap sebagai sisi penawaran atau penyediaan tenaga kerja, dan perkembangan kesempatan kerja sebagai sisi kebutuhan tenaga kerja. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi

perubahan kedua hal tersebut. Salah satunya adalah perubahan struktur penduduk, yang dalam hal ini ada kaitannya dengan perubahan-perubahan kelahiran, kematian, dan migrasi. Perubahan ketiga komponen tersebut di Kabupaten Sleman telah mengakibatkan rendahnya pertumbuhan penduduk, meskipun secara absolut jumlah penduduk cenderung meningkat. Kecenderungan pertumbuhan penduduk yang semakin rendah, tentunya akan mengakibatkan pula persediaan tenaga kerja yang berkurang. Namun karena jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Sleman masih cukup besar, maka pertumbuhan penduduk rendah yang terjadi belum dapat mempengaruhi berkurangnya jumlah angkatan kerja, ini berarti pertumbuhan angkatan kerja juga relatif masih tinggi.

Permasalahan yang masih ada dan cukup penting untuk diselesaikan dari sisi ketenagakerjaan adalah pertumbuhan angkatan kerja yang relatif masih tinggi tidak diimbangi dengan tingginya pertumbuhan kesempatan kerja. Sebenarnya kondisi penduduk usia produktif yang masih cukup besar di Kabupaten Sleman tidak akan menimbulkan masalah, seandainya daerah ini dapat memperluas dan menyediakan kesempatan kerja. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah bagaimana agar persediaan tenaga kerja dapat seimbang dengan kebutuhan tenaga kerja. Untuk lebih dapat mengetahui bagaimana dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman, pada sub bab berikut dibahas dengan menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tahun 2020.

Sumber daya manusia atau juga sering disebut sebagai *human capital* memiliki dua peran baik sebagai tujuan pembangunan maupun sebagai input pembangunan. Sebagai input pembangunan, kualitas tenaga kerja menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja menjadi faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas-aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia atau tenaga kerja juga menjadi salah satu fokus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY tahun 2020. Tujuannya adalah penyiapan dan ketersediaan SDM atau tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing yang dapat memenuhi permintaan dunia usaha baik di tingkat lokal, nasional hingga pasar global dapat mendukung ketercapaian program pembangunan di pusat maupun di daerah. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara sinergis oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya melalui pendidikan, latihan dan pemagangan. Menurut ILO (*International Labor Organization*) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)

berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dibagi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang tidak bekerja inilah yang disebut pengangguran terbuka.

Tabel 4.11. Distribusi Lapangan Pekerjaan menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020

Kecamatan	% Bekerja	Setengah Pengangguran	% Pengangguran	TPAK
Depok	89,88	23,67	10,12	62,45
Mlati	96,08	17,13	3,92	65,35
Gamping	97,85	25,91	2,15	76,04
Turi	96,06	31,42	3,94	73,51
Sleman	85,35	36,40	14,65	63,93
Tempel	95,59	32,27	4,41	72,93
Seyegan	92,12	27,66	7,88	65,31
Minggir	94,79	35,55	5,21	73,21
Moyudan	94,30	30,14	5,70	69,59
Godean	94,57	40,22	5,43	68,37
Kalasan	92,70	41,62	7,30	74,77
Prambanan	95,86	29,08	4,14	80,44
Berbah	90,90	32,86	9,10	81,12
Ngaglik	91,00	40,76	9,00	78,08
Pakem	97,03	38,54	2,97	76,10
Cangkringan	91,79	39,82	8,21	66,36
Ngemplak	96,17	42,60	3,83	86,80
Kabupaten Sleman	93,41	32,32	6,59	72,17

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Sleman, 2020

Tabel 4.11 menunjukkan 93 persen angkatan kerja telah bekerja, artinya 7 persen penduduk menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Tingginya persentase angkatan kerja yang bekerja ini terjadi disemua kecamatan, yakni diatas 90 persen. Kecamatan Depok dan Kecamatan Sleman merupakan kecamatan yang memiliki persentase dibawah 90 persen. Data tersebut mencerminkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman sangat baik, karena semua angkatan kerja terserap dalam lapangan pekerjaan. Namun demikian, muncul pertanyaan bagaimana dengan kualitas pekerja? Apakah mendapatkan upah yang layak?

Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas tenaga kerja adalah setengah penganggur. Setengah penganggur dapat dilihat melalui 3 aspek yaitu pendidikan, upah dan jam kerja. Pada pembahasan ini setengah penganggur dilihat dari jam kerja yakni dibawah 35 jam per minggu. Berdasarkan tabel 4.11 terlihat 32 persen pekerja bekerja dibawah 35 jam per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 32 dari 100 pekerja belum termanfaatkan secara optimal. Kecamatan Kalasan, Ngaglik dan Ngemplak memiliki sekitar 40 persen pekerja setengah penganggur, sementara itu Kecamatan Mlati merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Sleman yang memiliki angka setengah penganggur dibawah 20 persen. Optimalisasi waktu kerja perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Ukuran ketenagakerjaan lain adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK atau Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) atau *Labour Force Participation Rate* adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (AK) terhadap penduduk usia kerja (PUK) dinyatakan dalam persen. TPAK dapat digunakan untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Tabel 4.11 menunjukkan diantara 100 penduduk usia kerja terdapat 72 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja atau dengan kata lain diantara 100 orang penduduk yang berumur 15 tahun keatas, sebanyak 72 orang yang masuk dalam kelompok angkatan kerja atau 28 orang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang sekolah, ibu rumah tangga, pensiun, dan orang yang mengalami keterbatasan atau cacat. Tabel tersebut juga menjelaskan dari 72 persen tersebut sebanyak 93 persen terserap sebagai pekerja.

Menurut David Turnham (1993) ada enam faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya TPAK yaitu:

1. Jumlah penduduk usia 15 tahun yang masih bersekolah. Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin sedikit jumlah angkatan kerja dan semakin rendah TPAK. Program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun dapat menurunkan nilai TPAK.

2. Jumlah penduduk yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga. Semakin banyak jumlah anggota rumah tangga yang mengurus rumah tangga, maka TPAK makin kecil.
3. Tingkat pendapatan, jumlah tanggungan dari keluarga yang bersangkutan terhadap siapa yang harus bekerja, sekolah dan mengurus rumah tangga. Hasil analisis Standing (1978) menunjukkan bahwa semakin tinggi penghasilan rumah tangga, cenderung membatasi jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Sebagai akibatnya semakin besar pendapatan rumah tangga semakin kecil nilai TPAK. Sebaliknya semakin rendah pendapatan rumah tangga semakin tinggi TPAK.
4. Struktur umur, utamanya usia dewasa 15-59 dan 60. TPAK pada kelompok usia 15-59 cenderung tinggi. Pada sisi lain, kelompok usia 60+ sebagian sudah tidak bekerja lagi dan tidak mencari pekerjaan alias menganggur. TPAK cenderung rendah.
5. Tinggi-rendahnya upah berpengaruh terhadap TPAK. Semakin tinggi upah yang diperoleh dari rumah tangga, semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja sehingga TPAK cenderung tinggi.
6. Tinggi-rendahnya pendidikan berpengaruh terhadap TPAK. Semakin tinggi pendidikan semakin banyak curahan waktu untuk bekerja, terutama bagi perempuan. Dengan pendidikan yang relative tinggi kecenderungan untuk bekerja relatif besar sehingga TPAK semakin tinggi.

Menurut Standing (1978) selain ke enam faktor tersebut, faktor sosial-budaya mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap TPAK. Berdasarkan studi di India, perempuan di negara ini mempunyai kebiasaan bekerja untuk mendapatkan upah selain mengurus rumah tangga. Sebaliknya di kawasan Timur-Tengah sebagian besar hanya mengurus rumah tangga dan jarang yang bekerja. Di kawasan Asia Tenggara, angka partisipasi kerja perempuan cukup tinggi, seperti ditemukan di Thailand, Indonesia, Laos dan Vietnam. Sebaliknya Singapura, Malaysia dan Brunei lebih rendah dibandingkan negara-negara tersebut.

Tabel 4.12. Distribusi Lapangan Pekerjaan menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020

Kecamatan	Pertanian	Manufaktur	Jasa
Depok	1,51	0,50	98,00
Mlati	2,23	0,30	97,47
Gamping	1,40	0,32	98,28
Turi	50,54	0,19	49,27
Sleman	2,09	0,22	97,70
Tempel	14,66	0,13	85,20
Seyegan	4,50	0,18	95,32
Minggir	7,74	0,25	92,00
Moyudan	13,51	0,34	86,15
Godean	3,08	0,41	96,51
Kalasan	6,97	0,44	92,59
Prambanan	17,02	0,07	82,91
Berbah	7,90	0,30	91,80
Ngaglik	7,64	0,27	92,10
Pakem	25,58	0,09	74,32
Cangkringan	48,12	0,07	51,80
Ngemplak	17,16	0,32	82,52
Kabupaten Sleman	10,87	0,28	88,86

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Sleman, 2020

Tabel 4.12. menggambarkan sektor jasa di Kabupaten Sleman memiliki daya tampung melebihi sektor yang lain (diatas 70 persen). Sekitar 89 persen pekerja di Kabupaten Sleman berada pada sektor jasa, dan sekitar 11 persen yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor jasa meliputi perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan perusahaan serta sektor jasa lainnya. Kabupaten Sleman sebagai pusat pertumbuhan perguruan tinggi baik negeri dan swasta telah membuka sektor jasa ikutan yang melayani kebutuhan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi di Kabupaten Sleman bergantung pada sektor jasa.

Besarnya kontribusi sektor jasa saat ini tidak lain adalah wujud dari transformasi ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Perekonomian nasional yang awalnya ditopang oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan) beralih ke sektor sekunder (industri manufaktur), lalu mulai beralih ke sektor tersier (jasa). Sedangkan untuk Kabupaten Sleman langsung mengalami lonjakan dari sektor primer ke sektor tersier. Secara teori fungsi sektor jasa adalah sebagai penghubung antara berbagai

sektor dan konsumen maupun modal. Sekitar 34 persen dari total output sektor jasa di Indonesia digunakan untuk input antara pada sebuah aktivitas produksi dan kontribusi sektor jasa terhadap total input antara mencapai 16 persen (*Indonesia Services Dialogue*, 2018). Selanjutnya transformasi menuju sektor jasa dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor jasa secara langsung dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sebuah negara. Rasio upah terhadap produktivitas pada sektor jasa di Indonesia mencapai angka 40 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan sektor manufaktur yang di bawah 20 persen dan sektor pertanian yang sebesar 30 persen (Tadjoeddin & Chowdhury, 2018).

Terdapat 21 persen pekerja di Kabupaten Sleman masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian, bahkan di Kecamatan Turi dan Cangkringan masih sebesar 50 persen dan 48 persen. Sektor pertanian di Kabupaten Sleman perlu mendapatkan perhatian serius mengingat Kabupaten Sleman sebagai kota jasa yang notabene konversi lahan dari sektor pertanian ke non pertanian sebagai sebuah tuntutan. Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang mempunyai perkembangan yang pesat dan mempunyai daya tarik yang kuat bagi investor. Daya tarik tersebut antara lain yaitu sebagian besar perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kabupaten Sleman, mempunyai udara yang sejuk karena berada di lereng Gunung Merapi, mempunyai kestabilan tanah dan mempunyai air tanah yang berlimpah. Alih fungsi lahan pertanian tumbuh secara pesat di Kabupaten Sleman. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman memperkirakan lahan sawah berkurang sekitar 50 hektar setiap tahun. Kondisi itu terjadi karena area sawah banyak yang beralih fungsi menjadi bangunan. Kegiatan alih fungsi yang masih berlangsung hingga kini secara otomatis memangkas luas lahan sawah. Alih fungsi lahan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan dan kebutuhan terhadap lahan akibat pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan. Kegiatan alih fungsi lahan sawah juga didorong oleh banyaknya pendatang yang tertarik mendirikan bangunan di Sleman. Alih fungsi lahan apabila tidak dikendalikan akan berdampak pada menurunnya ketahanan pangan dan meningkatnya kerusakan lingkungan.

Peruntukan lahan untuk kegiatan non pertanian yang tidak memperhatikan kaidah tata ruang seperti pemukiman maupun industri di bantaran/pinggir sungai, pengurukan suti, danau, daerah resapan air dan sejenisnya telah mendorong terjadinya banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Sementara itu, lahan bagi petani merupakan modal untuk meningkatkan kesejahteraan. Seorang pakar ekologi yang sangat dikenal dari Indonesia, Otto Soemarwoto dalam kajian menyatakan bahwa petani untuk hidup layak paling tidak harus memiliki 0,25 Ha lahan pertanian. Penelitian ini memang belum memperhatikan intensifikasi lahan. Permasalahan muncul ketika berhubungan dengan biaya dan kemampuan. Pengolahan lahan pertanian plus jelas membutuhkan ketrampilan dan kemampuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal selain biaya tambahan.

Pembahasan tekanan penduduk terhadap lahan pertanian di Kabupaten Sleman merupakan hal yang menarik karena angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman cenderung mengalami penurunan namun masih relatif tinggi. Sementara itu, luas lahan cenderung tetap bahkan menurun karena adanya perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang dimaksud adalah alih fungsi dari lahan agraris menjadi kegiatan non pertanian seperti untuk pembangunan tempat tinggal, pusat perdagangan dan jasa kemasyarakatan serta alih fungsi lainnya. Penyusutan lahan pertanian masih berlangsung saat ini. Pemerintah tidak mampu untuk menghentikannya dan hanya dapat mengendalikan laju penyusutan lahan pertanian, melalui pembukaan lahan baru di luar Jawa.

Di sisi lain isu strategis pada urusan ketahanan pangan adalah bahwa Kabupaten Sleman merupakan salah satu lumbung padi di DIY sebagai penyangga utama produksi padi dengan kontribusi hasil produksi padi sekitar 35-40 persen. Dengan tingginya alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman, produksi hasil pertanian khususnya padi cenderung menurun, sehingga hal ini akan mempengaruhi ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. Dalam jangka panjang bisa jadi Kabupaten Sleman harus mendatangkan bahan pangan pokok beras dari daerah lain. Hal ini menyebabkan terjadinya ketergantungan dan menurunnya tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah.

Pemerintah Kabupaten Sleman perlu mengambil beberapa alternatif kebijakan untuk menangani maraknya alih fungsi lahan pertanian antara lain : (1) Menekan laju pertumbuhan penduduk; (2) Mengembangkan hunian vertikal; (3) Mengembangkan

pajak progresif; (4) Menyusun dan menetapkan peraturan daerah terkait dengan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); (5) Menegakkan peraturan tentang penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembang perumahan.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan petani mulai dari regulasi pembatasan konversi lahan pertanian, pertanian mina padi, tumpang sari, optimalisasi pemanfaatan lahan kering dengan tanaman pangan berkelanjutan, hingga proses pemasaran produk dengan satu tujuan kesejahteraan petani. Semua kebijakan ini memiliki satu muara yaitu peningkatan kesejahteraan petani.

4.1.7. Dokumen Kependudukan

Pada sub bab ini akan dibahas kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Sleman antara lain: kepemilikan akta yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian. Kepemilikan dokumen akta akan terbagi menjadi empat jenis meliputi kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian.

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil. Dokumen tersebut sebagai bukti diri untuk memperoleh berbagai pelayanan publik seperti perbankan, pertanahan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hukum dan sebagainya. Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : kesadaran penduduk, kedekatan dan kemudahan akses ke tempat pelayanan dokumen, kualitas pelayanan dan kualitas informasi layanan kependudukan. Pemberian dokumen kependudukan bersifat stelsel aktif, dimana penduduk harus aktif untuk melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka, tetapi pemerintah kota tetap berperan aktif dan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran untuk *mengupdate* data kependudukan merupakan usaha agar data dalam database sesuai dengan dokumen dan realitas yang dialami penduduk.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pada Pasal 68, kutipan Akta Pencatatan sipil meliputi (1) kelahiran; (2) kematian; (3) perkawinan; (4) perceraian; (5) pengakuan anak (6) pengesahan anak.

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas tatus keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

Akta kelahiran merupakan identitas awal sekaligus bukti legal yang menunjukkan bahwa seseorang adalah bagian dari warga negara Indonesia. Selain itu, akta kelahiran merupakan bukti sah dan legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya. Dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, hak waris, pengurus paspor dan dokumen lainnya. Kepemilikan akta kelahiran dihitung dari jumlah bayi lahir dan sudah dicariakan akta kelahiran dan jumlah kelahiran dari wilayah tertentu. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, perbankan, pertanahan, kartu keluarga, hak waris, kesehatan dan dokumen lainnya.

Tabel 4.13. dibawah ini menggambarkan bahwa 44,47 persen dari penduduk di Kabupaten Sleman belum memiliki akta kelahiran, bahkan di Kecamatan Depok penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran hingga diatas 50 persen. Tingginya penduduk yang belum memiliki akta kelahiran ini disebabkan kelompok umur tua yang pada saat dilahirkan belum ada regulasi terkait pengurusan dokumen kependudukan kelahiran. Kondisi ini terlihat dari kecilnya jumlah penduduk umur dibawah 18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran yaitu 5,73 persen.

Tabel 4.13. Distribusi Dokumen Kependudukan menurut Kecamatan

No	KECAMATAN	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk		Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia dibawah 18 tahun		Penduduk Status Kawin		Penduduk Status Cerai		Kematian yang Dilaporkan	Akta kematian yang Diterbitkan
		Memiliki	Belum Memiliki	Memiliki	Belum Memiliki	Kawin tercatat	Kawin Belum Tercatat	Memiliki Akta	Belum Memiliki Akta		
1	GAMPING	49.045	44.867	21.929	1.679	24.203	23.033	1.222	355	1.096	1.096
2	GODEAN	37.863	32.039	15.976	968	18.362	17.478	541	581	867	867
3	MOYUDAN	21.361	12.123	7.298	212	12.788	4.528	275	133	548	548
4	MINGGIR	20.822	11.690	7.183	175	13.192	3.721	265	160	542	542
5	SEYEGAN	30.035	20.958	12.136	318	19.011	7.285	484	369	597	597
6	MLATI	45.083	47.818	21.182	2.019	24.285	22.303	881	876	955	955
7	DEPOK	63.669	60.020	27.397	3.182	35.141	25.409	1.684	646	1.226	1.226
8	BERBAH	34.115	21.383	13.734	453	22.745	5.295	724	327	618	618
9	PRAMBANAN	30.717	23.284	13.222	524	20.910	7.376	616	235	714	714
10	KALASAN	41.348	41.980	19.625	1.547	20.694	21.157	950	546	782	782
11	NGEMPLAK	38.783	24.081	15.651	543	24.663	6.946	766	267	648	648
12	NGAGLIK	55.906	42.619	23.444	1.863	35.801	13.418	1.235	431	1.015	1.015
13	SLEMAN	39.331	30.724	17.217	796	21.716	13.536	857	308	718	718
14	TEMPEL	30.999	23.342	13.129	427	16.865	11.013	416	477	678	678
15	TURI	22.387	14.963	8.852	299	14.558	4.491	357	217	422	422
16	PAKEM	20.540	17.218	8.974	344	11.921	7.013	496	167	466	466
17	CANGKRINGAN	19.276	12.365	7.810	143	13.914	2.909	378	131	388	388
JUMLAH		601.280	481.474	254.759	15.492	350.769	196.911	12.147	6.226	12.280	12.280

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, 2020

Akta perkawinan adalah suatu legalitas untuk menentukan status hukum laki-laki dan perempuan bahwa mereka terikat sebagai suami isteri. Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan penduduk muslim menggunakan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti legal perkawinan mereka. Kepemilikan akta perkawinan yang dihitung adalah akta perkawinan yang dicatatkan dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman masih panjang. Tabel 4.13. menunjukkan bahwa dokumen-dokumen penting banyak yang belum dimiliki oleh masyarakat. Terdapat 35,95 persen perkawinan belum tercatat, bahkan Kecamatan

Depok hingga mencapai sebanyak 25.409 (12,90 persen). Persentase terendah masyarakat yang belum melakukan pencatatan perkawinan berada di Kecamatan Cangkringan yakni sebesar 1,47 persen atau sebanyak 2.909. Kepemilikan akta perkawinan diperlukan ketika terjadi kasus yang menyangkut hak-hak perdata suami-istri.

Informasi pencatatan perkawinan ini didapatkan dari informasi kartu keluarga. Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah apakah memang penduduk belum mencatatkan perkawinannya karena tidak tahu atau karena kendala program sistem administrasi kependudukan. Harapannya kemungkinan kedua yang terjadi artinya sebenarnya masyarakat sudah mencatatkan perkawinannya namun karena perbedaan pengkodean atau penomoran buku nikah sehingga tidak diterima sistem. Jika kemungkinan pertama yang terjadi, dinas kependudukan harus merinci lebih detail siapa yang belum melakukan pencatatan sehingga akan menjadi program kerja Kementerian Agama.

Pasangan suami istri tentunya berkeinginan menjalani ikatan perkawinan selamanya, tetapi bila sudah tidak dapat dipertahankan maka terjadi perceraian. Bukti hukum pasangan suami istri telah berpisah adalah Akta Perceraian. Bila akta perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Non-Muslim), maka perceraian dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, dan bila akta perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (Muslim) maka proses perceraianya melalui Pengadilan Agama.

Tabel 4.12 menunjukkan terdapat persoalan dokumen kependudukan yang lain di Kabupaten Sleman yaitu masih rendahnya kepemilikan akta perceraian. Akta perceraian adalah suatu bukti outentik tentang putusnya suatu ikatan perkawinan. Apabila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, maka perceraian harus melalui Pengadilan Negeri, yang telah menjadi kekuatan hukum yang pasti, baru dicatatkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang berjalan dan telah diperuntukan untuk itu. Akta Perceraian merupakan bukti sahnya perceraian yang diperlukan sebagai dasar legalitas putusnya perkawinan dan perubahan status sebagai janda atau duda cerai hidup, pengurusan hak tunjangan anak dari suami istri, harta gono gini, dan perkawinan setelah perceraian.

Di Kabupaten Sleman sebanyak 43 persen perceraian belum memiliki akta perceraian, bahkan di Kecamatan Tempel, Mlati dan Godean hingga diatas 60 persen.

Manfaat akta perceraian bagi masyarakat tidak sebesar manfaat akta kelahiran sehingga masyarakat berusaha memiliki dokumen tersebut. Akta perceraian akan diurus ketika masyarakat hendak melakukan pengurusan hak-hak tunjangan atau pembagian harta. Namun demikian, selain untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan sosialisasi kelengkapan dokumen pada masyarakat atas semua kejadian demografi tetap harus dilakukan.

Persoalan terakhir yang akan dibahas dalam dokumen kependudukan adalah akta kematian. Akta kematian merupakan dokumen kependudukan yang merupakan identitas atas penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun akta kematian memiliki manfaat yang cukup banyak yaitu pembuktian kematian secara hukum, pengurusan warisan/hubungan hutang piutang/asuransi, pengurusan pensiun bagi pegawai, pengurusan TASPEN, dan pencairan dana/tabungan di bank namun kepemilikan akte kematian juga tidak sebanyak penduduk yang mengalami kejadian kematian. Meskipun kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman terkait dengan pelayanan akta kematian mencapai 100 persen, artinya semua yang mengajukan permohonan semua terlayani dengan baik, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman masih memiliki pekerjaan rumah. Jumlah pemohon akta kematian tidak sebanyak jumlah penduduk yang terlaporkan mengalami kejadi kematian. Terdapat 50,00 persen penduduk yang belum mengurus akta kematian meskipun mengalami kejadian.

Salah satu program unggulan untuk tertib akta kematian adalah LUKA DESI (Keluarga Berduka Desa Siaga). LUKA DESI merupakan sebuah inovasi dalam penertiban akta kematian. Kegiatan ini pada awalnya melalui kegiatan Desa Rintisan Tertib Adminisrasi Kependudukan di Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman mengadakan sisir adminduk dengan kegiatan jemput bola akta kelahiran, akta kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), rekam data e-ktp, dan Sosialisasi Informasi Data Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman memiliki Program Unggulan IDOLA (Integrasi Dokumen Layanan Administrasi Kependudukan) yang merupakan inovasi pelayanan dokumen kependudukan, dalam hal ini permohonan akta kelahiran bagi kelahiran yang belum terlambat, selain memperoleh akta kelahiran juga memperoleh Kartu Keluarga baru, dimana nama anak

sudah masuk didalamnya, sekaligus memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA). Program unggulan lain yang bertujuan memberi pelayanan prima adalah PAMAN TIMIN yaitu inovasi Kabupaten Sleman Tertib Administrasi Kependudukan. Program ini merupakan pendekatan baru dalam evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tingkat kecamatan dan desa dalam rangka perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat menuju terwujudnya pelayanan prima.

BAB V

SOSIAL

5.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pelaksanaan urusan sosial Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini diarahkan salah satunya pada upaya mengatasi permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin Hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat memang menjadi salah satu permasalahan yang perlu ditangani secara serius. Hambatan sosial berupa keterlantaran, kecacatan, kemiskinan, bencana dan lain sebagainya menjadi salah satu penyebab yang membuat seseorang atau sekelompok orang mengalami disfungsi terhadap fungsi sosialnya di masyarakat. Di Kabupaten Sleman setidaknya terdapat 19 kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Data Tabel 5.1 menunjukkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 masih cukup banyak, yaitu sebanyak 22.162 yang terdiri dari anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan hukum, anak jalanan, anak dengan kecacatan, penyandang disabilitas, tuna susila, lansia terlantar, gelandangan, pengemis, pemulung, bekas warga binaan pemasyarakatan, pekerja migran bermasalah sosial, anak korban tindak kekerasan, keluarga bermasalah sosial psikologis, korban tindak kekerasan, perempuan rawan sosial ekonomi, korban penyalahgunaan NAPZA dan kelompok minoritas. Kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sleman yang paling banyak adalah lansia terlantar (7.446). Selanjutnya adalah penyandang disabilitas (6.891), anak terlantar (2.377), perempuan rawan sosial ekonomi (2.652) dan keluarga bermasalah sosial psikologis (1.387).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak

terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Penanganan anak, seperti anak terlantar sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Sukadi, 2013). Terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak terlantar diantaranya, membebaskan biaya pendidikan bagi anak terlantar dan keluarga miskin, perbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa, tingkatkan peran serta masyarakat seperti tokoh agama, tokoh akademisi, LSM, panti asuhan, orang tua asuh, payung hukum dan pemberdayaan terkait. Menurut data Tabel 5.1 jumlah anak terlantar di Kabupaten Sleman tahun 2020 menyebar di seluruh kecamatan. Kecamatan dengan jumlah anak terlantar paling banyak adalah Kecamatan Moyudan (378) dan kecamatan dengan jumlah anak terlantar paling sedikit adalah Kecamatan Depok (7).

Hal yang menarik adalah data mengenai tindak kekerasan yang terjadi menyebabkan perempuan masih menjadi korban. Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2020 menunjukkan terdapat 169 kasus korban tindak kekerasan di Kabupaten Sleman. Kecamatan Mlati merupakan kecamatan dengan jumlah kasus korban tindak kekerasan paling banyak di Kabupaten Sleman (46). Beberapa faktor yang menjadi penyebab kekerasan sendiri di antaranya adalah : faktor ekonomi, kondisi lingkungan yang tidak responsif terhadap perempuan dimana ada ketidakadilan gender yang membuat perempuan bungkam dan enggan bercerita. Kondisi ini diperparah pula dengan adanya anggapan bahwa karena menceritakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sama saja dengan membuka aib keluarga, media sosial, kepribadian secara psikologi.

Kecamatan Sleman merupakan kecamatan dengan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial paling banyak di Kabupaten Sleman (1.959) dan Kecamatan Depok merupakan kecamatan dengan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial paling sedikit di Kabupaten Sleman (673). Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial.

Pada tahun 2020, panti asuhan/anak di Kabupaten Sleman ada 31 lokasi, rumah singgah ada 2 (dua) lokasi. Sedangkan panti jompo hanya ada 1 (satu) lokasi. Kabupaten Sleman mempunyai kewajiban membina semua panti asuhan dan panti jompo, baik yang milik pemerintah maupun swasta. Untuk mempermudah koordinasinya, maka

dibentuk Forum Komunikasi Panti Asuhan (FORKAPA). Ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk membangun sebuah panti asuhan, seperti ijin operasional, akreditasi LKS yang harus sesuai dengan Standar Nasional Anak (SNPA) dari Kementerian Sosial.

Kelompok PMKS yang aktif pada tahun 2020 sudah mencapai 353 kelompok. Hal ini dikarenakan adanya pendampingan dari pendamping PKH untuk KUBE PKH dan pendamping desa untuk PRSE. Selain itu, Dinas Sosial mengadakan seleksi dan penghargaan bagi KUBE berprestasi. Sedangkan PSKS aktif di Kabupaten Sleman ada 457 dari 772 PSKS.

Penanganan anak jalanan dan orang terlantar pada tahun 2020 mencapai 305 orang. Penanganan disini maksudnya suatu proses, cara atau tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis. Setelah upaya koersif, anak terlantar mendapat pembinaan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial, panti pemerintah maupun panti swasta berjumlah 20 anak dari 20 kasus anak terlantar. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian ini karena adanya koordinasi yang baik antara panti pemerintah dan swasta serta adanya bantuan Satuan Bakti Pekerja Sosial.

Jumlah penanganan penyandang disabilitas dan trauma sebanyak 10.268 kasus, dengan capaian penanganan 100 persen. Saat ini, para penyandang disabilitas sudah mulai memahami kebutuhannya masing-masing. Sebagian besar masyarakat dan keluarga pun sudah memahami perannya dalam penanganan disabilitas.

Kerjasama dari semua pihak untuk mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membawa hasil yang maksimal. Namun Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 adalah sebesar 70,37 persen meningkat cukup signifikan dari tahun 2018 sebesar 41,47 persen. Secara prinsip, bantuan diberikan untuk meringankan beban terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar, namun seringkali kurang bersifat produktif. Karena itu, besaran sebagian bantuan dialihkan pada kegiatan lain seperti kegiatan

padat karya yang hasil akhirnya dapat meningkatkan kemampuan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraam urusan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Data PMKS daerah belum bisa terintegrasi dengan data pusat.

Hal ini dikarenakan data PMKS selalu dinamis, dan terus meningkat, berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012, ada 26 jenis PMKS.

- b. Belum adanya pendampingan kelompok PMKS setelah berakhirnya masa penumbuhan.

Agar suatu usaha tetap berjalan, membutuhkan strategi untuk terus tumbuh dan berjalan, seperti strategi pemasaran, analisa pesaing, desain pengembangan, dan sebagainya. Tentunya untuk mendapatkannya dibutuhkan pendamping untuk selalu membimbing dan mengarahkan;

- c. Kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap permasalahan sosial (kondisi anak terlantar, penyandang disabilitas).

Derasnya arus globalisasi dan modernisasi menjadi salah satu sebab terkikisnya rasa kepedulian terhadap sesama. Mereka lebih suka hidup dalam dunia maya yang selalu memanjakan dari pada dunia nyata.

- d. Belum adanya tempat dan sarana prasarana penampungan hasil penjangkauan dan penertiban dalam upaya koersif anak jalanan dan orang terlantar.

- e. Masih ada beberapa panti swasta yang pengelolaan dan sarana prasarana belum memenuhi Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA).

Di Kabupaten Sleman terdapat 102 LKS, 30 persen diantaranya izin operasionalnya sudah berakhir atau dapat dikatakan LKS itu tidak berizin. Sasaran LKS ini adalah anak jalanan, napi, janda, WTS, difabel, NAPZA, ODGJ, ODHA, dan lain-lain. Bahkan ada yang belum memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai dasar pengelolaan LKS;

- f. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan

peran yang sama, baik segi pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, perlakuan yang sama dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya, dan sebagainya.

g. Meningkatnya peredaran dan penyalahan NAPZA

Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitas sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2020 adalah 68 orang;

h. Masyarakat miskin belum maksimal dalam mengakses dana Jaring Pengaman Sosial (JPS).

JPS digunakan untuk pendidikan dan kesehatan, yang mencakup orang terlantar. Tidak semua masyarakat miskin mengetahui tentang informasi JPS dan kegunaannya; serta

i. Penanganan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) untuk layanan program jaminan dan perlindungan sosial secara nasional belum optimal.

Aduan masyarakat ke pemerintah pusat memerlukan waktu penyelesaian relatif lebih lama dibanding dengan aduan ke tingkat kabupaten.

Tabel 5.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020

Kecamatan	Anak Balita Terlantar (ABT)	Anak Terlantar (AT)	Anak Berhak diperlakukan Hukum (ABH)	Anak Jalan-jalan (AJ)	Anak Dengan Kecacatan (ADK)	Penyandang Disabilitas (PD)	Tuna Susila (TS)	Lansia Terlantar (LUT)	Gelandangan (GEL)	Pengemis (PENG)	Pemulung (PEM)	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBLP)	Pekerja Migran Bermasyarakat Sosial (PMBS)	Anak Korban Tindak Kekerasan (AKTK)	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Korban Penyalahgunaan NAPZA (KPN)	Kelompok Minoritas (KM)	TOTAL
GAMPING		69	0		26	606		366		8	13		21		55	7	157	24	0	1.352
GODEAN	5	97	0		44	542	3	638	2	1	12	2	31		135	5	156	21	0	1.694
MOYUDAN	28	378	0		25	363	1	458			4		23	1	42	1	134	8	0	1.466
MINGGIR	5	131	0		22	423	1	436	1	1	3		4		30	3	93	15	0	1.168
SEYEGAN	5	72	0	4	12	284	9	370	8	5	8		5	1	64	4	81	8	0	940
MLATI	9	85	0	7	18	346	6	431	1		5	1	4		57	46	172	15	0	1.203
DEPOK		7	0		75	426		114			3	2			10	3	32	1	0	673
BERBAH	4	119	0		19	360	2	388			6	1	1		127	4	172	16	0	1.219
PRAMBANAN	15	169	0	1	43	320	2	438	2	2	4	2	1		63	3	175	3	0	1.243
KALASAN	24	241	0		50	335		751	1	1	6	2	2		139	4	240	2	0	1.798
NGEMPLAK	10	108	0		48	525		390							16	9	166	2	0	1.274
NGAGLIK	4	121	0		19	323	5	211		1	6	1	6	1	85	10	251	14	0	1.058
SLEMAN	8	170	0		49	511	2	746	6	1	10				171	35	230	20	0	1.959
TEMPEL	2	168	0		46	468	30	412	5	3	2	1	2		160	12	298	14	0	1.623
TURI	8	172	0		37	280	2	295			2		3		35	1	95		0	930
PAKEM	1	29	0		34	398	3	275			6				48	22	84	8	0	908
CANGKRINGAN	13	241	0		25	381		727						1	150		116		0	1.654
KABUPATEN SLEMAN	141	2.377	0	12	592	6.891	66	7.446	26	23	90	12	103	4	1.387	169	2.652	171	0	22.162

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, 2020

5.2 Penyandang Disabilitas

Jenis penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman terdiri dari *eks psikotik*, ganda (fisik dan mental), mental retardasi, tuna daksa, tuna netra, tuna rungu wicara dan penyakit kronis. Berdasarkan Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman diketahui bahwa jenis penyandang disabilitas paling banyak di Kabupaten Sleman adalah tuna daksa, yaitu sebanyak 2.852. Sementara itu, jenis penyandang disabilitas paling sedikit adalah ganda (fisik dan mental), yaitu sebanyak 203. Kecamatan di Kabupaten Sleman dengan jumlah penyandang disabilitas paling banyak yaitu Kecamatan Gamping sebanyak 632. Sementara itu, Kecamatan Seyegan merupakan kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas paling sedikit di Kabupaten Sleman sebanyak 296. Yang penting juga untuk dijawab adalah apakah masih ada penyandang disabilitas yang belum terjangkau oleh pendataan PMKS, mengingat masih ada persepsi di masyarakat dimana keluarga dengan penyandang disabilitas, memilih menyembunyikan penyandang disabilitas karena rasa malu.

Tabel 5.2

Penyandang Masalah Sosial di Kabupaten Sleman Tahun 2020

Kecamatan	Eks Psokotik	Ganda (Fisik & Mental)	Mental Retardasi	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tunga Rungu Wicara	Penyakit Kronis	Jumlah
Gamping	217	59	33	152	65	45	61	632
Godean	232	15	34	180	52	46	27	586
Moyudan	70	8	21	161	31	24	73	388
Minggir	112	6	17	251	17	32	10	445
Seyegan	107	0	42	95	11	27	14	296
Mlati	66	3	5	214	17	38	21	364
Depok	124	2	19	285	19	43	9	501
Berbah	150	7	21	96	44	26	35	379
Prambanan	48	1	43	216	17	27	11	363
Kalasan	124	8	32	115	41	39	26	385
Ngemplak	204	34	26	155	41	78	35	573
Ngaglik	92		37	158	17	26	12	342
Sleman	218	11	18	188	36	45	44	560
Tempel	210	13	30	134	28	54	45	514
Turi	113	3	22	135	14	28	2	317
Pakem	166	31	28	120	20	41	26	432
Cangkringan	120	2	19	197	30	35	3	406
KABUPATEN SLEMAN	2.373	203	447	2.852	500	654	454	7.483

Sumber : Dinas Sosial, 2020

BAB VI

PANDEMI COVID-19 DAN ISU KEPENDUDUKAN

DI KABUPATEN SLEMAN

6.1 Kemiskinan

Dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman menyebabkan angka kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 10 persen dibandingkan Tahun 2020. Kondisi ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman. Data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman menunjukkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sleman bertambah sebanyak 3.727 KK menjadi 30.000 KK. Bertambah antara 10 sampai 15 persen dibandingkan data Tahun 2020, yaitu sebanyak 29.161 KK. Penambahan terjadi sejak pandemi Covid-19 melanda pada Bulan Maret Tahun 2020. Kondisi ini terjadi akibat banyaknya sektor ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Sleman yang terkena dampak pandemic Covid-19. Pemerintah Kabupaten Sleman sejatinya menargetkan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman turun menjadi 8 persen pada tahun ini. Namun akibat pandemi Covid-19, angka kemiskinan di Kabupaten Sleman justru mengalami peningkatan, Pada tahun 2018 jumlah KK miskin sebanyak 34.128 (9,48 persen). Angka tersebut mengalami penurunan pada Tahun 2019 menjadi 31.355 KK (8,77 persen) atau turun 0,71 persen. Salah satu faktor penyebab peningkatan kemiskinan di Kabupaten Sleman tersebut, antara lain faktor kehilangan pekerjaan, kebanyakan masyarakat yang memiliki skill rendah atau berposisi di bagian yang rendah. Misalnya untuk garmen, biasanya posisinya sebagai penjahit. Akibat pandemi Covid-19 mereka banyak yang kehilangan pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Sleman telah berusaha melakukan berbagai cara untuk membantu masyarakat kurang mampu, diantaranya melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai (BST), pemberian Jadup, dan Bantuan UPK untuk UMKM. Sampai melakukan intervensi terhadap gakin yang belum mendapat akses. Saat ini tengah dilakukan penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi sekitar 43.000 penerima Bansos dari kelompok Program Keluarga Sejahtera (PKH). Adapun jumlah penerima Bansos Sembako senilai Rp 200.000,- di Kabupaten Sleman sekitar 76.000 penerima dan penerima BST sebesar Rp 300.000,- sekitar 43.000 penerima. Data-data penerima Bansos harus terpadu by

name dan *address* berbasis NIK. Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap permasalahan sosial. Selama pandemi Covid-19 anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman masih difokuskan untuk penanganan Covid-19. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman juga menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional. Sembari menangani pandemi Covid-19 juga dilakukan pemulihan ekonomi.

6.2 Partisipasi Keluarga Berencana (KB)

Pandemi Covid-19 tidak berdampak banyak terhadap program pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sleman. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman menunjukkan peserta aktif KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) masih cukup tinggi di Kabupaten Sleman sepanjang Tahun 2020. Bahkan, angkanya mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2019. Kepesertaan aktif KB di Kabupaten Sleman Bulan Desember 2019 sampai dengan Desember 2020 mengalami peningkatan sebanyak 1.559 orang. Dari awalnya 110.207 menjadi 111.833. Sementara itu, PUS dari semua tahapan berjumlah 144.604 orang. Dari jumlah tersebut, kepesertaan aktif KB sebanyak 111.833 orang. Artinya, pencapaian program KB di Kabupaten Sleman mencapai 77,34 persen. Jumlah tersebut sudah cukup tinggi dikarenakan target capaian DP3AP2KB Kabupaten Sleman adalah di angka 76 persen, sehingga sudah melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian akseptor KB di Kabupaten Sleman atas dasar kerja keras dari semua pihak. Pada saat awal masa pandemic Covid-19, DP3AP2KB sempat merasa pesimis dikarenakan peserta aktif KB yang seharusnya dijadwalkan suntik ulang, banyak yang tidak datang. Banyak yang merasa takut datang ke fasilitas kesehatan, sehingga terjadi ketimpangan angka cukup besar. Melalui dukungan dari BKKBN Pusat dan Pemerintah Provinsi DIY, DP3AP2KB bekerja keras agar capaian akseptor KB di Kabupaten Sleman tidak mengalami penurunan. Strategi dijalankan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui momentum khusus. Seperti hari Jadi Kabupaten, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia maupun Hari Kontrasepsi se-Dunia, dengan adanya pelayanan sejuta akseptor dari BKKBN Pusat. Termasuk, membuka pelayanan konsultasi KB secara online dan gencar melakukan promosi menggunakan video.

6.3 Kasus Perceraian

Data Pengadilan Agama Kabupaten Sleman menunjukkan terjadi peningkatan angka kasus perceraian selama masa pandemi Covid-19. Penyebab paling banyak kasus perceraian di Kabupaten Sleman adalah faktor ekonomi. Dengan adanya pandemi Covid-19 memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi ekonomi keluarga. Sehingga ada beberapa perkara yang memang disebabkan karena faktor ekonomi. Dengan adanya pandemi Covid-19 pengaruhnya besar sekali kepada ekonomi keluarga. Sehingga ada beberapa perkara yang memang disebabkan karena faktor ekonomi. Lebih lanjut memang di dalam gugatan tersebut tidak dijelaskan secara langsung bahwa perkara tersebut akibat pandemi Covid-19. Tetapi memang jika dilihat di dalam gugatan tersebut tertulis akibat faktor ekonomi. Mungkin mengapa tidak disebutkan juga karena faktor pandemi Covid-19 sebab sebelum pandemic Covid-19 kondisi ekonomi keluarga sudah tidak bagus. Ditambah pada saat pandemi Covid-19 pemasukan turun. Ada beberapa perkara yang terungkap di persidangan, beberapa orang mengalami penurunan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kasus perceraian di Kabupaten Sleman masih didominasi oleh cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak. Jumlah kedua kasus perceraian tersebut juga mengalami peningkatan. Menurut data yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, pada tahun 2019 kasus permohonan perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat sebanyak 1.336 perkara sedangkan cerai talak hanya sebanyak 503 kasus. Atau jika dijumlahkan menjadi 1.830 perkara yang diterima. Untuk perkara yang diputus pada cerai gugat sebanyak 1.156 kasus sedangkan cerai talak 437 kasus dengan total keduanya menjadi 1.593 kasus yang telah diputus. Angka tersebut secara keseluruhan naik pada tahun 2020, untuk perkara yang diterima PA perihal cerai gugat sebanyak 1.248 dan cerai talak 419 dengan total 1.667 kasus diterima. Sementara yang diputus cerai gugat 1.343 kasus dan cerai talak 435 kasus total menjadi 1.778 kasus. Tidak hanya faktor ekonomi yang menjadi penyebabknya, adanya pihak ketiga juga masih ditemukan baik suami yang kedapatan selingkuh ataupun sebaliknya. Biasanya perselingkuhan itu muncul dari seringnya yang bersangkutan menggunakan media sosial. Dari banyak kasus tersebut didominasi oleh pernikahan yang belum matang. Walupun tidak dipungkiri perceraian rumah tangga ini bisa menimpa siapa pun tanpa mengenal usia bahkan lansia sekalipun.

Total laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Sleman selama Tahun 2020 sebanyak 2.234 sedangkan untuk yang telah diputus sebanyak 2.151 perkara.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2009). *Evaluasi Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta : Bappenas.
- Hobbs, F.B. (2004). 'Age and Sex Composition' In Siegel, J.S., & Swanson, D.A. (eds),
Methods and Material of Demography (2nd ed). London: Elsevier Academic Press.
- Kusumaningrum, Radita (2009). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Jenis Kontrasepsi Yang Digunakan Pada Pasangan Usia Subur*. Undergraduate Thesis,
Medical Faculty.
- Mankiw, G. (2007). *Principles of Economics* (4th ed.). Cincinnati: South-Western College Pub.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.
- Hull, T. (2002). 'The Marriage Revolution in Indonesia'. Paper Presented at the Population Association of America Annual Meeting, Australian National University, 9-11 May 2002.
- Mantra, Ida Bagoes. (2003). *Demografi Umum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020*. DIY.
- Schultz, T.W. (1963). *The Economic Value of Education*. New York: Columbia University Press.
- Shryock, Henry S. and Jacob S. Siegel. (1976). *The Methods and Materials of Demography*. New York: Academic Press.
- Sumantri, Suharsono dan E.N. Anwar. (1995). Kecenderungan Mortalitas dan Penyebab Kematian dalam Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. *Fertilitas dan Mortalitas di Indonesia*. Hal 323-365.

- Standing, Guy. (1978). *Labour Force Participation and Development*. Geneva: International Labour Force.
- Todaro, M., & Smith, S. (2007). *Economic Development (10th ed.)*. Boston: Pearson Addison Wesley.
- Tukiran. (2010). *Kependudukan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Turnham, David. (1993). *Employment and Development*. Paris: Development Center Studies.
- Utomo, Budi. (1985). *Mortalitas : Pengertian dan Contoh Kasus di Indonesia*. Jakarta: Proyek Penelitian Mortalitas dan Morbiditas, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.